

LAPORAN AKHIR MAGANG MAHASISWA

**ANALISIS DETERMINAN EFEKTIVITAS PENGUNGKAPAN *FRAUD* DI
PEMERINTAHAN: PERAN KOMPETENSI AUDITOR, PROSEDUR AUDIT
INVESTIGATIF, DAN ETIKA AUDITOR**



Disusun Oleh :

Hania Lu'luil Ma'nun

22312102

Dosen Pembimbing :

Arief Rahman, S.I.P., S.E., M.Com., Ph.D.

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

LAPORAN AKHIR MAGANG MAHASISWA

ANALISIS DETERMINAN EFEKTIVITAS PENGUNGKAPAN *FRAUD* DI PEMERINTAHAN: PERAN KOMPETENSI AUDITOR, PROSEDUR AUDIT INVESTIGATIF, DAN ETIKA AUDITOR

Laporan akhir program magang ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Dibuat Oleh :

Hania Lu'luil Ma'nun

Nomor Induk Mahasiswa : 22312102

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hania Lu'luil Ma'nun

NIM : 22312102

Program Studi : Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

Judul : Analisis Determinan Efektivitas Pengungkapan *Fraud* di
Pemerintahan: Peran Kompetensi Auditor, Prosedur Audit
Investigatif, dan Etika Auditor

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan akhir magang ini merupakan hasil tulisan saya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, selain pembimbing dan narasumber yang terkait.
2. Laporan akhir magang ini merupakan karya asli yang belum pernah diajukan atau diterbitkan dalam bentuk apa pun, baik di Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Seluruh isi dalam laporan akhir magang ini merupakan hasil pemikiran penulis sendiri, kecuali bagian tertentu yang dikutip dari karya atau pendapat pihak lain yang telah disebutkan secara tertulis dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 April 2026



Hania Lu'luil Ma'nun

NIM : 22312102

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenar-benarnya menyatakan bahwa laporan akhir magang berjudul “Analisis Determinan Efektivitas Pengungkapan Fraud di Pemerintahan: Peran Kompetensi Auditor, Prosedur Audit Investigatif, dan Etika Auditor” yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain yang pernah diajukan sebelumnya. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya maupun pendapat orang lain yang digunakan dalam laporan ini, kecuali yang telah dicantumkan secara tertulis sebagai referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima segala bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Mei 2026

Peneliti



Hania Lu'luil Ma'nun

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS DETERMINAN EFEKTIVITAS PENGUNGKAPAN *FRAUD* DI
PEMERINTAHAN: PERAN KOMPETENSI AUDITOR, PROSEDUR AUDIT
INVESTIGATIF, DAN ETIKA AUDITOR**

LAPORAN AKHIR MAGANG

Dibuat Oleh :



Hania Lu'luil Ma'nun

Nomor Induk Mahasiswa : 22312102

Disahkan Oleh :

Yogyakarta, 2 April 2026

Dosen Pembimbing



Arief Rahman, S.I.P., S.E., M.Com., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/MAGANG

MAGANG BERJUDUL

Analisis Determinan Efektivitas Pengungkapan Fraud Di Pemerintahan: Peran Kompetensi Auditor, Prosedur Audit Investigatif, dan Etika Auditor

Disusun oleh : HANIA LU'LUIL MA'NUN

Nomor Mahasiswa : 22312102

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 16 April 2026

Penguji/Pembimbing Magang : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Penguji : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan laporan akhir magang ini dengan judul **“Analisis Determinan Efektivitas Pengungkapan Fraud Di Pemerintahan: Peran Kompetensi Auditor, Prosedur Audit Investigatif, Dan Etika Auditor”**. Penyusunan laporan magang ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Penulisan laporan akhir magang ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik, memperluas wawasan, serta meningkatkan keterampilan penulis, khususnya dalam memahami dan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Selain itu, proses penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang.

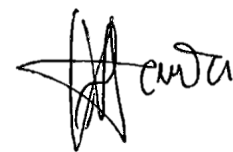
Penulis menyadari bahwa proses penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Tanpa adanya arahan dan bantuan dari pihak-pihak terkait, penyusunan laporan ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, mama Susi Wardani dan papa Bambang Herman Handoko, S.E., yang senantiasa berjuang memenuhi berbagai kebutuhan penulis, memberikan kasih sayang, doa, nasihat, serta dukungan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
2. Kedua saudara perempuan penulis, kakak pertama Aulia Silvy Herdhani, S.P. dan kakak kedua Hannifa Sebyana Lukita, S.Ikom., yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan laporan ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2026–2030.
4. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia periode 2022–2026.

5. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, nasihat, motivasi, serta berbagai masukan dan saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan laporan akhir magang ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen, pegawai, serta staf Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
8. Evo Aninditya Rais, Fauzabil Jannah, Rifka Fadhila Fauzia, serta rekan-rekan lainnya yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan kepada penulis selama proses penyusunan laporan ini.
9. Seluruh karyawan dan karyawan Perwakilan BPKP DIY, khususnya pada bidang investigasi, yang telah memberikan bantuan, pengalaman, serta kesempatan kepada penulis selama pelaksanaan kegiatan magang.
10. Serta berbagai pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan akhir magang ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan di masa mendatang, sehingga karya tulis ini dapat menjadi lebih baik dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 13 Maret 2026



Hania Lu'luil Ma'nun

NIM : 22312102

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengenalan Bab	1
1.2. Latar Belakang.....	1
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN LITERATUR.....	9
2.1. Pengenalan Bab	9
2.2. Landasan Teori.....	9
2.2.1. Teori Atribusi.....	9
2.3. <i>Fraud</i> (Kecurangan)	10
2.4. Kompetensi Auditor.....	12
2.5. Prosedur Audit	13
2.6. Etika Auditor.....	14
2.7. Audit Investigatif.....	15
2.8. Pengungkapan <i>Fraud</i>	15
2.9. Sejarah Berdirinya BPKP	16
2.9.1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Investigasi.....	17
2.9.2. Visi dan Misi Deputi Bidang Investigasi	18
2.9.3. Struktur Organisasi Deputi Bidang Investigasi	19
2.10. Kajian Peneliti Sebelumnya.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1. Pengenalan Bab	24
3.2. Jenis Penelitian	24
3.3. Obyek Penelitian.....	25

3.4.	Fokus Penelitian	25
3.5.	Sumber dan Data Penelitian	26
3.6.	Sistematika Penelitian.....	28
3.7.	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.8.	Teknik Analisis Data.....	30
3.8.1.	Coding	30
3.8.2.	Analytical Maps.....	32
3.8.3.	Framework Matrices.....	32
3.9.	Objektifitas dan Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		36
4.1.	Pengenalan Bab	36
4.2.	Profil Tempat Magang	36
4.2.1.	Visi dan Misi Lembaga.....	38
4.2.2.	Tujuan Lembaga	38
4.2.3.	Struktur Organisasi Lembaga	39
4.3.	Rencana Pelaksanaan Program Magang.....	39
4.3.1.	Bentuk Kegiatan	39
4.3.2.	Tempat dan Waktu Kegiatan.....	40
4.3.3.	Data Peserta	40
4.4.	Peran Kompetensi Auditor Terhadap Efektivitas Pengungkapan <i>Fraud</i>	44
4.5.	Peran Prosedur Audit Investigatif Terhadap Efektivitas Pengungkapan <i>Fraud</i> ..	51
4.6.	Peran Etika Auditor Terhadap Efektivitas Pengungkapan <i>Fraud</i>	58
BAB V PENUTUP		64
5.1.	Kesimpulan.....	64
5.2.	Keterbatasan Penelitian	65
5.3.	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN		72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Peneliti Sebelumnya.....	21
Tabel 2.2 Kajian Peneliti Sebelumnya (Lanjutan).....	22
Tabel 2.3 Kajian Peneliti Sebelumnya (Lanjutan).....	23
Tabel 3.1 Partisipan Wawancara.....	27
Tabel 4.1 Rencana Kegiatan Magang.....	40
Tabel 4.2 Rencana Kegiatan Magang (Lanjutan)	41
Tabel 4.3 Rencana Kegiatan Magang (Lanjutan)	42
Tabel 4.4 Rencana Kegiatan Magang (Lanjutan)	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Klasifikasi <i>Fraud</i>	11
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Deputy Bidang Invenstigasi	19
Gambar 3.1 Sistematika Penelitian.....	28
Gambar 4.1 Kantor Perwakilan BPKP DIY	36
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP DIY	39
Gambar 4.3 Pelatihan dan Pendidikan.....	45
Gambar 4.4 Keahlian Khusus.....	47
Gambar 4.5 Pengalaman Praktis.....	48
Gambar 4.6 Pengembangan Informasi Awal	52
Gambar 4.7 Perencanaan Audit	53
Gambar 4.8 Eksekusi dan Pelaporan	56
Gambar 4.9 Objektivitas.....	60
Gambar 4.10 Profesionalisme.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	73
LAMPIRAN 2 Framework Matrices Kompetensi Auditor	91
LAMPIRAN 3 Framework Matrices Prosedur Audit.....	92
LAMPIRAN 4 Framework Matrices Etika Auditor	93
LAMPIRAN 5 Transkrip Wawancara 1	95
LAMPIRAN 6 Transkrip Wawancara 2	111
LAMPIRAN 7 Transkrip Wawancara 3	134
LAMPIRAN 8 Transkrip Wawancara 4	148
LAMPIRAN 9 Transkrip Wawancara 5	166

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengenalan Bab

Pada bab ini, peneliti memaparkan uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, serta sistematika penyusunan laporan penelitian.

1.2. Latar Belakang

Beragam kasus yang terjadi baik di perusahaan maupun di lembaga pemerintahan tidak jarang disebabkan oleh adanya faktor kecurangan (*fraud*) yang muncul seiring dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks serta semakin terbukanya berbagai peluang usaha dan investasi sehingga meningkatkan risiko terjadinya tindakan kecurangan pada perusahaan maupun lembaga pemerintahan (Rahmayani, 2014). *Fraud* atau kecurangan merupakan tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja oleh individu maupun kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara merugikan pihak lain, dan seiring dengan kemajuan teknologi yang digunakan untuk menyamarkan tindakan tersebut maka pelaksanaan audit dalam pelaporan keuangan menjadi penting guna memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji serta menjamin efektivitas audit dalam mendeteksi dan mengungkap adanya indikasi kecurangan.

Tingginya kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia disebabkan oleh lemahnya fungsi pengawasan dan kontrol dalam suatu organisasi sehingga diperlukan badan pengawas berupa audit internal yang berperan membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dengan mengelola seluruh informasi yang diperoleh secara efektif agar menghasilkan kualitas audit yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan rekomendasi yang tepat kepada manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) secara berkelanjutan mengembangkan program untuk meningkatkan kemandirian dan efektivitas APIP serta berperan dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna memperkuat dan mengoptimalkan fungsi APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Oktavian et al., 2023).

Tindak kecurangan (*fraud*) dalam sektor pemerintahan merupakan tindakan yang merugikan masyarakat, karena dana publik yang semestinya digunakan untuk kepentingan bersama justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintah memiliki akses luas terhadap pengelolaan dana masyarakat, dan kemudahan akses tersebut dapat menjadi celah yang dimanfaatkan untuk melakukan *fraud*. Berbagai penelitian mengenai *fraud* di sektor publik telah dilakukan sebelumnya. Salah satunya oleh Maria & Gudono (2017), yang meneliti pengaruh tekanan pada pejabat pemerintah terhadap kecenderungan melakukan kecurangan dengan menggunakan variabel *dummy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya *fraud* di instansi pemerintah. Artinya, pejabat yang mengalami tekanan, baik dari lingkungan maupun dorongan pribadi, misalnya untuk mempertahankan gaya hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan lebih berpotensi melakukan tindakan *fraud*. Dengan demikian, semakin besar tekanan yang diterima, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kecurangan.

Menurut (Bologna et al., 1993) dan (Tuanakotta, 2010), bentuk-bentuk kecurangan (*fraud*) yang umum terjadi meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan penyuapan, penerimaan yang tidak sah, serta berbagai praktik korupsi. Tingginya kasus korupsi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab pemerintah terhadap belum optimalnya upaya pemberantasan korupsi. Salah satu kasus yang menonjol adalah penetapan mantan Bupati Sleman, Sri Purnomo, sebagai tersangka penyimpangan Dana Hibah Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2020 oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Sri Purnomo, yang menjabat dua periode, dinilai telah merugikan negara sebesar Rp10,9 miliar. Meskipun penyaluran dana hibah telah diatur dalam PMK 46/PMK.07/2020, hasil penyidikan menunjukkan bahwa Sri Purnomo menyalurkan dana kepada kelompok-kelompok

masyarakat yang tidak bergerak di sektor pariwisata, sehingga melanggar Perjanjian Hibah serta Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020. Modus yang digunakan adalah penerbitan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 yang memperluas penerima hibah ke pihak di luar Desa Wisata dan Desa Rintisan Wisata. Berdasarkan audit Perwakilan BPKP DIY, kebijakan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp10,9 miliar (Wicaksono, 2025).

Salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah dalam memberantas korupsi ialah menerapkan akuntansi forensik, atau yang dikenal sebagai audit investigatif, pada lembaga-lembaga pengelola keuangan negara. Tindakan *fraud* yang terjadi dalam suatu entitas atau perusahaan pada umumnya dapat ditangani melalui pelaksanaan audit investigatif sebagai upaya untuk mengungkap dan menindaklanjuti indikasi kecurangan yang terjadi. Audit investigatif atau akuntansi forensik adalah penerapan pengetahuan akuntansi dan auditing yang dipadukan dengan pendekatan investigatif guna mengidentifikasi serta mengungkap terjadinya kecurangan (Ulimsyah et al., 2021). Audit investigatif dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap aparat penegak hukum dalam proses perhitungan kerugian keuangan negara. Pelaksanaan audit investigatif melibatkan proses pengumpulan dan analisis bukti dari suatu laporan, mengklasifikasikan temuan yang diperoleh, serta menghadirkan hasil pemeriksaan yang dapat membantu dalam mengungkap adanya indikasi *fraud*. Auditor dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal apabila memiliki kompetensi yang memadai, terutama dalam mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan yang mungkin terjadi selama proses audit. Dengan kompetensi yang baik, auditor juga mampu meningkatkan kepekaannya dalam menelaah laporan keuangan untuk menemukan berbagai modus yang digunakan dalam melakukan kecurangan, sehingga auditor dapat menentukan apakah dalam pelaksanaan tugas auditnya terdapat tindakan *fraud* atau tidak.

Hasnur et al. (2023) menyatakan temuan penelitian mengindikasikan bahwa pengalaman auditor berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kemampuan pendeteksian *fraud*. Hal serupa juga diungkapkan oleh (Haldin et al., 2022) yang menunjukkan bahwa pengalaman auditor investigasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Sementara itu, menurut Agoes, (2017), prosedur audit dilakukan untuk

memperoleh bukti audit yang memadai guna mendukung pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan, sehingga diperlukan berbagai teknik audit seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, serta wawancara (*inquiry*) dan metode lainnya untuk mendapatkan bukti yang relevan dan andal.

Etika profesional auditor dinilai penting dalam pelaksanaan audit, karena dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika auditor dapat menghasilkan pemeriksaan yang objektif, independen, dan dapat dipercaya sehingga mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan (Faradiba et al., 2025). Menurut Tuanakotta (2016), terdapat tiga sikap dan pola pikir yang harus senantiasa melekat pada diri seorang auditor, yaitu independensi, objektivitas, dan skeptisisme, yang juga menjadi bagian penting dalam tugas akuntan forensik. Auditor forensik harus bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak mana pun yang memiliki kepentingan terhadap hasil pemeriksaannya, sehingga auditor wajib mempertahankan sikap objektif dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran kompetensi auditor, prosedur audit investigatif, dan etika auditor terhadap efektivitas pengungkapan *fraud*. Analisis ini menjadi krusial karena pengungkapan kecurangan yang optimal hanya dapat tercapai apabila didukung oleh auditor yang berkompeten, penerapan prosedur audit yang tepat, serta penegakan etika profesi yang mampu menjamin kualitas audit yang andal dan objektif. Melalui sinergi antara ketiga aspek tersebut, audit investigatif diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana dalam mendeteksi, mengungkap, dan mencegah terjadinya *fraud*. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam upaya meningkatkan kualitas audit investigatif serta memperkuat sistem pengawasan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sehingga studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan diberi judul “**Analisis Determinan Efektivitas Pengungkapan *Fraud* di Pemerintahan: Peran Kompetensi Auditor, Prosedur Audit Investigatif, dan Etika Auditor**”.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi auditor berperan terhadap efektivitas pengungkapan *fraud* di pemerintah?

Terkait dengan rumusan masalah ini, peneliti mengidentifikasi bagaimana tingkat kompetensi auditor yang mencakup pengetahuan teknis, pengalaman, kemampuan analitis, serta pemahaman terhadap indikator *fraud* mempengaruhi keberhasilan auditor dalam mengungkap kecurangan di lingkungan pemerintahan. Peneliti menjabarkan unsur-unsur kompetensi yang wajib dimiliki auditor pemerintah serta menganalisis sejauh mana kompetensi tersebut mendukung proses pendeteksian, pemeriksaan, dan pembuktian awal atas adanya *fraud*. Selain itu, peneliti juga menelaah kondisi di lapangan terkait pemanfaatan auditor yang kompeten dalam penugasan pemeriksaan berindikasi kecurangan.

2. Apakah prosedur audit berperan terhadap efektivitas pengungkapan *fraud* di pemerintah?

Dalam rumusan masalah ini menguraikan tahapan-tahapan prosedur audit yang digunakan dalam pemeriksaan atas indikasi *fraud* di pemerintah, mulai dari perencanaan audit, pengumpulan bukti, pelaksanaan audit, wawancara, observasi, hingga dokumentasi hasil temuan (pelaporan). Peneliti menilai apakah prosedur audit yang diterapkan sudah memadai, sistematis, serta sesuai dengan standar dalam mendukung pengungkapan *fraud*. Penelitian juga mengevaluasi bagaimana konsistensi penerapan prosedur audit berkontribusi terhadap ketepatan, akurasi, dan kelengkapan bukti pada kasus-kasus *fraud* yang ditangani auditor internal pemerintah.

3. Apakah etika auditor berperan terhadap efektivitas pengungkapan *fraud* di pemerintah?

Setelah membahas rumusan masalah mengenai prosedur audit, peneliti kemudian menelaah bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika profesi auditor meliputi integritas, objektivitas, independensi, kerahasiaan, dan profesionalisme dapat

mempengaruhi efektivitas pengungkapan *fraud* di lingkungan pemerintahan. Peneliti mengidentifikasi sejauh mana perilaku etis auditor mampu meminimalkan bias, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga kualitas proses audit ketika menangani indikasi kecurangan. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi peran etika auditor dalam memperkuat kredibilitas temuan audit dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap hasil pengungkapan *fraud*.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada kegiatan magang ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis dan memahami sejauh mana kompetensi auditor berperan terhadap efektivitas pengungkapan *fraud* serta pentingnya kemampuan dan keahlian auditor dalam melaksanakan audit investigatif pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP DIY.
2. Menganalisis dan memahami pelaksanaan prosedur audit investigatif serta menilai sejauh mana penerapan prosedur tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pengungkapan *fraud* pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP DIY.
3. Menganalisis dan memahami etika auditor serta menilai sejauh mana etika auditor tersebut berperan terhadap efektivitas pengungkapan *fraud* pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP DIY.

1.5. Manfaat Penelitian

Magang ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Kegiatan ini bertujuan untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari ke dalam situasi kerja nyata, mengembangkan keterampilan praktis, memperluas pemahaman mengenai hubungan teori dan praktik, membangun relasi profesional, melatih kedisiplinan serta kemampuan komunikasi dan manajemen waktu, sekaligus

memberikan pengalaman langsung terkait profesi auditor dan proses kerja di lingkungan sesungguhnya sebagai bekal memasuki dunia kerja.

2. Bagi Perwakilan BPKP DIY

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPKP DIY untuk meningkatkan kompetensi auditor investigatif, memberikan bukti empiris mengenai peran kompetensi dan pengalaman auditor terhadap efektivitas prosedur audit dalam mengungkap *fraud*, menjadi masukan dalam mengidentifikasi komponen prosedur audit yang paling efektif, sekaligus menjadi rekomendasi dalam memperkuat strategi pengungkapan *fraud* melalui peningkatan kompetensi, standar prosedur, dan etika profesi, serta menyediakan informasi komprehensif mengenai pengaruh variabel tersebut terhadap efektivitas pengungkapan *fraud* guna mendukung perbaikan sistem pengawasan keuangan negara.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengembangan pengetahuan dan penelitian selanjutnya, khususnya terkait analisis peran kompetensi auditor, prosedur audit investigatif, dan etika auditor terhadap efektivitas pengungkapan *fraud* pada bidang investigasi.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini akan disusun dengan menggunakan format sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, serta sistematika penyusunan laporan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti menyajikan teori-teori yang terkait dengan topik penelitian, serta menguraikan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan tema penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan rancangan dan langkah-langkah penelitian, jenis dan objek penelitian, instrumen yang digunakan, jenis serta sumber data, prosedur pengumpulan data, uji keabsahan data, serta metode analisis data yang diterapkan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti menyajikan hasil analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian, meliputi informasi yang diberikan serta temuan wawancara mengenai gambaran kompetensi auditor, prosedur audit investigatif, serta etika auditor yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP DIY.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, sekaligus menguraikan keterbatasan penelitian serta memberikan rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Pengenalan Bab

Pada bab ini, peneliti menyajikan teori-teori yang terkait dengan topik penelitian, serta menguraikan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan tema penelitian ini. Pada bab ini disajikan juga beragam kajian literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Tinjauan pustaka diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, situs resmi, serta hasil penelitian terdahulu. Pembahasan difokuskan pada konsep-konsep umum, antara lain teori atribusi, *fraud*, kompetensi auditor, prosedur audit, etika auditor, audit investigasi, dan pengungkapan fraud. Namun, pada bab ini juga memaparkan sejarah berdirinya BPKP, tugas pokok dan fungsi bidang investigasi, visi dan misi deputi bidang investigasi, serta struktur organisasi deputi bidang investigasi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikemukakan Fritz Heider pada tahun 1958 digunakan sebagai dasar analisis dan pengembangan hipotesis penelitian yang menjelaskan bahwa sikap individu dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal (Riwukore et al., 2022). Menurut Angreani (2023), perilaku seseorang pada awalnya dipahami dengan menilai faktor pribadi maupun faktor situasional yang melatarbelakanginya. Teori ini menjelaskan bahwa individu akan menafsirkan penyebab suatu tindakan, baik pada diri sendiri maupun orang lain, berdasarkan sumber internal ataupun eksternal yang membentuk karakter dan memengaruhi perilaku tersebut (Sari & Susanto, 2018). Perilaku yang bersumber dari faktor internal dipandang sebagai tindakan yang berada dalam kendali pribadi seseorang, sedangkan perilaku yang muncul akibat faktor eksternal merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh kondisi luar, sehingga individu terdorong untuk melakukannya karena situasi.

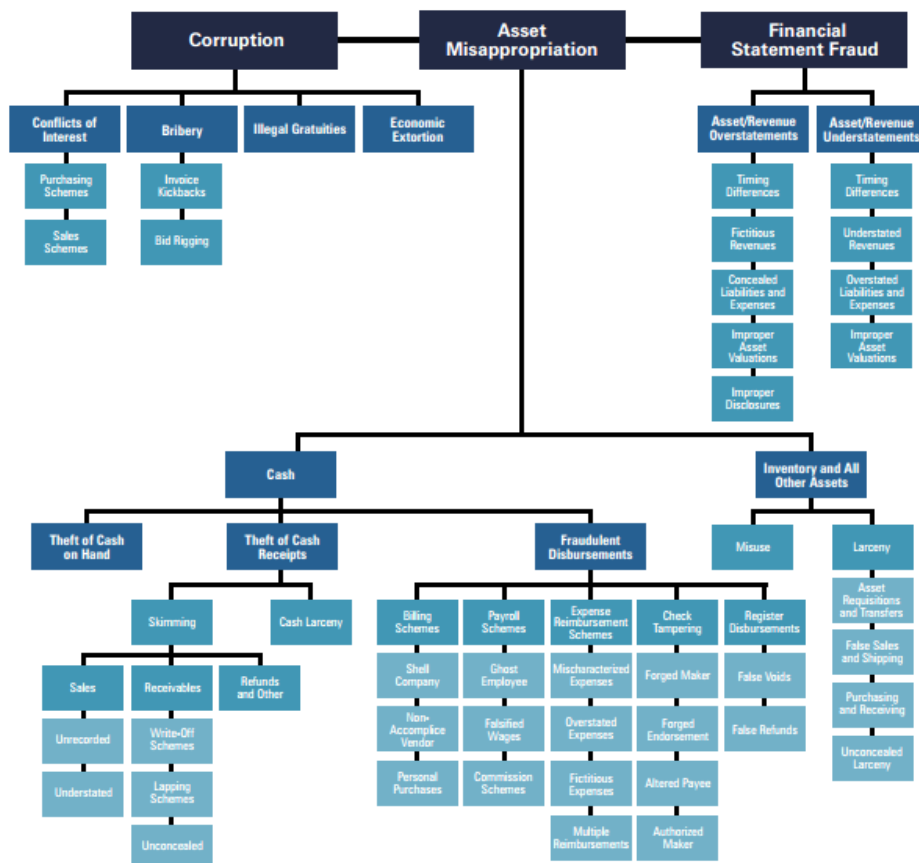
Luthans (2015) menyatakan bahwa perilaku individu terbentuk oleh dua sumber utama, yaitu faktor internal seperti sikap, sifat, dan karakter, serta faktor eksternal seperti tekanan maupun kondisi tertentu yang dapat memengaruhi tindakan seseorang. Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk menelaah faktor-faktor yang memengaruhi kinerja auditor dalam keberhasilan pelaksanaan prosedur audit investigatif. Teori ini menekankan bahwa kompetensi auditor, penerapan prosedur audit, serta kepatuhan terhadap etika auditor sebagai faktor internal berperan dalam membentuk tindakan auditor ketika melakukan pengungkapan *fraud*. Oleh karena itu, ketiga aspek tersebut dipandang sebagai unsur penting yang menentukan efektivitas auditor dalam proses investigasi dan pengungkapan kecurangan.

2.3. *Fraud* (Kecurangan)

Menurut (Albrecht et al., 2019), *fraud* merupakan istilah luas yang mencakup berbagai metode yang memanfaatkan kecerdikan manusia untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain melalui penyampaian informasi atau gambaran yang menyesatkan. Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi baik pada sektor publik maupun sektor swasta. *Fraud* pada sektor publik berdampak pada kerugian keuangan negara, sedangkan pada sektor swasta mengakibatkan pelanggaran komitmen atau kewajiban oleh pelaku terhadap pihak yang dirugikan. Sejumlah ahli telah memberikan definisi mengenai *fraud*. Salah satunya dikemukakan oleh Albrecht et al. (2019) yang menyatakan bahwa *fraud* merupakan tindakan penipuan yang mencakup beberapa unsur, yaitu: (a) adanya suatu pernyataan, (b) terkait hal yang bersifat material, (c) yang tidak sesuai dengan kebenaran, (d) dilakukan secara sengaja maupun dengan kelalaian serius agar kemudian, (e) dipercaya, (f) dan direspons oleh pihak korban, sehingga (g) korban mengalami akibat berupa kerugian.

Deteksi *fraud* oleh auditor internal merupakan proses mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan yang dapat menjadi dasar apakah perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (Pusdiklatwas, 2008). Sementara itu, Kumaat (2011) menjelaskan bahwa deteksi *fraud* adalah usaha untuk memperoleh indikasi awal yang memadai terkait adanya kecurangan, sekaligus membatasi ruang gerak para pelaku *fraud*. Suatu tindakan dapat dikategorikan

sebagai kecurangan apabila hasil identifikasi menunjukkan adanya keuntungan bagi pihak tertentu atau individu, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan cara yang tidak benar. Misalnya, ketika terdapat salah saji yang disengaja dalam laporan keuangan, maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai kesalahan penyajian yang muncul karena penyalahgunaan aset dan merupakan bentuk kecurangan dalam pelaporan keuangan. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) membagi kecurangan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) Korupsi, yakni tindakan pelaku yang secara tidak sah memanfaatkan posisi atau pengaruhnya dalam suatu transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun bagi pihak lain; (2) Penyalahgunaan Aset, mencakup pencurian atau pemanfaatan aset organisasi secara tidak semestinya; dan (3) Kecurangan Laporan Keuangan, yaitu tindakan memalsukan atau memanipulasi informasi dalam laporan keuangan organisasi (Albrecht et al., 2019). Dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Klasifikasi *Fraud*

2.4. Kompetensi Auditor

Seseorang yang memiliki kompetensi maka dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan menghasilkan kinerja yang berkualitas. Berdasarkan BPKP (2010), kompetensi merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bekal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya, sesuai dengan kemampuan dan karakteristik pribadi yang melekat. Menurut IAPI (2018), kompetensi auditor adalah kemampuan profesional yang dimiliki seseorang dan diwujudkan melalui penerapan pengetahuan dalam menyelesaikan suatu perikatan, baik secara mandiri maupun bersama tim, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesional akuntan publik, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Poerwadarminta, (2006), kemampuan auditor dipandang sebagai salah satu syarat penting, di mana kemampuan dimaknai sebagai kewenangan atau otoritas untuk menetapkan suatu ketentuan atau aturan. Menurut Purba & Nuryatno (2019), kompetensi penguji merupakan keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang telah memenuhi kualifikasi tertentu sehingga mampu melaksanakan proses pengujian secara optimal. Dalam konteks audit, auditor dituntut memiliki kualitas pribadi yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keterampilan khusus di bidangnya. Standar umum pertama dalam SA Pasal 210 SPAP (2001) menegaskan bahwa pelaksanaan audit harus didukung oleh pelatihan dan keahlian teknis yang cukup agar auditor dapat menjalankan tugasnya secara profesional melalui proses pendidikan formal.

Dalam pelaksanaan audit, auditor dituntut memiliki kualitas pribadi yang baik, pengetahuan yang cukup, serta keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi sendiri berkaitan dengan kemampuan profesional auditor yang diperoleh melalui pendidikan formal, ujian profesi, serta partisipasi dalam berbagai pelatihan, seminar, dan lain sebagainya. Kompetensi mencerminkan kecakapan yang memadai untuk menjalankan tugas audit secara objektif, dan tidak hanya ditentukan oleh pengalaman, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lain dalam pengambilan keputusan, terutama pengetahuan yang dimiliki auditor.

2.5. Prosedur Audit

Dalam pelaksanaan prosedur audit investigatif, auditor dituntut menggunakan pendekatan yang lebih mendalam, kritis, dan proaktif dalam menelusuri serta memperoleh berbagai bukti. Hal ini disebabkan karena audit investigatif memiliki karakter berbeda dengan audit keuangan pada umumnya, yang lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap standar akuntansi dan pengendalian internal (Siahaan & Suryaningrum, 2024).

Menurut BPK (2023), tahapan audit investigatif yang tercantum dalam PPBI mencakup beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pra-Perencanaan

Tahap ini merupakan langkah awal proses audit investigatif untuk menentukan apakah suatu penugasan akan dilaksanakan oleh bidang investigasi. Kegiatan ini diawali dengan penelaahan informasi atau ekspose yang berasal dari pengaduan permintaan aparat penegak hukum, tindak lanjut hasil audit operasional, maupun permintaan instansi terkait, serta melibatkan pihak-pihak berkepentingan di dalamnya.

2. Perencanaan

Pada tahap ini auditor menyusun rencana penugasan dengan menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan kebutuhan sumber daya. Selain itu dilakukan pula pertimbangan untuk melibatkan tenaga ahli eksternal yang memiliki kompetensi pada bidang tertentu.

3. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti

Auditor wajib memperoleh bukti yang memadai, relevan, dan kompeten melalui prosedur, teknik, dan metode yang tepat. Proses pengumpulan bukti diarahkan pada pengujian hipotesis yang telah dibentuk sejak awal, termasuk melakukan konfirmasi kepada pihak yang berkaitan guna memastikan kecukupan dan keandalan bukti tersebut.

4. Pengelolaan Kertas Kerja

Tahap ini mencakup penyusunan seluruh dokumen pelaksanaan audit investigatif, mulai dari surat penugasan, dokumen perencanaan, bukti-bukti pendukung, hasil

analisis, laporan pemeriksaan, notulen ekspose, serta dokumen pekerjaan yang dilakukan pihak lain.

5. Pelaporan

Pada tahap pelaporan, auditor menyusun laporan hasil audit investigatif yang memuat simpulan atas pemeriksaan. Laporan tersebut disampaikan kepada pihak terkait melalui Deputy Bidang Investigasi dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan laporan, standar pelaksanaan, serta kualitas dan keandalan informasi yang diperoleh.

6. Tindak Lanjut

Tahap ini merupakan proses pemantauan dan tindak lanjut atas laporan audit investigatif, dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan dilaporkan secara berkala kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi sesuai pedoman tindak lanjut yang telah ditetapkan.

2.6. Etika Auditor

Seorang akuntan dikategorikan profesional apabila dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dengan berlandaskan pada ketentuan tersebut, akuntan publik memiliki acuan yang jelas dalam setiap aktivitasnya, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dinilai tepat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hambali et al., (2021) menjelaskan bahwa kebiasaan hidup yang baik menjadikan etika dipahami sebagai seperangkat ajaran yang memuat ketentuan mengenai perilaku manusia, berupa perintah yang perlu ditaati dan larangan yang harus dihindari. Ketentuan tersebut diwujudkan dalam bentuk kaidah, aturan, atau norma yang disebarluaskan serta dipahami dan diajarkan secara lisan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, Angraeni & Kuntadi (2024) menegaskan bahwa dalam pelaksanaan audit, auditor perlu menerapkan etika profesi secara tepat agar dapat mendukung peningkatan kualitas hasil audit. Pelaksanaan audit harus senantiasa berlandaskan Standar Audit dan Kode Etik, karena keduanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses audit.

Menurut Halim (2008), kualitas audit dipengaruhi oleh kepatuhan auditor terhadap kode etik, yang tampak melalui sikap independen, objektif, berintegritas, dan sikap

profesional lainnya. Dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2020), IAI menetapkan kode etik yang mencakup prinsip etika, aturan etika, serta interpretasi atas aturan tersebut. Kode etik akuntan memuat delapan prinsip utama, yaitu: tanggung jawab profesional, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, serta standar teknis.

2.7. Audit Investigatif

Istilah yang lazim digunakan adalah audit investigasi, namun dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan istilah audit investigatif. Pemilihan istilah tersebut disesuaikan dengan terminologi yang dipakai pada objek penelitian, sehingga diperlukan penyeragaman istilah dalam studi ini, meskipun penyesuaian tersebut hanya terkait pada penyebutan kegiatannya saja. Audit investigatif merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pelaksanaan strategi untuk mengungkap tindak kecurangan melalui pendekatan investigasi. Narendra (2014) menjelaskan bahwa audit investigatif dapat berfungsi sebagai bukti awal dalam proses penyidikan kasus korupsi, yaitu melalui perpaduan antara teknik audit dan teknik penyidikan secara tepat sehingga mampu mengungkap kerugian negara serta pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Audit investigatif difokuskan untuk membuktikan apakah terdapat unsur kecurangan (*fraud*) maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya.

2.8. Pengungkapan *Fraud*

Pengungkapan kecurangan (*fraud*) merupakan suatu upaya terintegrasi yang bertujuan untuk menekan terjadinya kecurangan dengan mengendalikan faktor-faktor penyebab di dalamnya. Upaya tersebut dilakukan melalui pengurangan peluang terjadinya kecurangan, penurunan tekanan yang dihadapi pegawai, serta penghilangan rasionalisasi atau pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan (Rini, 2022). Dengan kata lain, pengungkapan *fraud* tidak hanya berorientasi pada penemuan kecurangan yang telah terjadi, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pencegahan melalui penguatan sistem pengendalian dan integritas organisasi.

Proses pengungkapan *fraud* mencakup beberapa tahapan penting, mulai dari identifikasi permasalahan dan perencanaan pemeriksaan, pengumpulan serta evaluasi bukti-bukti yang relevan, hingga penyampaian atau pengungkapan hasil temuan kepada pihak yang berwenang maupun publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Karyono, 2013). Tahapan-tahapan tersebut menuntut ketelitian, objektivitas, serta penerapan prosedur audit yang sistematis agar hasil pengungkapan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan hukum.

Dalam praktiknya, pengungkapan *fraud* dan korupsi sangat bergantung pada peran auditor yang melakukan penyelidikan terhadap indikasi kecurangan. Oleh karena itu, diperlukan auditor yang memiliki kemampuan dan kompetensi memadai, baik dari sisi pengetahuan teknis, pengalaman, maupun pemahaman terhadap pola dan modus kecurangan, agar proses pengungkapan *fraud* dapat berjalan secara efektif (Mahsith & Mahmudi, 2021). Auditor yang kompeten diharapkan mampu mengidentifikasi indikasi awal kecurangan, mengumpulkan bukti yang cukup dan relevan, serta menyajikan hasil pengungkapan secara objektif sehingga dapat mendukung upaya penegakan akuntabilitas dan transparansi, khususnya di lingkungan pemerintahan.

2.9. Sejarah Berdirinya BPKP

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berawal dari keberadaan Djawatan Akuntan Negara (DAN) yang dibentuk berdasarkan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936, yang bertugas meneliti pembukuan perusahaan negara dan jawatan tertentu. DAN merupakan aparat pengawasan pertama di Indonesia dan berada di bawah Thesauri Jenderal Kementerian Keuangan sebelum akhirnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961, kedudukannya ditingkatkan langsung di bawah Menteri Keuangan. Perubahan struktur pengawasan berlanjut dengan berdirinya Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN/DJPKN) melalui Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966, yang mengambil alih tugas pengawasan anggaran serta badan usaha yang sebelumnya diemban DAN dan Thesauri Jenderal. DJPKN kemudian menjadi lembaga utama dalam pengawasan pelaksanaan anggaran negara, daerah, dan

BUMN/BUMD hingga diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 dan perkembangan berikutnya.

Perubahan besar terjadi ketika DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, menempatkannya sebagai LPND yang berada langsung di bawah Presiden untuk menjamin independensi dan objektivitas pengawasan. Sejak itu BPKP memperluas perannya, terutama melalui pendekatan preventif seperti pembinaan, asistensi, pendampingan, serta audit investigatif untuk mendukung aparat penegak hukum. Reformasi kelembagaan terus berlangsung melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan MoU dengan berbagai pemerintah daerah maupun lembaga negara untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Revitalisasi fungsi kembali dilakukan pada 2006 dengan penetapan visi baru sebagai auditor intern pemerintah yang proaktif dan terpercaya. Pada tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 semakin menegaskan peran BPKP sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menyelenggarakan pengawasan keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional.

2.9.1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Investigasi

Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan, korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

Deputi Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi
2. Penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi
3. Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme

4. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sectoral
5. Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim, dan audit investigative terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah, serta upaya pencegahan korupsi
6. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya
7. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan keinvestigasian
8. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang-undangan

2.9.2. Visi dan Misi Deputy Bidang Investigasi

Deputy bidang investigasi BPKP memiliki visi Pusat keunggulan solusi kecurangan. Sementara misi dari deputy bidang investigasi adalah sebagai berikut:

1. Mendukung peran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemberantasan korupsi
2. Memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat kelancaran pembangunan
3. Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern melalui upaya pencegahan korupsi dengan melaksanakan *Fraud Control Plan* (FCP).

2.9.3. Struktur Organisasi Deputy Bidang Investigasi

Struktur organisasi disusun untuk memperjelas alur koordinasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas investigasi. Adapun susunan organisasi pada Deputy Bidang Investigasi ditampilkan pada Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Deputy Bidang Invenstigasi

Struktur organisasi deputy bidang investigasi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Direktorat Investigasi I

- Koordinator Pengawasan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Badan Lainnya I
 - Miswan Nasution
- Koordinator Pengawasan Hambatan Kelancaran Pembangunan I
 - Helmy Yulian Triwijaya
- Koordinator Pengawasan Pencegahan Korupsi I
 - Achmad Ircham Noor

2. Direktorat Investigasi II

- Koordinator Pengawasan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Badan Lainnya II
 - Fery Agustianto
- Koordinator Pengawasan Hambatan Kelancaran Pembangunan II
 - Iwan Setiyawan
- Koordinator Pengawasan Pencegahan Korupsi II
 - I Ketut Arsa

3. Direktorat Investigasi III

- Koordinator Pengawasan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Badan Lainnya III
 - Ibrizal
- Koordinator Pengawasan Hambatan Kelancaran Pembangunan III
 - Didi Rohyadi
- Koordinator Pengawasan Pencegahan Korupsi III
 - Mujiyanto

4. Direktorat Investigasi IV

- Koordinator Pengawasan Perencanaan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan Bidang Investigasi
 - Diani Fitri
- Koordinator Pengawasan Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Pengawasan Bidang Investigasi
 - M. Arief Fakhruddin

5. Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data

- Koordinator Pengawasan Forensik Digital dan Pengembangan Kapabilitas Pengawasan Bidang Investigasi
 - Abdi Prasetya Nusa
- Koordinator Analitika Data
 - Ahmas Faiz

2.10. Kajian Peneliti Sebelumnya

Tabel 2.1 Kajian Peneliti Sebelumnya

No	Penulis	Hasil
1.	(Wahab, 2020)	audit investigatif telah berjalan sesuai pedoman, dan proses pengembangan kompetensi auditor sudah sangat baik. Rekomendasi penelitian meliputi perbaikan pola pelaksanaan pengembangan kompetensi, penanganan kendala melalui pemberian surat tugas diklat/PPM, pengelolaan anggaran secara mandiri, kerja sama beasiswa bidang investigasi, pelatihan pendukung investigasi, sertifikasi kompetensi spesifik, serta penerapan metode pembelajaran dua arah. Penelitian menekankan perlunya pengembangan kompetensi yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat.
2.	(Hasana, 2018)	Penelitian ini menganalisis pengaruh independensi, objektivitas, skeptisme profesional auditor forensik, serta kemampuan dan pengalaman auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan <i>fraud</i> . Hasil penelitian menunjukkan Penelitian ini menganalisis pengaruh independensi, objektivitas, skeptisme profesional auditor forensik, serta kemampuan dan pengalaman auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan <i>fraud</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa skeptisme profesional, kemampuan investigatif, dan pengalaman auditor investigatif berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas prosedur audit dalam mengungkap <i>fraud</i> .

Tabel 2.2 Kajian Peneliti Sebelumnya (Lanjutan)

No	Penulis	Hasil
		menyarankan pengembangan penelitian selanjutnya melalui perluasan sampel dan objek penelitian.
3.	(Lestari, 2024)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor dan sikap <i>professional skepticism</i> terbukti berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mengungkap <i>fraud</i> , sementara tekanan anggaran waktu tidak menunjukkan pengaruh apapun. Penelitian juga menemukan bahwa kecerdasan emosional tidak mampu memperkuat hubungan kompetensi, <i>professional skepticism</i> , maupun tekanan anggaran waktu terhadap pengungkapan <i>fraud</i> . Keterbatasan penelitian terletak pada jumlah responden yang relatif sedikit dan variabel yang belum sepenuhnya menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan <i>fraud</i> . Penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah sampel, memasukkan variabel baru seperti <i>continuous audit</i> atau kecerdasan spiritual, serta mempertimbangkan variabel moderasi lain seperti pengalaman auditor.
4.	(Rahmayani, 2014)	Penelitian ini menemukan bahwa kemampuan auditor, skeptisme profesional, teknik audit, dan peran <i>whistleblower</i> berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan. Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,839$) menunjukkan bahwa 83,90% efektivitas pengungkapan kecurangan dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut. Peneliti merekomendasikan perluasan variabel dan wilayah penelitian pada studi berikutnya,

Tabel 2.3 Kajian Peneliti Sebelumnya (Lanjutan)

No	Penulis	Hasil
		serta mendorong auditor investigatif untuk lebih terbuka terhadap penelitian terkait pengungkapan kecurangan guna meningkatkan efektivitas deteksi dan penanganan <i>fraud</i> .
5.	(Pradnyawati, 2019)	Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan auditor investigatif tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Sebaliknya, pengalaman auditor investigatif berpengaruh signifikan dan meningkatkan efektivitas audit investigatif. Peneliti merekomendasikan perlunya peningkatan pelatihan investigasi serta penyelenggaraan <i>workshop</i> atau seminar untuk menambah pengalaman dan wawasan auditor, terutama terkait perkembangan modus kecurangan.
6.	(Kanegian, 2023)	Penelitian ini menilai pengaruh etika, skeptisme, independensi, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit pada 49 auditor eksternal di KAP wilayah Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sebaliknya, skeptisme dan spesialisasi auditor terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Peneliti menyarankan penambahan variabel seperti kemampuan, pengalaman, dan objektivitas auditor dalam penelitian selanjutnya untuk memperkaya analisis kualitas audit.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengenalan Bab

Pada bab ini, peneliti menjelaskan rancangan dan langkah-langkah penelitian, jenis dan objek penelitian, fokus penelitian, instrumen yang digunakan, jenis serta sumber data, sistematika penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta metode analisis data yang diterapkan.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai jenis metode yang diterapkan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2013). Moleong (2005) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh dan disajikan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pelaksanaan penelitian kualitatif bertujuan membangun pengetahuan melalui pemahaman mendalam dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali, menjelaskan, dan memahami secara mendalam bagaimana kompetensi auditor, prosedur audit investigatif, serta etika auditor berpengaruh terhadap efektivitas pengungkapan *fraud* pada bidang investigasi.

Pendekatan kualitatif di sini dipadukan dengan metode pendekatan atribusi sebagai dasar dalam menyusun daftar pertanyaan wawancara. Pendekatan atribusi tersebut digunakan untuk menelaah bagaimana kompetensi auditor, prosedur audit, dan etika auditor berkontribusi terhadap efektivitas pengungkapan *fraud* pada bidang investigasi. Meskipun metode penelitian yang digunakan tergolong sederhana, pelaksanaannya tetap dilakukan melalui analisis kritis terhadap berbagai aspek yang menjadi fokus kajian, dengan mengandalkan data yang diperoleh baik dari observasi langsung maupun tidak

langsung. Dengan demikian, diharapkan jenis penelitian ini mampu memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi yang sesungguhnya terjadi.

3.3. Obyek Penelitian

Objek penelitian ini berada di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang berlokasi di Jalan Parangtritis KM 5,5, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama empat bulan, yakni mulai 1 Oktober 2025 hingga 30 Januari 2026. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada relevansinya dengan topik dan rumusan masalah yang diangkat, khususnya mengenai bagaimana kompetensi auditor, prosedur audit investigatif, dan etika auditor berperan terhadap efektivitas pengungkapan *fraud*.

3.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini disusun sebagai batasan agar pelaksanaan penelitian tetap selaras dengan rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, fokus penelitian berfungsi sebagai penegas arah dan batasan kajian, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai secara lebih terarah. Adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tempat penelitian : Penelitian dilaksanakan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang beralamat di Jalan Parangtritis KM 5,5 Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
2. Waktu Penelitian : 1 Oktober 2025 – 30 Januari 2026
3. Aspek penelitian : Aspek pada penelitian ini adalah bagaimana kompetensi auditor, prosedur audit investigatif, dan etika auditor berperan terhadap efektivitas pengungkapan *fraud*.
4. Penelitian ini mencakup penelaahan terhadap aspek-aspek kompetensi auditor seperti pengetahuan teknis, sertifikasi, pengalaman, kemampuan analitis, serta

pemahaman indikator *fraud* dan bagaimana unsur tersebut berperan dalam proses pendeteksian serta pengungkapan *fraud* pada instansi pemerintah.

5. Penelitian memfokuskan pada pengidentifikasian tahapan prosedur audit, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian analitis, wawancara, observasi, hingga dokumentasi temuan, serta menilai sejauh mana prosedur tersebut diterapkan secara sistematis dan sesuai standar untuk mendukung keberhasilan pengungkapan *fraud*.
6. Peran prinsip etika profesi auditor termasuk integritas, objektivitas, independensi, kerahasiaan, dan profesionalisme dalam menjaga kualitas proses audit, mengurangi bias, mencegah konflik kepentingan, serta meningkatkan kredibilitas temuan dalam kasus-kasus *fraud*.

3.5. Sumber dan Data Penelitian

Dalam penelitian ini, karena menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan harus bersifat mendalam, jelas, dan spesifik. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, ataupun kombinasi dari ketiganya. Data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mencakup baik sumber data primer maupun sumber data sekunder sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang mampu memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau keterlibatan langsung dalam topik penelitian, yaitu Auditor Ahli Madya, Auditor Ahli Muda, Auditor Ahli Pertama, dan Auditor Mahir.

Tabel 3.1 Partisipan Wawancara

No	Nama Partisipan	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bekerja
1.	Informan 1	L	Auditor Ahli Madya	39 Tahun
2.	Informan 2	L	Auditor Ahli Madya	35 Tahun
3.	Informan 3	L	Auditor Ahli Muda	11 Tahun
4.	Informan 4	P	Auditor Ahli Pertama	7 Tahun
5.	Informan 5	P	Auditor Mahir	15 Tahun

Keterangan :

P : Perempuan

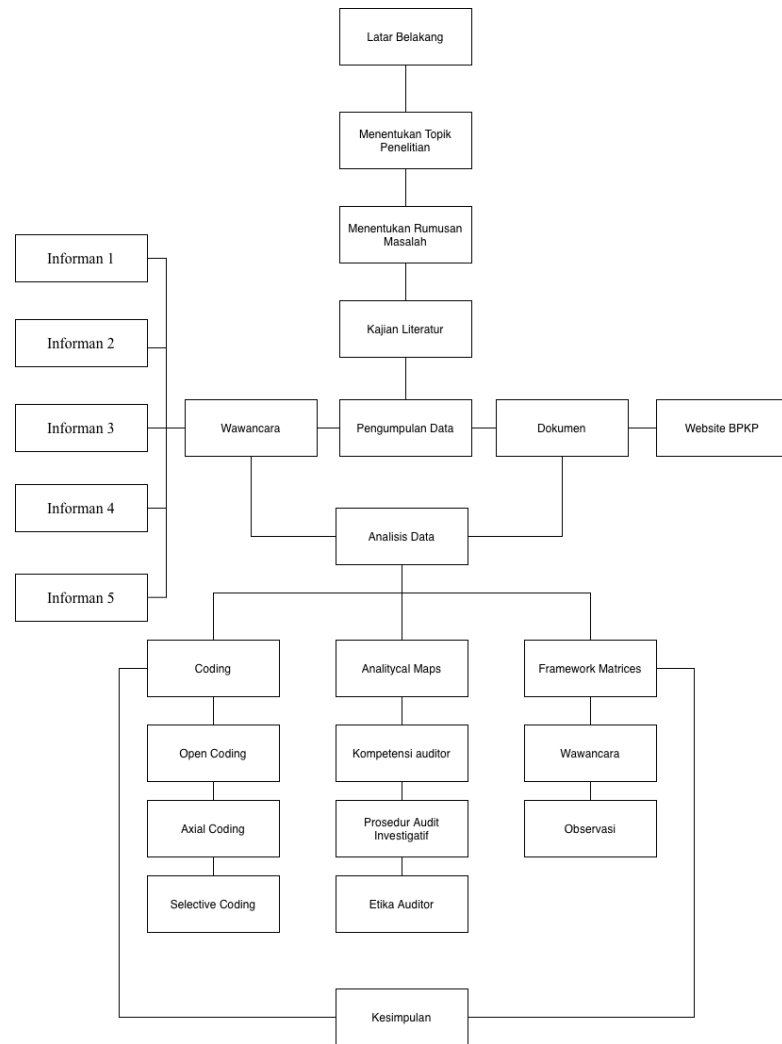
L : Laki-laki

2. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, melainkan melalui perantara seperti pihak lain atau dokumen (Sugiyono, 2013). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai kajian literatur yang relevan. Literatur tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperkuat analisis dan membantu peneliti dalam memahami konsep, teori, serta temuan-temuan sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

3.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian pada bagian ini menjelaskan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh peneliti hingga akhirnya diperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Sistematika Penelitian

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menerapkan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek di lingkungan penelitian, baik pada kegiatan yang sedang berlangsung maupun yang masih dalam proses. Metode ini melibatkan perhatian sistematis terhadap berbagai aktivitas dengan memanfaatkan indera untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai objek yang dikaji. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti di Perwakilan BPKP DIY dengan cara mengamati serta mencatat berbagai informasi yang diperoleh di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai topik penelitian (Miles & Michael, 1994). Metode ini memungkinkan peneliti memahami perspektif, pengalaman, perasaan, dan pendapat responden secara lebih detail. Terdapat beberapa jenis wawancara yang dapat dipilih sesuai kebutuhan penelitian (Rasyid, 2022), yaitu wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan tetap, wawancara semi-terstruktur yang menggunakan pedoman fleksibel sehingga peneliti dapat memperdalam pertanyaan sesuai respons, serta wawancara tidak terstruktur yang menyerupai percakapan bebas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, karena memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan sesuai situasi tanpa keluar dari fokus penelitian, sehingga seluruh informasi yang dibutuhkan tetap dapat diperoleh secara optimal.

3.8. Teknik Analisis Data

Menurut Creswell & Poth (2018), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari menyiapkan serta mengatur data, baik berupa teks seperti transkrip maupun visual seperti foto kemudian mereduksi data tersebut dengan mengidentifikasi tema melalui proses pengkodean dan peringkasan, hingga pada tahap akhir menyajikan hasil analisis dalam bentuk bagan, tabel, atau uraian pembahasan. Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, di mana peneliti tidak mengandalkan angka maupun ukuran statistik untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Sebaliknya, proses analisis dilakukan melalui penjabaran naratif yang menggambarkan temuan secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data berdasarkan konteks, memahami makna di balik informasi yang diberikan oleh responden, serta menguraikan hubungan antar variabel penelitian yakni kompetensi auditor, prosedur audit investigatif, dan etika auditor dalam kaitannya dengan efektivitas pengungkapan *fraud* pada bidang investigasi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti melakukan pengolahan dan penelaahan informasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pengolahan data berupa artikel, jurnal, dan transkrip wawancara dibantu dengan perangkat lunak NVivo 12. Penggunaan NVivo memungkinkan peneliti menelusuri pola dan keterkaitan antar data dari berbagai sumber, serta membantu meminimalkan subjektivitas dan potensi bias dalam interpretasi hasil wawancara. Meskipun perangkat lunak ini mendukung peningkatan keterlacakan dan transparansi proses penelitian (Richards, 1999), tanggung jawab penuh terhadap analisis, interpretasi, dan penarikan kesimpulan tetap berada pada peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif.

Dalam NVivo terdapat sejumlah fitur atau alat (*tools*) yang digunakan untuk membantu proses pengolahan dan analisis data, antara lain sebagai berikut:

3.8.1. Coding

Coding merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif, di mana berbagai informasi yang berhubungan dengan tema atau kasus tertentu dikelompokkan ke dalam *node* untuk dianalisis lebih mendalam (Hartono et al., 2025). Melalui proses ini, peneliti

dapat memperoleh ide-ide baru serta mengenali pola dan kemungkinan teori dari data yang tersedia. Beragam jenis sumber dapat melalui proses *coding*, seperti dokumen, gambar, audio dan video, transkrip wawancara, serta bentuk data lainnya. Tujuan utama dari *coding* adalah membangun kategori inti berdasarkan kumpulan data yang telah diperoleh peneliti. Proses penandaan ini dilakukan dengan memberi tanda pada kata atau frasa yang paling sering muncul secara representatif, yang dapat merangkum inti, makna pokok, atau karakteristik tertentu dari data bahasa maupun visual (Bandur, 2019). Selanjutnya, data yang telah diberi kode tersebut diinterpretasikan dan disesuaikan dengan aspek-aspek yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, hasil *coding* pada dasarnya diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal penelitian.

Menurut Creswell, (2013), proses *coding* dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahapan, yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*.

1. *Open Coding*

Pada tahap awal ini, peneliti mengidentifikasi serta memecah data ke dalam kategori-kategori berdasarkan fenomena yang diteliti. Proses ini dilakukan dengan menyeleksi segmen informasi dan menyusunnya menjadi *nodes* yang berasal dari transkrip wawancara, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

2. *Axial Coding*

Tahap pengkodean aksial dilakukan dengan memilih salah satu kategori hasil open coding sebagai kategori inti. Selanjutnya, peneliti kembali menelusuri data untuk mengembangkan kategori pendukung yang berkaitan dengan kategori utama tersebut. Pada fase ini, peneliti memberikan kode pada pernyataan informan yang sesuai dengan *nodes* yang telah disusun sebelumnya.

3. *Selective Coding*

Selective coding merupakan tahap akhir dalam proses pengkodean, di mana peneliti menghubungkan fenomena pusat dengan kategori-kategori lain secara sistematis. Pada tahap ini, hubungan antar kategori divalidasi, sekaligus dilakukan penyempurnaan pada kategori yang masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut.

Dalam NVivo, proses pengkodean dikelola melalui elemen yang disebut *node*. Dalam konteks sistem informasi, *node* dipahami sebagai titik konektivitas dalam suatu jaringan yang bercabang, dan konsep tersebut juga diterapkan dalam struktur *coding* NVivo. *Node* berfungsi sebagai titik awal yang kemudian dapat berkembang menjadi jaringan konsep yang lebih luas, termasuk subkonsep atau dimensi tertentu (Bazeley & Jackson, 2015).

3.8.2. Analytical Maps

Maps merupakan sebuah alat visual yang memegang peranan penting dalam penelitian kualitatif, terutama untuk menggali berbagai ide serta menampilkan keterhubungan antar data (QSR, 2018). Hasil dari proses *coding* kemudian divisualisasikan dalam bentuk *analytical maps* yang merepresentasikan rumusan masalah yang telah dirancang. *Analytical maps* ini berfungsi untuk membantu memperjelas dan memudahkan pemahaman pada tahap analisis dan pembahasan.

Peneliti juga menyusun tiga *analytical maps* yang menggambarkan aspek-aspek utama sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Pemetaan mengenai kompetensi auditor yang relevan dalam proses pengungkapan *fraud*,
2. Pemetaan prosedur audit investigatif yang diterapkan serta keterkaitannya dengan efektivitas proses pemeriksaan,
3. Pemetaan terkait etika auditor yang berperan dalam mendukung integritas dan kualitas pengungkapan *fraud*.

3.8.3. Framework Matrices

Framework matrices merupakan suatu kerangka analisis yang digunakan untuk merangkum dan menyusun informasi dari berbagai sumber data secara sistematis (QSR, 2024). Dalam penelitian ini, *framework matrices* dimanfaatkan untuk mengorganisasi hasil wawancara yang telah melalui proses *coding*, sehingga setiap temuan dapat dilihat keterkaitannya dengan tema utama penelitian, yaitu kompetensi auditor, prosedur audit investigatif, dan etika auditor dalam mendukung efektivitas pengungkapan *fraud*.

Kerangka ini berbentuk tabel yang memuat ringkasan hasil pengkodean dari seluruh sumber data internal baik transkrip wawancara maupun dokumen pendukung yang kemudian dikelompokkan sesuai topik bahasan. Dengan adanya *framework matrices*, peneliti dapat membandingkan perspektif antar informan, mengidentifikasi pola atau kesenjangan informasi, serta memastikan bahwa setiap data yang relevan telah terpetakan secara jelas. Penggunaan *framework matrices* tidak hanya membantu menjaga konsistensi analisis, tetapi juga memperkuat transparansi proses penelitian, karena setiap kesimpulan dapat ditelusuri kembali ke data asli yang telah disusun pada matriks tersebut.

3.9. Objektifitas dan Keabsahan Data

Subjektivitas peneliti merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif karena peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara yang dilakukan secara terbuka juga memiliki potensi kelemahan, sehingga diperlukan pemeriksaan keabsahan data (Susanto et al., 2023). S. Lincoln & G.Guba (1985) dalam (Leavy, 2020) mengemukakan empat kriteria untuk menilai kualitas penelitian kualitatif, yaitu:

1. Kepercayaan

Kredibilitas menggantikan konsep validitas internal dalam penelitian kualitatif dan bertujuan memastikan bahwa temuan dapat dipercaya melalui pengumpulan data yang mendalam dan pembuktian yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sebagai teknik pengujian keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data utama dengan sumber tambahan (J.Moelong, 2018). Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dari Perwakilan BPKP DIY untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif.

2. Keteralihan

Konsep keteralihan menggantikan validitas eksternal dan mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki kesamaan karakteristik. Untuk mencapai keteralihan, peneliti menyajikan data deskriptif yang rinci serta mengumpulkan informasi empiris yang relevan dengan konteks

penelitian (J.Moelong, 2018). Dengan demikian, temuan dapat dipahami dan digunakan dalam situasi lain yang serupa.

3. Kebergantungan

Uji kebergantungan dilakukan melalui audit terhadap proses penelitian untuk memastikan konsistensi dan ketelusurannya. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing bertindak sebagai auditor independen yang meninjau seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Objektivitas hasil penelitian dinilai dari kesepakatan banyak pihak mengenai kebenaran data (J.Moelong, 2018).

4. Kepastian

Kepastian berkaitan dengan upaya peneliti menilai secara kritis potensi bias pribadi yang dapat memengaruhi temuan penelitian. Untuk menjaga objektivitas, peneliti melibatkan rekan atau pihak lain dalam proses pengecekan data. Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi untuk memperkuat keabsahan informasi. Triangulasi memastikan bahwa data diperoleh dari berbagai sumber sehingga meningkatkan validitas temuan (J.Moelong, 2018).

Dalam penelitian ini digunakan dua bentuk triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan untuk meningkatkan kredibilitas data (Mekarisce, 2020). Peneliti mewawancarai beberapa narasumber di lingkungan Perwakilan BPKP DIY guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai audit investigatif.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber menggunakan pertanyaan yang serupa, kemudian memanfaatkan perangkat lunak NVivo untuk menguji konsistensi data. NVivo membantu peneliti dalam mengelompokkan data melalui proses *coding* dan penyusunan *framework matrices*, yang menampilkan hubungan antara *case nodes* dan tema penelitian. *Framework matrices* disusun dalam bentuk tabel, di

mana baris berisi nama narasumber dan kolom memuat hasil *coding*. Matriks ini mencakup data wawancara dan dokumen penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengenalan Bab

Pada bab ini, peneliti menyajikan hasil analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian, meliputi informasi data yang diberikan serta temuan wawancara mengenai gambaran proses investigasi dan upaya pengembangan kompetensi auditor investigatif yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP DIY.

4.2. Profil Tempat Magang



Gambar 4.1 Kantor Perwakilan BPKP DIY

Nama Lembaga : Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jl. Parangtritis KM. 5,5, Panggunharjo, Sewon, Tarudan,
Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55188

Telepon : (0274) 385323

Website : <https://www.bpkp.go.id/>

BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi:

1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;
5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;
7. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;

8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;
9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

Sejalan dengan perubahan dinamika organisasi yang sudah tidak sesuai dengan regulasi, pada 20 Januari 2025, terbit Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hal ini sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar efektif dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dan kualitas pengendalian intern.

4.2.1. Visi dan Misi Lembaga

1. Visi
Menjadi Auditor Presiden yang Andal dan Terpercaya dalam Rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden
2. Misi
Membantu Presiden dalam Menjaga Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

4.2.2. Tujuan Lembaga

Tujuan Perwakilan BPKP DIY Adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

4.2.3. Struktur Organisasi Lembaga



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP DIY

4.3. Rencana Pelaksanaan Program Magang

4.3.1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan praktik kerja yang penulis jalankan berfokus pada Bidang Investigasi. Namun, selama masa magang, penulis tidak terlibat dalam berbagai aktivitas yang mendukung proses investigatif, seperti pengelolaan data, penyiapan dokumen, dan lain sebagainya, karena pada bidang investigasi lebih banyak mengatasi permasalahan kerugian negara yang bersifat rahasia. Sehingga, penulis melakukan tugas administratif lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan audit pada Bidang Investigasi, serta melakukan pengamatan bagaimana proses kerja pada Bidang Investigasi. Selain bertugas di Bidang Investigasi, penulis juga bersikap fleksibel dan siap memberikan bantuan kepada unit atau departemen lain ketika diperlukan. Keterlibatan lintas bagian ini memberikan pengalaman tambahan bagi penulis dalam memahami alur kerja organisasi serta memperluas wawasan mengenai koordinasi dan dukungan administratif dalam kegiatan investigatif.

4.3.2. Tempat dan Waktu Kegiatan

Hari : Senin - Jumat
Waktu : 4 Bulan
Tanggal : 1 Oktober 2025 – 30 Januari 2026
Tempat : Perwakilan BPKP DIY
Bagian Magang : Bidang Investigasi

4.3.3. Data Peserta

Yang menjadi pelaksana dalam kegiatan Magang ini adalah :

Nama : Hania Lu'luil Ma'nun
NIM : 22312102
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis dan Ekonomika
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Semester : VII (Tujuh)
No. HP : 082328837185
Email : 22312102@students.uii.ac.id

Tabel 4.1 Rencana Kegiatan Magang

Fase	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan yang Dilakukan
1. Orientasi dan Persiapan	Minggu 1–2 (Oktober 2025)	- Pengenalan terhadap Perwakilan BPKP DIY budaya perusahaan, aturan perusahaan, dan struktur perusahaan - Pengarahan etika dan kerahasiaan data.

Tabel 4.2 Rencana Kegiatan Magang (Lanjutan)

Fase	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan yang Dilakukan
		- Diskusi dengan sekbid tentang topik penelitian dan ruang lingkup yang diperbolehkan.
2. Observasi dan Studi Literatur	Minggu 3–6 (Oktober–November 2025)	- Bimbingan dan pengenalan berbagai macam tugas dan tanggung jawab bagian Bidang Investigasi Perwakilan BPKP DIY. Selain itu, juga mulai untuk memikirkan topik dan judul yang akan digunakan dalam penelitian laporan magang. - Observasi proses kerja bidang investigasi secara umum. - Mengkaji peraturan BPKP dan panduan audit investigatif. - Melakukan studi literatur terkait audit investigatif, kompetensi auditor, prosedur audit, etika auditor, dan pengungkapan <i>fraud</i>. - Penyusunan proposal magang

Tabel 4.3 Rencana Kegiatan Magang (Lanjutan)

Fase	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan yang Dilakukan
3. Pengumpulan data melalui wawancara	Minggu 7-10 (November – Desember 2025)	- Setelah selesai menemukan tema dan judul penelitian laporan magang, berlanjut untuk konsultasi dengan perusahaan dan dosen pembimbing untuk mendapatkan persetujuan atas judul yang dipilih yaitu “Analisis Pengaruh Kompetensi Auditor, Prosedur Audit, dan Etika Auditor terhadap Efektivitas Pengungkapan <i>Fraud</i> pada Bidang Investigasi”. Setelah disetujui, mulai untuk mencari data - data yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan penelitian magang. - Melakukan wawancara dengan narasumber internal (tanpa data rahasia). - Mengumpulkan persepsi dan pengalaman profesional terkait peran saksi ahli dan temuan audit.

Tabel 4.4 Rencana Kegiatan Magang (Lanjutan)

Fase	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan yang Dilakukan
		- Menyusun laporan tengah magang berisi hasil sementara dan refleksi pembelajaran, serta membuat video profil perusahaan serta kegiatan selama magang untuk lampiran kelengkapan dokumen magang
4. Analisis dan Penyusunan Laporan Akhir Magang	Minggu 11–15 (Desember 2025 - Januari 2026)	- Mengolah hasil wawancara menggunakan pendekatan kualitatif. Penyusunan laporan akhir magang dan mencari informasi serta data yang dibutuhkan dalam proses pembuatan laporan tersebut.
5. Memastikan laporan akhir	Minggu 16 (Januari 2026)	- Pada minggu terakhir magang, saya memastikan semua data yang diperlukan untuk pembuatan laporan magang sudah terkumpul.

4.4. Peran Kompetensi Auditor Terhadap Efektivitas Pengungkapan *Fraud*

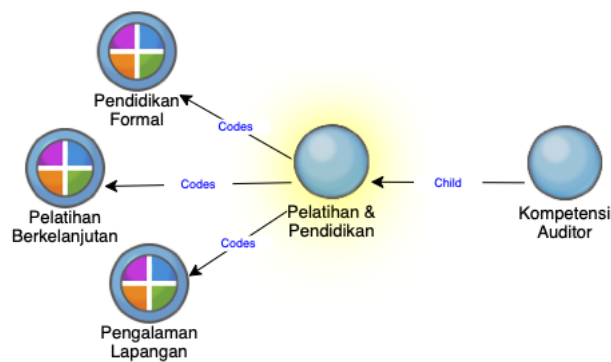
Efektivitas pengungkapan *fraud* di lingkungan pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas kompetensi yang dimiliki auditor investigatif. Kompetensi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai penguasaan pengetahuan teknis audit, tetapi juga mencakup pengalaman penugasan, kemampuan analitis, pemahaman aspek hukum, serta sikap profesional. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan auditor BPKP, diperoleh gambaran bahwa kompetensi auditor berperan langsung dalam menentukan kualitas proses pengumpulan bukti, ketepatan analisis, serta ketajaman simpulan dalam audit investigatif. Pengembangan kompetensi auditor di BPKP dilakukan melalui tiga sumber utama, yaitu pendidikan dan pelatihan (diklat), keahlian khusus, serta pengalaman penugasan. Informan 1 menjelaskan bahwa setiap auditor diwajibkan mengikuti jenjang diklat secara bertahap mulai dari tingkat basic, intermediate, hingga advanced. Menurutnya:

“Sumber kompetensi itu ada tiga: dari pendidikan, dari kediklatan, dan dari pengalaman penugasan. Untuk diklat, seluruh pegawai diperintahkan mengikuti diklat basic, intermediate, dan advanced secara bertahap.” (Informan 1)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi auditor dibangun secara sistematis dan terstruktur. Kewajiban mengikuti diklat menjadi mekanisme institusional untuk memastikan setiap auditor memiliki standar pengetahuan minimal sebelum terlibat dalam penugasan investigatif. Hal ini sejalan dengan prinsip pengembangan kompetensi aparatur pengawasan yang diatur dalam kebijakan pembinaan auditor pemerintah, yang menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan guna menjaga profesionalisme auditor. Selain diklat formal, proses pembelajaran juga terjadi melalui mekanisme *expose* kasus dan pelatihan mandiri. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memberi pemahaman tentang prosedur dan teknik audit yang lebih mendalam. Informan 1 menegaskan bahwa forum ekspos pada dasarnya merupakan sarana belajar kolektif karena di dalamnya dibahas modus, penyebab, serta langkah penanganan kasus secara tuntas.

Dengan demikian, kompetensi tidak hanya dibentuk melalui kelas formal, tetapi juga melalui transfer pengetahuan berbasis kasus nyata. Selain itu, pembaruan pengetahuan melalui pelatihan mandiri dan program online seperti MOOC (*Massive*

Open Online Course) juga memberikan kesempatan bagi auditor untuk terus mengembangkan diri, mengikuti tren dan praktik terbaru dalam dunia audit. Informan 5 juga menekankan terkait kontribusi pendidikan formal dan diklat terhadap kesiapan auditor di lapangan juga berpengaruh. Meskipun demikian, ia mengakui adanya kesenjangan antara teori dan praktik sehingga proses *learning by doing* tetap dominan, “Teknik audit di materi ada, tapi ketika turun ke lapangan ada hal yang tidak tercakup teori. Akhirnya banyak belajar dari pengalaman dan membaca peraturan.” (Informan 5). Berdasarkan hasil analisis di Gambar 4.3, pelatihan dan pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kompetensi auditor, terutama dalam bidang audit investigatif.



Gambar 4.3 Pelatihan dan Pendidikan

Kompetensi yang dianggap paling mendasar bagi auditor investigatif adalah penguasaan auditing serta pemahaman hukum. Informan 1 menyatakan bahwa latar belakang pendidikan tidak harus akuntansi, namun setiap auditor wajib memahami prinsip audit dan aspek hukum yang melekat pada penugasan:

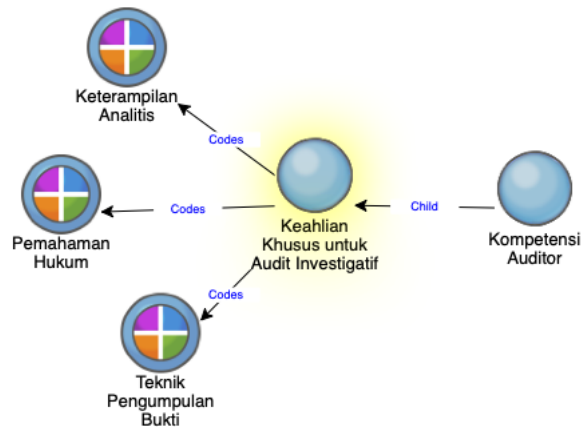
“Auditing itu wajib, tapi bukan berarti harus sarjana akuntansi. Teknik, hukum, statistik juga boleh. Namun pengetahuan hukum sebaiknya dikuasai karena semua penugasan di sini beririsan dengan hukum.” (Informan 1)

Pentingnya pemahaman hukum juga ditegaskan oleh informan 2. Menurutnya, auditor investigatif harus memahami hukum pidana dan hukum acara pidana karena standar pembuktian dalam audit berbeda dengan standar pembuktian di pengadilan. Ia menjelaskan:

“Bukti menurut audit dengan bukti menurut hukum itu berbeda. Cara perolehan bukti menurut hukum lebih ketat. Karena tujuan audit investigasi digunakan di pengadilan, caranya harus sesuai dengan hukum acara. Auditor secara umum itu punya kemampuan yang sama. Dia harus paham tentang tata kelola. Dia harus paham tentang pengendalian dan dia harus paham tentang manajemen risiko. Nah, khusus audit investigasi. Termasuk di dalam tata kelola pun, keuangan ya. Sebetulnya tentang audit keuangan dan kita harus paham tentang tata kelola keuangan negara. Kita harus paham tentang tata kelola keuangan daerah, kabupaten dan kota provinsi sama, sama kita harus paham tata kelola keuangan desa. Selain tata kelola keuangan itu, itu pemahaman tentang di dalam bidang keuangan. Tetapi di luar itu, seorang auditor investigasi harus punya pemahaman tentang prosedur dan teknik-teknik audit investigasi yang berbeda dengan audit-audit biasa. Untuk bisa melakukan pemahaman, melakukan mengetahui tentang prosedur dan teknik-teknik audit di bidang investigasi, seorang auditor investigasi juga dituntut dia harus punya pemahaman tentang hukum pidana, dasar-dasar hukum pidana, kemudian harus punya pemahaman tentang hukum acara pidana dan juga harus punya pemahaman tentang spesifiknya audit investigasi.”
(Informan 2)

Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor investigatif bersifat multidisipliner. Auditor tidak cukup hanya menguasai teknik audit keuangan, tetapi juga harus memahami tata kelola pemerintahan, prosedur investigasi, teknik wawancara, hingga aspek legal pembuktian yang terkait dengan setiap kasus yang dihadapi. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat diterima di pengadilan. Selain itu, teknik pengumpulan bukti yang sah juga menjadi keterampilan yang tak kalah penting. Auditor harus tahu cara mengumpulkan bukti yang valid, baik melalui dokumentasi, wawancara, atau pengamatan langsung, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas bukti tersebut. Kemampuan analitis juga sangat diperlukan dalam audit investigatif, di mana auditor harus mampu mengevaluasi bukti yang dikumpulkan dan membuat kesimpulan yang didasarkan pada fakta yang ada. Hal ini memastikan bahwa proses audit berjalan secara sistematis dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kegagalan memahami aspek hukum berpotensi menyebabkan bukti yang diperoleh tidak dapat digunakan dalam proses penegakan hukum sehingga

efektivitas pengungkapan *fraud* menjadi menurun. Keahlian khusus sangat dibutuhkan dalam audit investigatif untuk menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (lihat Gambar 4.4).

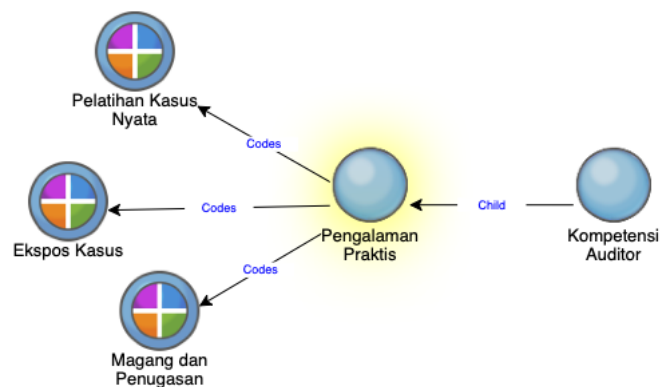


Gambar 4.4 Keahlian Khusus

Pengalaman penugasan terbukti menjadi faktor penting dalam membentuk kepekaan investigatif. Informan 3 menyatakan bahwa semakin banyak kasus yang ditangani, semakin luas wawasan auditor terhadap modus *fraud* dan metode pengungkapannya, “*Semakin banyak pekerjaan di BPKP, semakin tahu peraturan, metode, dan pengetahuan lain. Itu menambah wawasan untuk menghadapi kasus baru.*” (Informan 3). Informan 3 juga menekankan pentingnya sikap skeptis sebagai bagian dari kompetensi profesional. Auditor harus mampu menjaga jarak dari kepentingan pihak yang diaudit dan tidak mudah mempercayai pernyataan tanpa verifikasi memadai. Standar internal yang disebut REKOCUMA (Relevan, Kompeten, Cukup, Material) menjadi acuan untuk menilai objektivitas bukti. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mencakup aspek sikap dan perilaku profesional. Dari perspektif informan 4, pengalaman praktik terutama pada penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sangat membentuk kemampuan investigatif. Proses klarifikasi ulang terhadap saksi dari penelaahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melatih auditor untuk menggali informasi secara lebih kritis:

“Di PKKN itu kita tidak hanya menghitung kerugian, tapi harus mengklarifikasi semua saksi. Dari situ insting fraud jadi terbentuk, kita jadi tahu celah-celah bagaimana orang melakukan fraud.” (Informan 4)

Pengalaman ini dapat diperoleh melalui penugasan langsung dalam audit, di mana auditor menghadapi kasus nyata dan bekerja di bawah pengawasan senior atau atasan. Dalam pengalaman lapangan ini, auditor dapat belajar dari berbagai situasi yang mungkin tidak tercakup dalam pelatihan formal, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang kompleksitas kasus-kasus yang dihadapi. Mengikuti ekspos kasus juga sangat berguna, di mana auditor diberikan kesempatan untuk mempelajari berbagai jenis penyimpangan dan modus yang digunakan dalam penyelewengan. Selain itu, magang atau penugasan khusus di bidang investigasi juga memberikan pengalaman langsung yang mengasah keterampilan teknis dan analitis auditor. Pengalaman praktis ini membantu auditor untuk lebih siap dalam menangani kasus audit investigatif yang lebih kompleks dan membutuhkan keahlian yang lebih mendalam serta ketelitian dalam setiap langkah yang diambil. Dapat dilihat pada Gambar 4.5 faktor-faktor yang menambah pengalaman praktis.



Gambar 4.5 Pengalaman Praktis

Temuan-temuan di atas memperlihatkan bahwa kompetensi auditor berperan dalam beberapa aspek kunci efektivitas pengungkapan *fraud*. Pertama, kompetensi menentukan kualitas perolehan dan evaluasi bukti. Auditor yang memahami standar pembuktian hukum mampu memilih teknik pengumpulan bukti yang sah dan dapat

dipertanggungjawabkan. Kedua, kompetensi memengaruhi ketajaman analisis dalam mengidentifikasi modus dan pola kecurangan. Ketiga, kompetensi membentuk sikap skeptis dan independensi yang menjadi prasyarat keberhasilan investigasi.

Untuk menguatkan praktik tersebut, kerangka normatif pengawasan intern pemerintah juga menempatkan kompetensi sebagai unsur utama. Berbagai pedoman audit investigatif BPKP dan standar profesi auditor intern pemerintah menegaskan bahwa auditor wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai sebelum melaksanakan penugasan investigatif. Kesesuaian antara hasil wawancara dengan ketentuan normatif tersebut menunjukkan bahwa praktik di lapangan telah sejalan dengan standar yang berlaku. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa tantangan kompetensi, terutama pada aspek teknologi informasi dan forensik digital. Informan 3 mengungkapkan bahwa kemampuan auditor dalam menganalisis bukti digital masih terbatas dan sangat bergantung pada dukungan unit forensik di pusat. Keterbatasan ini berpotensi memengaruhi efektivitas pengungkapan *fraud* yang semakin banyak memanfaatkan media elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor memiliki peran yang sangat signifikan terhadap efektivitas pengungkapan *fraud* di pemerintahan. Kompetensi yang dimaksud meliputi:

1. Penguasaan pengetahuan audit dan tata kelola keuangan negara. Dinyatakan oleh informan 1, 2, 3, 4, dan 5.
2. Pemahaman hukum perlu dikuasai. Dinyatakan oleh informan 1 dan informan 2.
3. Keterampilan teknis investigasi seperti wawancara dan klarifikasi. Dinyatakan oleh informan 2, 3, dan 4.
4. Pengalaman penugasan yang membentuk intuisi profesional yang dinyatakan oleh informan 1, 3, 4, dan 5.
5. Pelatihan atau diklat, serta sertifikasi. Dinyatakan oleh informan 1, 2, 3, dan 5.

Auditor yang memiliki kompetensi memadai mampu memperoleh bukti yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, melakukan analisis yang lebih tajam terhadap

modus kecurangan, serta menghasilkan simpulan audit yang dapat digunakan dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi khususnya pada aspek teknologi informasi dapat menghambat kualitas pengungkapan *fraud*, serta menghambat kinerja auditor dalam mendapatkan bukti. Selain itu, kualitas keamanan instrument audit sangat rendah. Oleh karena itu, penguatan kompetensi melalui diklat berjenjang, pembelajaran berbasis kasus, dan peningkatan kapasitas forensik digital menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas audit investigatif di lingkungan pemerintahan.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi auditor investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan audit investigatif dalam suatu organisasi, maka semakin efektif pula proses pengungkapan kecurangan yang terjadi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Rahmayani, (2014) yang membuktikan bahwa teknik audit investigatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Selain itu, penelitian (Kristanti & Kuntadi, 2023) juga menyatakan kompetensi auditor berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam mengungkap kecurangan.

Terkait pengaruh kompetensi auditor terhadap pengungkapan *fraud*, Andini et al., (2021) juga menemukan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin besar kemampuan dalam mengungkap kecurangan. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Jannah (2021), Saridewi et al., (2022), serta Prasetya et al., (2023). Kompetensi yang memadai akan membantu auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam proses pengungkapan *fraud*, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pengungkapan kecurangan.

Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk menjelaskan pengaruh faktor efektivitas pengungkapan *fraud*, salah satunya adalah kompetensi terhadap tindakan auditor dalam mendeteksi adanya *fraud* atau kecurangan. Kompetensi auditor merupakan faktor internal yang mendorong tercapainya pelaksanaan audit secara efektif dalam proses

pengungkapan kecurangan. Kemampuan auditor memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan audit. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki individu dalam melaksanakan pekerjaan yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

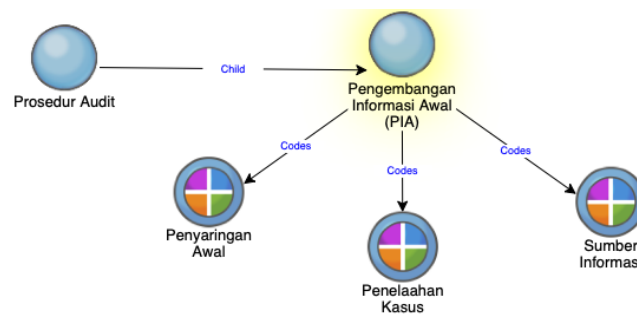
4.5. Peran Prosedur Audit Investigatif Terhadap Efektivitas Pengungkapan *Fraud*

Hasil wawancara dengan para auditor BPKP yang memiliki perbedaan tingkatan auditor menunjukkan bahwa prosedur audit memiliki peran yang sangat menentukan dalam efektivitas pengungkapan fraud di lingkungan pemerintahan. Dalam praktik audit investigatif, prosedur audit umumnya dibagi ke dalam beberapa tahapan utama, yaitu pengembangan informasi awal (PIA), perencanaan audit, eksekusi atau pelaksanaan audit, serta pelaporan hasil audit. Setiap tahapan tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam memastikan proses investigasi berjalan secara sistematis dan terarah. Prosedur audit berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengarahkan auditor sejak tahap awal penerimaan informasi hingga pemantauan tindak lanjut hasil audit. Prosedur audit tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai kerangka kerja sistematis yang memastikan setiap tahapan investigasi dilaksanakan secara terstruktur, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai standar yang sudah ditetapkan.

Tahap awal yang sangat krusial adalah proses perolehan dan penelaahan informasi awal. Berdasarkan keterangan informan, sumber permintaan audit investigatif dapat berasal dari berbagai pihak, yaitu permintaan penyidik aparat penegak hukum, permintaan pimpinan instansi yang menjadi objek pengawasan, pengembangan dari hasil pengawasan, kegiatan data mining internal, serta pengaduan masyarakat. Seluruh permintaan audit tersebut tidak langsung ditindaklanjuti, melainkan harus melalui mekanisme penelaahan yang dilanjutkan dengan Pengembangan Informasi Awal (PIA). Pada tahap ini auditor menilai kelayakan kasus berdasarkan keberadaan indikasi penyimpangan, potensi kerugian negara, serta kemungkinan diperolehnya alat bukti yang memadai. Prosedur ini berperan penting untuk menyaring laporan yang masuk sehingga sumber data audit dapat difokuskan pada kasus yang benar-benar layak ditangani. Dinyatakan oleh :

“Satu, dari penyidik. Penyidik yang minta audit ke sini, dia harus membawa bukti. Informasi itu dibawa oleh penyidik. Kalau BPKP minta tolong dilakukan audit investigasi atas kasus ini, maka itu menjadi sumber informasi untuk melakukan audit. Yang kedua, dari pimpinan institusi ... kepala dinas minta audit investigasi untuk kasus yang ada di institusinya. Yang ketiga adalah pengembangan dari hasil pengawasan yang dilakukan ... bidang kami melihat, oh iya, ini perlu dialami, maka bidang kami bisa perintahkan untuk melakukan audit investigasi. Pengembangan, terus dari data mining ... berdasarkan pengumpulan data itu ternyata, oh, ini memang layak untuk dilakukan investigasi. Dan yang berikutnya adalah dari pengaduan masyarakat ... kalau kita kuat untuk dialami, kita bisa melakukan investigasi. Disebut juga pengembangan informasi awal ... , itu semuanya tetap dilakukan pengembangan informasi awal, layak tidak untuk ditindaklanjuti dengan prosedur investigasi. Jika memenuhi kriteria, bisa dilanjutkan.” (Informan 1)

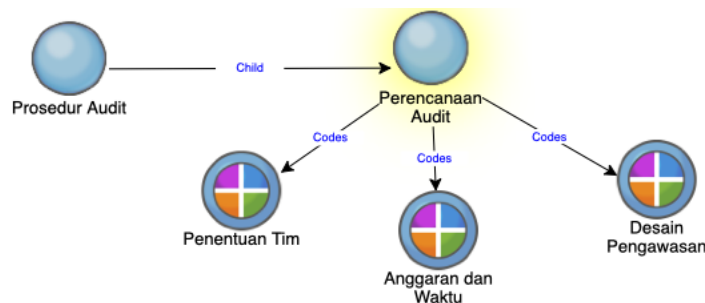
Pengembangan Informasi Awal (PIA) adalah langkah pertama yang sangat penting dalam audit investigatif untuk menilai apakah kasus tersebut memenuhi kriteria untuk dilanjutkan ke audit lebih mendalam. Pada tahap ini, terdapat beberapa proses yang perlu dilakukan dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6 Pengembangan Informasi Awal

Apabila hasil PIA menunjukkan bahwa kasus memenuhi kriteria, proses dilanjutkan pada tahap perencanaan audit. Dalam tahap ini disusun desain pengawasan yang mencakup tujuan audit, ruang lingkup, kebutuhan anggaran, kebutuhan waktu, kebutuhan tenaga ahli, serta pembentukan tim audit. Informan menegaskan bahwa pembentukan tim merupakan bagian prosedural yang sangat menentukan keberhasilan pengungkapan *fraud*. Tim harus disusun secara komplementer berdasarkan kompetensi, pengalaman,

dan relevansi keahlian dengan karakteristik kasus. Prosedur ini memastikan bahwa secara kolektif tim memiliki kapasitas yang memadai, meskipun tidak semua anggota memiliki kemampuan yang sama. Dengan demikian, kualitas proses investigasi lebih bergantung pada kompetensi tim daripada individu. *“Di perencanaan itu kita sudah tentukan siapa saja yang masuk tim. Biasanya disesuaikan dengan karakter kasusnya, jadi tidak bisa asal tunjuk orang.”* (Informan 2). Perencanaan audit yang bertujuan untuk menentukan metodologi yang akan diterapkan selama audit investigative dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Perencanaan Audit

Setelah perencanaan selesai, tahap pelaksanaan (eksekusi) dan pelaporan menjadi langkah kritis dalam audit investigatif. Pada tahap ini, auditor melakukan pelaksanaan audit dengan mengumpulkan bukti yang diperlukan dan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti wawancara langsung dengan saksi, observasi lapangan, dan konfirmasi dokumen. Auditor juga perlu menyusun program audit yang harus mendapatkan persetujuan pengendali teknis. Mekanisme ini merupakan bentuk pengendalian mutu atau penjaminan kualitas internal untuk memastikan bahwa langkah pemeriksaan telah sesuai standar, relevan dengan objek yang diperiksa, serta cukup untuk menarik simpulan. Pengendali teknis berperan mengoreksi apabila program kerja belum memadai, misalnya terkait waktu observasi yang tidak representatif atau metode pengujian yang kurang tepat. Prosedur berjenjang ini terbukti meningkatkan ketepatan arah investigasi dan meminimalkan risiko

kesalahan simpulan. Informan 3 menjelaskan bahwa pengendali teknis berperan penting untuk memastikan prosedur audit yang dirancang telah memadai.

“Program audit itu tidak bisa langsung jalan. Harus di-review pengendali teknis dulu, apakah langkahnya sudah cukup untuk membuktikan dugaan fraud atau belum.” (Informan 3)

Dalam pelaksanaan investigasi, prosedur pengumpulan bukti menjadi faktor kunci efektivitas. Auditor tidak hanya mengandalkan bukti dari satu sumber, tetapi dituntut kreatif mencari alternatif ketika terjadi kendala. Hal ini diungkapkan oleh informan 5.

“Kalau dokumen di instansi tidak lengkap, kita cari dari pihak lain. Misalnya dari bank, penyedia, atau instansi terkait. Jadi audit tidak berhenti hanya karena satu bukti tidak ada.” (Informan 5)

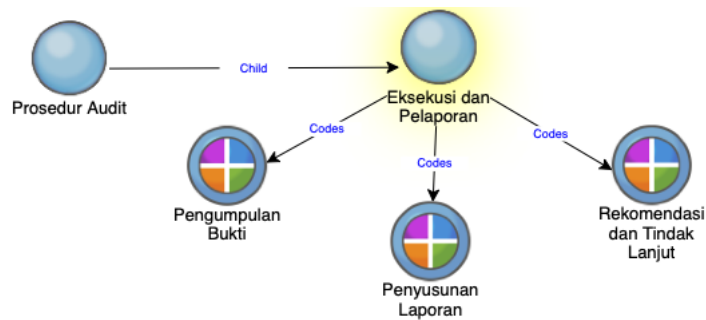
Hal ini menunjukkan bahwa prosedur audit memberikan ruang fleksibilitas metodologis selama tetap berada dalam koridor standar pembuktian. Penggunaan bukti digital juga semakin diutamakan karena lebih mudah dianalisis dan disimpan, meskipun masih terdapat tantangan ketika auditan hanya menyediakan dokumen fisik. Prosedur audit investigatif juga mengatur penggunaan bukti digital dan teknik klarifikasi terhadap pihak terkait. Klarifikasi dilakukan secara berjenjang dan terdokumentasi agar hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti. Informan 4 menyatakan, *“Klarifikasi itu penting sekali. Dari situ kita bisa menguji kebenaran dokumen dan pernyataan. Biasanya justru dari klarifikasi itu modus fraud mulai kelihatan.”* (Informan 4). Selain itu, informan 1 menunjukkan bahwa dalam proses audit atau pemeriksaan, auditor membedakan antara bukti primer dan bukti sekunder sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas bukti yang digunakan. Bukti primer dipahami sebagai bukti yang diperoleh langsung dari sumber asli sehingga memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi, sedangkan bukti sekunder merupakan bukti yang telah melalui proses pengolahan oleh pihak lain. Pemahaman ini mencerminkan pentingnya pertimbangan sumber bukti dalam mendukung proses analisis dan penarikan kesimpulan dalam pengungkapan temuan, sehingga auditor dapat menilai kredibilitas informasi secara lebih tepat.

“Ada bukti primer, ada bukti sekunder. Ya. Bukti primer itu yang bukti yang memang dari sumber aslinya. Kalau bukti sekunder, itu bukti yang sudah diolah, tidak dari produsen yang memproduksi bukti itu. Sehingga kalau kita ngambil sumber dari BPS, ya, BPS itu sekunder.” (Informan 1)

Bukti tidak harus selalu lengkap secara keseluruhan, namun harus memadai dan cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Informan 3 dan 5 juga menjelaskan bahwa objektivitas bukti dalam proses audit dinilai berdasarkan pemenuhan beberapa kriteria tertentu, yaitu relevansi, kompetensi, kecukupan, dan materialitas. Apabila suatu bukti memenuhi aspek-aspek tersebut, maka bukti tersebut dapat dianggap objektif dan layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor menerapkan standar profesional dalam mengevaluasi bukti untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan didukung oleh informasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila bukti yang diperoleh belum memenuhi kriteria tersebut, auditor perlu melakukan penelusuran tambahan hingga diperoleh informasi yang dapat memberikan keyakinan yang memadai. Bukti harus memadai sebagai alat bukti suatu perkara, karena bukti merupakan instrumen penting dari sebuah pelaporan untuk menentukan apakah aduan yang diterima oleh auditor dapat diperkarakan atau bahkan tidak ditindaklanjuti. Bukti yang memadai juga dijelaskan oleh Informan 3.

“Kalau objektif itu kalau di kami ada beberapa standar ada yang namanya rekocuma, Rekocuma itu relevan, kompeten, cukup, materialistic. Rekocuma itu kalau suatu bukti itu dapat mendapatkan empat aspek itu Itu kita sudah anggap sebagai bukti yang objektif.” (informan 3)

Setelah bukti terkumpul, langkah selanjutnya adalah penyusunan laporan, di mana auditor menyusun laporan audit yang menggambarkan temuan-temuan dari proses audit dan memberikan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut. Dalam laporan tersebut, auditor dapat merekomendasikan tindakan yang perlu diambil, baik oleh penegak hukum maupun lembaga pengawasan terkait. Dalam tahap pelaksanaan (eksekusi) dan pelaporan terdapat proses di dalamnya sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Eksekusi dan Pelaporan

Standar yang digunakan dalam audit investigatif mengacu pada SAIPI yang kemudian diturunkan ke dalam pedoman teknis BPKP. Keberadaan standar ini membuat alur prosedur menjadi runtut mulai dari penetapan hipotesis atau TAO (*Tentative Audit Objective*), pemahaman proses bisnis, klarifikasi kepada pihak terkait, hingga penarikan simpulan. Auditor terlebih dahulu merumuskan hipotesis dugaan penyimpangan, memetakan regulasi yang relevan, kemudian melakukan klarifikasi untuk menguji kesesuaian antara praktik dan ketentuan. Pendekatan berbasis hipotesis ini menjadikan prosedur audit lebih terarah sesuai karakteristik setiap kasus. Prosedur audit juga mengatur mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum. Pada audit penghitungan kerugian keuangan negara, misalnya, BPKP hanya bertugas menghitung nilai kerugian, sedangkan penentuan tersangka merupakan kewenangan hakim. Selain itu terdapat mekanisme pemantauan tindak lanjut setelah laporan diserahkan, yang dilakukan secara periodik oleh kantor BPKP untuk memastikan rekomendasi benar-benar dilaksanakan. Selain itu, prosedur audit juga mengatur koordinasi dengan aparat penegak hukum, terutama dalam audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Auditor tidak dapat melakukan klarifikasi secara sembarangan, melainkan harus melalui mekanisme yang sah. Informan 2 menjelaskan, “Untuk PKKN, kita tidak bisa langsung panggil saksi. Harus lewat penyidik supaya prosesnya sah dan bisa dipakai di pengadilan.” (Informan 2)

Setelah laporan hasil audit disusun dan diserahkan, prosedur audit belum berakhir. BPKP masih melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Informan 1 menegaskan bahwa pemantauan ini merupakan bagian penting dari efektivitas

pengungkapan *fraud*, “Kalau hanya berhenti di laporan, itu belum efektif. Makanya ada pemantauan tindak lanjut supaya rekomendasi benar-benar dijalankan.” (Informan 1)

Meskipun prosedur telah disusun sistematis, praktik di lapangan tetap menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan bukti, objek audit yang tidak kooperatif, atau faktor eksternal seperti hilangnya arsip dan tersangka yang melarikan diri. Namun prosedur memberikan alternatif penanganan, misalnya melalui perpanjangan surat tugas, penggantian komposisi tim, atau penghentian sementara ketika bukti tidak mencukupi. Adanya mekanisme *check and balance* minimal dua auditor dalam satu tim juga menjadi bagian prosedur untuk mencegah kecurangan internal. Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa prosedur audit berperan strategis terhadap efektivitas pengungkapan *fraud*. Prosedur memastikan setiap tahapan investigasi berjalan objektif, terdokumentasi, dan sesuai standar, mulai dari penelaahan informasi awal, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut. Tanpa prosedur yang jelas, upaya pengungkapan *fraud* berisiko tidak terarah, lemah dalam pembuktian, serta sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur audit investigatif menjadi faktor fundamental dalam keberhasilan auditor internal mengungkap dan membuktikan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Larasati et al., (2020) menyatakan bahwa kemampuan auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam proses pembuktian kecurangan. Semakin banyak pengalaman atau jam terbang yang dimiliki auditor, maka semakin besar pula kemampuannya dalam meningkatkan pengetahuan terkait efektivitas pelaksanaan prosedur audit untuk membuktikan adanya kecurangan. Selanjutnya, penelitian (Muna & Meutia, 2024) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan Ditinjau dari Independensi dan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) menunjukkan bahwa penerapan prosedur audit investigatif terbukti efektif dan mampu mempercepat proses pengungkapan indikasi kecurangan.

Dalam perspektif teori atribusi, prosedur audit dipandang sebagai faktor eksternal yang memengaruhi kinerja auditor karena prosedur audit merupakan seperangkat pedoman yang berasal dari luar diri auditor. Ketika auditor menjalankan prosedur audit,

mereka mematuhi standar dan prinsip yang telah ditetapkan secara umum. Penilaian terhadap kinerja auditor dalam kaitannya dengan prosedur yang dilaksanakan mencerminkan sejauh mana auditor mematuhi atau melanggar prosedur tersebut, yang pada akhirnya dikaitkan dengan standar dan pedoman yang berlaku secara eksternal.

4.6. Peran Etika Auditor Terhadap Efektivitas Pengungkapan *Fraud*

Dalam konteks audit investigatif, keberhasilan pengungkapan fraud tidak hanya ditentukan oleh kompetensi auditor dan prosedur audit yang sistematis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh etika profesional auditor. Data wawancara yang dikumpulkan dari beberapa informan auditor di BPKP menunjukkan bahwa nilai-nilai etika seperti objektivitas, integritas, independensi, perilaku profesional, dan sikap beretika dalam menghadapi tekanan eksternal merupakan penunjang utama dalam menghasilkan audit investigatif yang kredibel dan efektif. Namun, dalam pembahasan ini, fokus utama akan diarahkan pada dua aspek etika yang paling menonjol dalam hasil wawancara, yaitu objektivitas dan profesionalisme auditor dalam menjalankan audit investigatif.

Menurut informan 1, penerapan objektivitas harus dijaga tidak hanya dalam praktik tetapi juga dalam penampilan objektivitas. Ia menyampaikan bahwa auditor perlu menghindari situasi di mana terdapat hubungan keluarga atau afiliasi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesionalisme mereka. Misalnya, auditor tidak boleh ditugaskan pada instansi tempat terdapat anggota keluarga dekatnya, karena meskipun secara faktual auditor mungkin dapat tetap netral, penampilan objektivitasnya sudah ditafsirkan tidak objektif oleh pihak lain. Oleh karena itu, auditor wajib melaporkan setiap potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) sejak awal sehingga dapat diganti atau ditarik dari penugasan investigasi tersebut. Dinyatakan oleh informan 1:

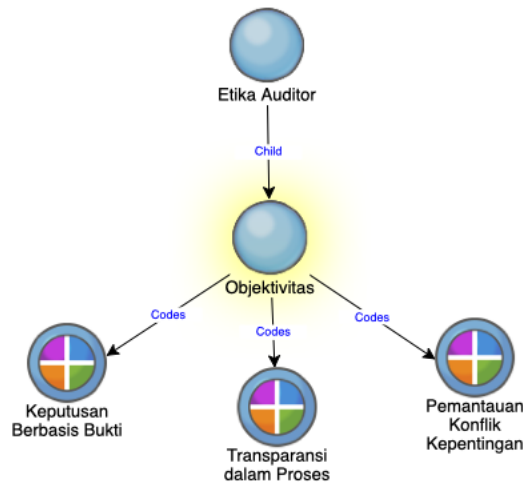
“Kalau objektivitas, ya, kita semuanya memang dididik untuk objektif. Kalau ada di antara anggota tim yang tidak bisa objektif, dia harus melapor... Kalau masih bersaudara, tidak bisa objektif. Orang akan nilai seperti itu...” (Informan 1)

Penekanan pada objektivitas ini sesuai dengan prinsip etika auditor yang diatur secara internasional, yang menuntut auditor untuk “bebas dari konflik kepentingan, baik

secara faktual maupun pandangan pihak luar,” termasuk dalam standar etika audit pemerintahan dan audit internal global yang menekankan independensi profesional sebagai landasan kredibilitas audit. Selaras dengan itu, prinsip kode etik AAPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia) dan SAPI (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia) juga mensyaratkan integritas dan independensi sebagai bagian dari etika auditor untuk menghasilkan penilaian yang tidak bias dan objektif.

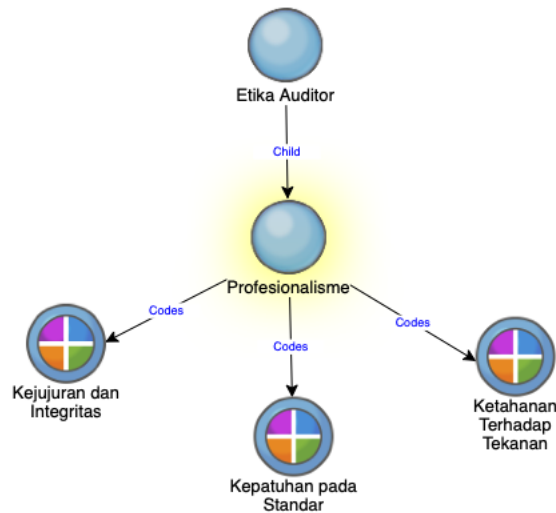
Informan 1 juga menyinggung banyaknya tekanan eksternal yang timbul dalam kasus sensitif, termasuk dari masyarakat setempat atau pihak yang berkepentingan dengan hasil audit. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa auditor harus tetap menjaga integritas dan profesionalisme, serta menjelaskan prinsip kerja dengan bahasa yang tepat agar semua pihak memahami bahwa simpulan audit didasarkan pada standar yang benar, bukan pada besaran angka kerugian seperti yang diinginkan pihak tertentu. *“Kalau buat auditor enggak ada bedanya kasus sensitif atau tidak, kesimpulannya harus berdasarkan bukti.”* (Informan 2). Penegasan ini menunjukkan bahwa sikap etis auditor dalam menghadapi tekanan, baik berupa intimidasi maupun permintaan untuk memanipulasi hasil ditentukan oleh kemampuan auditor untuk mengacu pada bukti auditor yang relevan, kompeten, cukup, dan material, serta prinsip objektivitas profesional dalam pengambilan keputusan audit.

Berdasarkan hasil analisis, objektivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam audit, karena memastikan bahwa hasil audit tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau eksternal yang dapat merusak integritas proses audit. Pemantauan konflik kepentingan menjadi langkah awal untuk menjaga objektivitas, di mana auditor harus memastikan bahwa tidak ada hubungan pribadi atau profesional yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil dalam audit. Auditor juga harus memastikan transparansi dalam proses audit, dengan melakukan setiap langkah audit secara terbuka agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit kembali jika diperlukan. Semua temuan yang dihasilkan dari proses audit harus berbasis bukti, yang artinya keputusan dan kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi dan bukan berdasarkan opini pribadi atau pengaruh luar. Pada objektivitas terdapat faktor yang memengaruhinya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.9 Objektivitas

Perilaku profesional auditor sangat berperan dalam menjaga kualitas dan integritas hasil audit. Kepatuhan pada standar menjadi aspek kunci dalam profesionalisme, di mana auditor harus mematuhi pedoman dan regulasi yang ditetapkan oleh badan audit, serta hukum yang berlaku. Auditor harus bekerja dengan kejujuran dan integritas tinggi, memastikan bahwa setiap temuan dan rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kenyataan yang ditemukan selama audit. Ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan, auditor harus tetap menunjukkan ketahanan terhadap tekanan, yaitu sikap profesional dalam menghadapi segala bentuk pengaruh yang dapat mengganggu objektivitas dan integritas audit. Etika profesional juga menuntut auditor untuk menghormati dan menjalankan prinsip kerahasiaan dalam penggunaan informasi sensitif yang diperoleh selama audit, sehingga hasil audit tidak dibocorkan kepada pihak yang tidak berwenang dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dapat dilihat pada Gambar 4.10 bahwa profesionalisme auditor dapat didukung dengan kejujuran, kepatuhan, dan ketahanan terhadap tekanan.



Gambar 4.10 Profesionalisme

Etika auditor juga tercermin dalam perilaku profesional yang ditunjukkan oleh informan 3 dan informan 5. Mereka menekankan pentingnya mematuhi pedoman audit, mengikuti prosedur audit dengan urut dan konsisten, serta menyusun dokumentasi (kertas kerja) yang lengkap dan akurat sebagai bukti dari hasil kerja mereka. Informan 4 menyampaikan bahwa profesionalisme auditor mencakup kemampuan menyusun laporan yang sesuai dengan pedoman dan struktur yang telah ditetapkan, serta tanggung jawab atas isi laporan audit yang disusun, *“Kalau dinyatakan profesional, kita on the track di pedoman... kemungkinan nanti laporannya akan bagus.”* (Informan 4)

Informan 5 menambahkan bahwa auditor harus hati-hati dalam menerapkan hasil audit dan memastikan bahwa temuan yang ditulis dalam laporan didukung oleh bukti yang konsisten, serta tidak tergantung hanya pada data yang disediakan auditan. Perilaku profesional seperti disiplin dalam menyusun dokumentasi, keterbukaan dalam klarifikasi, dan konsistensi mengambil simpulan sesuai bukti memperkuat legitimasi audit investigatif dan daya guna hasilnya dalam proses tindak lanjut, termasuk oleh aparat penegak hukum. Pendekatan persuasif auditor terhadap pihak auditan juga mencerminkan dimensi etika dalam melaksanakan tugas. Informan 2 misalnya mengungkapkan strategi komunikasi persuasif agar pihak auditan bersedia memberikan bukti tanpa memaksakan atau menyudutkan mereka, yang dapat mempengaruhi objektivitas atau Kerjasama,

“Komunikasi persuasif... jangan memvonis... karena orang bisa diam dan tidak mau terbuka.” (Informan 2)

Hal ini menunjukkan bahwa auditor tidak hanya dituntut teknis yang handal, tetapi juga bersikap hormat kepada pihak auditan, sehingga proses pengumpulan bukti berjalan efektif tanpa mengesampingkan martabat auditan. Etika profesional auditor tidak hanya berasal dari pengalaman lapangan, tetapi juga dalam pedoman formal seperti Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AAIPI) dan prinsip-prinsip etika audit internasional seperti yang diformulasikan oleh *The Institute of Internal Auditors*. Prinsip-prinsip ini meliputi integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, serta perilaku profesional yang mencerminkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab publik. Dokumen-dokumen tersebut menegaskan bahwa auditor harus mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau organisasi, serta menghindari hubungan atau situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau merusak independensi profesional auditor.

Berdasarkan temuan hasil wawancara dan tinjauan literatur, dapat disimpulkan bahwa etika auditor memiliki peran krusial terhadap efektivitas pengungkapan *fraud* di pemerintahan. Etika profesional seperti objektivitas, integritas, independensi, perilaku profesional, serta penggunaan bukti dalam simpulan audit merupakan landasan moral dan profesional untuk mengungkap *fraud* secara sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa pedoman etika yang kuat, hasil audit investigatif sangat rentan terhadap bias, intervensi eksternal, atau manipulasi data yang dapat menurunkan kualitas temuan audit serta menghambat proses penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, kepatuhan auditor terhadap prinsip-prinsip etika dan kode etik profesi bukan hanya meningkatkan kredibilitas laporan audit, tetapi juga memperkuat fungsi audit investigatif sebagai instrumen pengawasan yang mampu mendeteksi dan mengungkap *fraud* secara objektif dan profesional. Referensi seperti kode etik dan standar audit tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga sebagai kekuatan normatif yang mendorong penerapan perilaku etis auditor dalam praktik investigatif.

Penelitian Raharjo et al., (2020) menunjukkan bahwa kode etik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian dugaan tindak pidana pencucian uang serta

pengungkapan kecurangan. Rahayu & Suryanawa (2020) juga menemukan bahwa kode etik berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor yang menjunjung tinggi etika profesi diharapkan mampu bekerja secara objektif dan terhindar dari praktik kecurangan, sehingga menghasilkan opini audit yang tepat dan sesuai dengan kondisi laporan keuangan perusahaan maupun instansi pemerintah. Pernyataan ini juga didukung oleh Chrisdinawidanty et al., (2016). Berdasarkan berbagai temuan tersebut, penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap pengungkapan kecurangan. Penelitian (Amsar et al., 2022) juga menunjukkan bahwa kode etik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kecurangan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Fauzi et al., (2017) yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan auditor terhadap kode etik, maka semakin efektif pelaksanaan tugas dan kinerja yang dihasilkan.

Berdasarkan teori atribusi, etika dan kompetensi termasuk dalam faktor internal individu. Jika dikaitkan dengan profesi auditor, etika auditor tercermin dalam perilaku, sikap, serta pelaksanaan tugas mereka. Kepatuhan auditor terhadap etika profesi yang baik, serta didukung oleh keterampilan, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus yang memadai, akan menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila auditor hanya memiliki etika yang baik tanpa didukung oleh keahlian yang memadai, maka kualitas audit yang dihasilkan tidak akan mengalami peningkatan secara optimal. Profesionalisme merupakan karakter yang dimiliki auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesinya sesuai dengan standar audit serta didukung oleh keahlian profesional untuk mewujudkan auditor yang kompeten dalam melaksanakan tugas audit. Selain itu, temuan tersebut sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa faktor intrinsik atau faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti profesionalisme auditor, berperan dalam membentuk kepribadian dan dapat memengaruhi kinerja auditor.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan efektivitas pengungkapan *fraud* di lingkungan pemerintahan dengan menitikberatkan pada peran kompetensi auditor, prosedur audit investigatif, dan etika auditor. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para auditor BPKP serta pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki peran yang signifikan dan saling berkaitan dalam mendukung efektivitas pengungkapan *fraud*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan audit investigatif. Auditor yang memiliki pengetahuan teknis, pemahaman regulasi, serta pengalaman penugasan yang memadai mampu menelaah informasi awal, mengidentifikasi indikasi kecurangan, dan mengembangkan strategi audit yang tepat. Kompetensi tersebut tidak hanya dilihat dari kemampuan individu, tetapi juga dari kemampuan tim audit secara keseluruhan dalam saling melengkapi keahlian sehingga proses pengungkapan *fraud* dapat berjalan secara efektif dan akurat.

Selain kompetensi auditor, prosedur audit investigatif terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pengungkapan *fraud* dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur audit yang dimulai dari pengembangan informasi awal, perencanaan audit, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut membantu auditor dalam menentukan kelayakan suatu kasus untuk ditindaklanjuti, mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material, serta menyusun simpulan audit yang sesuai dengan standar yang berlaku. Kepatuhan terhadap pedoman dan standar audit menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas hasil audit investigatif. Lebih lanjut, etika auditor juga berperan sebagai penopang utama dalam efektivitas pengungkapan *fraud*. Sikap independen, objektif, dan berintegritas memungkinkan auditor menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan tertentu. Penerapan etika profesi mendorong auditor untuk bersikap skeptis

secara profesional, berhati-hati dalam menarik simpulan, serta memastikan bahwa setiap temuan didukung oleh bukti yang memadai. Dengan demikian, hasil audit investigatif tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga memiliki kredibilitas yang tinggi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengungkapan *fraud* di pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara kompetensi auditor, prosedur audit investigatif, dan etika auditor. Ketiganya harus diterapkan secara simultan agar proses audit investigatif dapat menghasilkan pengungkapan *fraud* yang efektif, berkualitas, dan dapat mendukung upaya penegakan hukum serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini disadari masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam menafsirkan hasil penelitian. Pertama, data penelitian diperoleh terutama melalui metode wawancara, sehingga sangat bergantung pada pengalaman, persepsi, serta sudut pandang informan. Meskipun wawancara dilakukan secara mendalam, potensi subjektivitas dari informan tetap tidak dapat dihindari. Selain itu, keterbatasan akses terhadap dokumen audit investigatif dan laporan kasus secara detail, karena sifatnya yang rahasia, juga membatasi peneliti dalam melakukan analisis yang lebih mendalam berbasis dokumen.

Kedua, penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga hasil penelitian belum dapat digunakan untuk mengukur besaran pengaruh masing-masing variabel secara kuantitatif. Oleh karena itu, temuan penelitian ini lebih bersifat pemahaman konseptual dan kontekstual mengenai peran kompetensi auditor, prosedur audit, dan etika auditor dalam pengungkapan *fraud*.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan akademis. Bagi instansi BPKP, disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya terkait audit investigatif, forensik digital, dan pemanfaatan teknologi informasi. Penguatan pemahaman auditor terhadap regulasi dan aspek hukum juga perlu ditingkatkan agar hasil audit investigatif semakin kuat dan dapat mendukung proses penegakan hukum. Selain itu, BPKP diharapkan dapat terus menjaga konsistensi penerapan prosedur audit investigatif sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku. Evaluasi dan pengawasan internal terhadap kepatuhan prosedur dan etika auditor perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan kualitas serta integritas hasil audit investigatif.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek dan subjek penelitian dengan melibatkan instansi pengawasan lain atau aparat penegak hukum, serta mengombinasikan metode kualitatif dengan analisis dokumen atau pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, penelitian di bidang audit investigatif dalam pengungkapan *fraud* di sektor pemerintahan dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017). Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., & Albrecht, Conan C. zimbelman, M. F. (2019). Fraud examination sixth edition. In *Cengage Learning Asia*.
- Amsar, A., Tyoso, J. S. P., & Mardiyah, S. (2022). Analisis independensi, interdependensi tugas, kode etik, soft skills, dan pengungkapan kecurangan (studi pada aparatur sipil negara yang bertugas sebagai auditor di kota semarang). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 121–128. <https://doi.org/10.51903/jimeb.v1i3.419>
- Andini, S., Amiruddin, A., & T Pontoh, G. (2021). Pengaruh kompetensi, independensi, dan tekanan waktu auditor investigatif terhadap pengungkapan fraud. *Akrual: Jurnal bisnis dan akuntansi kontemporer*. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 151–162. <https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.14812>
- Angraeni, D., & Kuntadi, C. (2024). Pengaruh independensi auditor, etika profesi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4), 3031–5220. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i4.271>
- Angreani, N. (2023). Pengaruh skeptisme profesional dan kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud) dengan locus of control internal sebagai variabel moderasi (studi pada inspektorat kalimantan utara). <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/25488>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2010). *Peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor: PER-500/K/2010*. Bpkp.
- Bandur, A. (2019). Penelitian kualitatif: studi multi-disiplin keilmuan dengan NVivo 12 plus (Pertama). Mitra Wacana Media.
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2015). Qualitative data analysis with nvivo. Qualitative research in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 12(4), 492–494. <https://doi.org/10.1080/14780887.2014.992750>
- Bologna, G. J., Lindquist, R. J., & Wells, J. T. (1993). Fraud auditing and forensic accounting: New tools and techniques. John Wiley & Sons.
- BPK. (2023). Pedoman audit investigasi. In *Pemerintah Daerah Kota Depok*.
- Chrisdinawidanty, Z. N., Tugiman, H., & Muslih, M. (2016). Pengaruh etika auditor dan fee audit terhadap kualitas audit. 3(3), 3466–3474. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2745.2009.01572.x>
- Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed). In *Research gate* (Vol. 1, Issue November).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches.
- Faradiba, F. T., Sodikin, A. O., & Sandari, T. E. (2025). Pengaruh etika profesi akuntan

- publik terhadap independensi dalam kasus manipulasi laporan keuangan pt garuda indonesia tbk tahun 2018. *Jurnal Bisnis Kreatif Dan Inovatif*, 2(4), 337–346. <https://doi.org/10.61132/jubikin.v2i4.1153>
- Fauzi, A. Z., Perdana, H. D., & Sulardi. (2017). Pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme dan kepatuhan pada kode etik auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian fraud (kecurangan). 2(1), 53–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.SAR.2017.2.1.403>
- Haldin, E., Amiruddin, & Bakri, A. A. (2022). Pengaruh pengalaman auditor investigasi dan kompetensi auditor investigasi terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. *Journal Of Unicorn Adpertisi*, 1(2), 1–15. <https://databoks.katadata.co.id/>
- Halim, A. (2008). Auditing. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hambali, M. R., Da'i, M., Ilmiyah, N., Kurniawati, N., Cahyaningrum, V. D., Fatoni, M., Kartini, A. Y., Lestari, I. W., & Rohmah, R. (2021). Etika profesi (M. I. A. Fathoni (ed.); 1st ed.). CV. Agrapana Media. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=OV8XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA69&dq=etika+profesi&ots=wHfbdU1hI7&sig=lbSeE1T6v99NW4O7K2Nmel1fRd4&redir_esc=y#v=onepage&q=etika+profesi&f=false
- Hartono, Da Silva, J., Da Costa, F., Melianto, D., & Suparta, M. (2025). Implementasi metode analisis menggunakan nvivo dalam penelitian kualitatif. *Journal of Management and Creative Business*, 3(2), 191–198. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v3i2.4652>
- Hasana. (2018). Pengaruh sikap auditor forensik, kemampuan dan pengalaman auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan fraud.
- Hasnur, F. S., Wawo, A., & Sari, N. R. (2023). Pengaruh kualitas audit dan pengalaman auditor terhadap pendeteksian fraud dengan profesionalisme sebagai variabel moderasi. 4, 277–289. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/isafir.v4i2.37377>
- IAPI. (2018). Panduan indikator kualitas audit pada kantor akuntan publik. *Institut Akuntan Publik Indonesia*. <https://iapi.or.id/panduan-indikator-kualitas-audit-pada-kap/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Kode etik akuntan indonesia efektif 1 juli 2020. In *Institut Akuntan Manajemen Indonesia*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode Etik Akuntan Indonesia - 2020.pdf
- J.Moelong, L. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. *PT Remaja Rosdakarya*.
- Jannah, R. (2021). Peran kompetensi auditor terhadap hasil audit investigasi dalam pembuktian kecurangan. 1(1), 54–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/akunsyah.v1i1.3020>

- Kanegian, D. (2023). Pengaruh etika, skeptisme, independensi dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan (studi pada auditor di kap yogyakarta) (Vol. 4, Issue 1).
- Karyono. (2013). Forensic fraud. ANDI.
- Kristanti, O., & Kuntadi, C. (2023). Literature review: Pengaruh audit forensik, audit investigatif, dan kompetensi auditor terhadap pengungkapan fraud. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.1, No.(3), 840–848. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.295>
- Kumaat, A. R. (2011). Audit forensik: Penanggulangan fraud di perusahaan.
- Larasati, D., Andreas, A., & Rofika, R. (2020). Teknik audit investigatif, pengalaman dan profesionalisme auditor pada pengungkapan kecurangan: Kecerdasan spiritual sebaga pemoderasi. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(1), 149–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.31258/jc.1.1.150-169>
- Leavy, P. (2020). The oxford handbook of qualitative research.
- Lestari, R. N. (2024). Pengaruh kompetensi auditor , professional skepticism , dan time budget pressure terhadap pengungkapan fraud dengan kecerdasan emosional sebagai variabel moderasi (studi empiris pada bpk ri perwakilan provinsi yogyakarta). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49759%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/am/handle/123456789/49759/20312258.pdf?sequence=1>
- Luthans, F. (2015). Organizational behavior an evidence-based approach.
- Mahsitah, I. S., & Mahmudi, M. (2021). Pengaruh sikap auditor, pengalaman audit investigatif, whistleblowing dan gender terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. *NCAF : Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3, 219–226. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art19>
- Maria, E., & Gudono. (2017). Empirical test of fraud triangle theory on local government (evidence from Indonesia). *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(4), 233–248.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal ilmiah kesehatan masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Miles, M. B., & Michael, H. A. (1994). Qualitative data analysis. In *CEUR Workshop Proceedings* (Vol. 1304).
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi penelitian kualitatif.
- Muna, K., & Meutia, T. (2024). Efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan ditinjau dari independensi dan penerapan teknik audit berbantuan komputer (TABK). *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 250–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i2.1786>

- Narendra, A. B. (2014). Laporan audit investigasi sebagai bukti.
- Oktavian, A., Priyono, N., & Suryatimur, K. P. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal (studi kasus pada kantor pusat bpkp). *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3366–3375. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i8.1408>
- Poerwadarminta, W. (2006). Kamus umum bahasa indonesia (3rd ed.). Balai Pustaka.
- Pradnyawati, N. P. (2019). Pengaruh kemampuan auditor investigatif dan pengalaman auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan (studi pada perwakilan bpkp provinsi bali).
- Prasetya, A., Afrizal, & Putra, W. E. (2023). Skeptisme profesional sebagai variabel intervening hubungan kompetensi auditor, tekanan waktu dan keahlian forensik terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 249–272. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.16913>
- Purba, S. F., & Nuryatno, M. (2019). Kecerdasan emosional sebagai pemoderasi pengaruh skeptisme profesional, independensi, time pressure, locus of control terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 325–344. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5495>
- Pusdiklatwas. (2008). Fraud auditing.
- Raharjo, T. P., Djaddang, S., & Supriyadi, E. (2020). Peran kode etik atas pengaruh akuntansi forensik, audit investigatif dan data mining terhadap pendeteksian dugaan tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 219–234. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1677>
- Rahayu, N. K. S., & Suryanawa, I. K. (2020). Pengaruh independensi, profesionalisme, skeptisme profesional, etika profesi dan gender pada kap di bali. 3, 686–698. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i03.p11>
- Rahmayani, L. (2014). Pengaruh kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, teknik audit dan whistleblower terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(2).
- Rasyid, F. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif dan kuantitatif. In *Nadi Pustaka Offset*.
- Richards, L. (1999). Using NVIVO in qualitative research. SAGE. <https://archive.org/details/usngnvivoqual0000rich>
- Rini, W. A. S. (2022). Peran Kode Etik Dalam Pencegahan Fraud Pada Auditor Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Studi Pada Bpk Ri Perwakilan Jawa Timur). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/abis.v9i2.65892>
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Marnisah, L. (2022). Etika kerja, profesionalisme, dan gaya kepemimpinan: Hubungannya terhadap kinerja auditor intern di badan inspektorat kota kupang. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 783–798. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2479>

- S. Lincoln, Y., & G. Guba, E. (1985). *Naturalistic Inquiry* (1st ed.). Calif.: Sage Publications.
https://books.google.co.id/books?hl=id&id=2oA9aWlNeooC&printsec=frontcover&utm_source=chatgpt.com#v=onepage&q&f=false
- Sari, N. Z. M., & Susanto, A. (2018). The effect of auditor competency and work experience on information systems Audit quality and supply chain (case study: Indonesian Bank). *International Journal of Supply Chain Management*, 7(5), 747–750.
- Saridewi, F., Lannai, D., Bakri, A., Pramukti, A., & Subhan, S. (2022). Pengaruh kompetensi, skeptisme profesional dan pengalaman auditor terhadap pengungkapan fraud. *Center of Economic Students Journal*, 5(1), 74–85.
<https://doi.org/10.56750/csej.v5i1.67>
- Siahaan, I. F. M., & Suryaningrum, D. H. (2024). Prosedur audit investigasi dalam mengungkap tindakan fraud di pt xyz oleh kap jas. *Small Business Accounting Management and Entrepreneurship Review*, 4(2), 24–34.
<https://doi.org/10.61656/sbamer.v4i2.223>
- SPAP. (2001). SA Seksi 210 Pelatihan dan keahlian auditor independen. In *Standar Profesional Akuntan Publik* (Issue 04).
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi forensik & audit investigatif* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Tuanakotta, T. M. (2016). *Akuntansi forensik dan audit Investigatif*.
- Ulimsyah, M., Mursalim, M., Su, M., & Hajering, A. (2021). Point of view research accounting and auditing whistleblowing 's effectiveness in preventing fraud through forensic audit and investigative audit. 2(January), 81–91.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47090/povraa.v2i1.116>
- Wahab, M. R. A. (2020). Pengembangan kompetensi auditor pemerintah bidang investigasi (studi kasus pada perwakilan bpkp daerah istimewa yogyakarta). In *Handbook of Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention*.
- Wicaksono, P. (2025). Mantan bupati sleman sri purnomo jadi tersangka korupsi dana hibah pariwisata. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/mantan-bupati-sleman-sri-purnomo-jadi-tersangka-korupsi-dana-hibah-pariwisata-2074805>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Informan	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1. Informan 1	1. Apakah kompetensi auditor mempengaruhi efektivitas pengungkapan <i>fraud</i> pada bidang investigasi perwakilan BPKP DIY?	1. Bagaimana proses evaluasi kritis yang Anda lakukan terhadap bukti-bukti audit untuk memastikan kesimpulan yang diambil valid dan dapat dipertanggungjawabkan? Siapa yang memverifikasi evaluasi tersebut dan bagaimana tindak lanjutnya bila bukti dinilai lemah? 2. Untuk saat ini di BPKP DIY pengembangan kompetensi apa yang sudah dijalankan sampai saat ini? Khusus auditor investigasi 3. Persyaratan untuk mengikuti/mengambil kompetensi auditor itu apa saja, dan ada yang terkhususkan untuk auditor di bidang ini atau tidak? 4. Kalau keahlian dari pihak bpkp khususnya di bidang investigasi harus seperti apa? Apakah hanya keuangan saja atau perlu keahlian dalam hukum juga?

		5. Teknik-teknik investigatif apa yang Anda perhatikan dan terapkan dalam memperoleh bukti? Dapatkah Anda menjelaskan prosesnya? Bagaimana Anda memilih teknik yang tepat untuk tiap jenis bukti?
	2. Apakah prosedur audit mempengaruhi efektivitas pengungkapan <i>fraud</i> pada bidang investigasi perwakilan BPKP DIY?	1. Dalam konteks penanganan dugaan <i>fraud</i> atau korupsi, dapat Anda jelaskan dari mana BPKP DIY biasanya memperoleh informasi awal terkait indikasi <i>fraud</i>? Bagaimana alur penerimaan informasi tersebut, baik yang berasal dari permintaan instansi, laporan masyarakat, maupun sumber lainnya? 2. Setelah informasi awal diterima, seperti apa prosedur penelaahan awal dan mekanisme pembentukan tim audit investigatif? Berapa jumlah minimal dan maksimal auditor dalam satu tim yang ditetapkan? 3. Selain itu, dalam penyusunan tim, apakah para auditor umumnya memiliki latar

		belakang pendidikan serta kompetensi yang serupa, atau justru disusun dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda sesuai kebutuhan penugasan? 4. Apakah dari semua pengaduan itu akan diproses semua atau ada yang difilter? 5. Bagaimana proses Anda dalam meminta informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada auditee? Bagaimana cara memastikan informasi tersebut valid dan dapat dipercaya? 6. Selama proses investigasi berlangsung itu apakah menemui kendala-kendala? Kalau untuk sampai saat ini, kira-kira ada perbaikan-perbaikan atau evaluasi tidak yang dilakukan oleh perwakilan yang nantinya juga di ajukan ke pusat?
	3. Apakah etika auditor mempengaruhi efektivitas pengungkapan <i>fraud</i> pada bidang	1. Bagaimana Anda menerapkan sikap objektif ketika menghadapi kasus atau audit yang sensitif?

	investigasi perwakilan BPKP DIY?	2. Menurut Anda, bagaimana perilaku profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan? 3. Bisakah Anda menceritakan bagaimana Anda menjaga sikap profesional apabila menghadapi intimidasi atau tekanan dari pihak tertentu yang berupaya mempengaruhi pendapat Anda? 4. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga agar laporan audit Anda bebas dari pengaruh pihak manapun yang ingin mempengaruhi fakta yang harus dilaporkan?
2. Informan 2	1. Apakah kompetensi auditor mempengaruhi efektivitas pengungkapan <i>fraud</i> pada bidang investigasi perwakilan BPKP DIY?	1. Dalam praktik investigasi, bagaimana Anda mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)? Beri contoh penerapannya pada kasus tertentu. Apakah ada kesulitan atau kekurangan pelaksanaan ketentuan UU tersebut di lapangan? 2. Sejauh mana pengetahuan Anda tentang undang-undang dan peraturan yang berkaitan memengaruhi langkah-langkah

		investigasi? Apakah ada momen ketika pemahaman hukum menentukan keputusan penting dalam penyidikan? 3. Kalau keahlian dari pihak bpkp khususnya di bidang investigasi harus seperti apa? Apakah hanya keuangan saja atau perlu keahlian dalam hukum juga? 4. Teknik-teknik investigatif apa yang Anda perhatikan dan terapkan dalam memperoleh bukti? Dapatkah Anda menjelaskan prosesnya? Bagaimana Anda memilih teknik yang tepat untuk tiap jenis bukti? 5. Kemudian pada saat proses investigasi kira-kira ada tidak yang pada saat proses investigasi ini merasa sulit sekali, karna mungkin saat terjun di lapangan ternyata kompetensinya tidak sesuai? BPKP sendiri menyikapi kendala-kendala itu, seperti apa?
	2. Apakah prosedur audit mempengaruhi	1. Dalam konteks penanganan dugaan <i>fraud</i> atau korupsi, dapat Anda jelaskan dari mana

	efektivitas pengungkapan <i>fraud</i> pada bidang investigasi perwakilan BPKP DIY?	BPKP DIY biasanya memperoleh informasi awal terkait indikasi <i>fraud</i>? Bagaimana alur penerimaan informasi tersebut, baik yang berasal dari permintaan instansi, laporan masyarakat, maupun sumber lainnya? 2. Setelah informasi awal diterima, seperti apa prosedur penelaahan awal dan mekanisme pembentukan tim audit investigatif? Berapa jumlah minimal dan maksimal auditor dalam satu tim yang ditetapkan? 3. Selain itu, dalam penyusunan tim, apakah para auditor umumnya memiliki latar belakang pendidikan serta kompetensi yang serupa, atau justru disusun dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda sesuai kebutuhan penugasan? 4. Anda disini sebagai pengendali teknis tugasnya apa saja? 5. Bagaimana cara mengetahui motif-motif orang dalam melakukan tindakan korupsi?
--	---	---

		Bagaimana membuktikan bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana? 6. Apakah dari semua pengaduan itu masuk ke proses persidangan? Jika tidak maka langsung tidak diperkarakan atau bagaimana? Ada tidak kasus yang diberhentikan di pertengahan jalan? 7. Bagaimana proses pemantauan yang dilakukan BPKP terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan kepada penegak hukum? Apakah Anda terlibat dalam proses tersebut? 8. Kira-kira ada tidak kendala-kendala dalam penanganan kasus korupsi?
	3. Apakah etika auditor mempengaruhi efektivitas pengungkapan <i>fraud</i> pada bidang investigasi perwakilan BPKP DIY?	1. Bagaimana Anda menerapkan sikap objektif ketika menghadapi kasus atau audit yang sensitif? 2. Saat menghadapi perbedaan kepentingan dalam audit, bagaimana Anda menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan keputusan yang tepat?

		3. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit sudah sesuai dengan standar teknis yang berlaku? 4. Dalam pengalaman Anda, bagaimana sikap tegas membantu Anda dalam memperoleh bukti audit yang diperlukan?
3. Informan 3	1. Apakah kompetensi auditor mempengaruhi efektivitas pengungkapan <i>fraud</i> pada bidang investigasi perwakilan BPKP DIY?	1. Setelah menemukan beberapa bukti, bagaimana Anda memelihara sikap kritis sehingga tidak mudah mempercayai pernyataan tersangka? Berikan contohnya. Langkah konfirmasi apa yang biasa Anda lakukan? 2. Seberapa sering Anda menganalisis kasus-kasus sebelumnya untuk menambah wawasan menghadapi kasus baru? Contoh apa yang paling berharga? Bagaimana hasil analisis itu dipakai dalam perencanaan investigasi selanjutnya? 3. Sejauh mana Anda memahami aspek cybercrime dan teknologi informasi yang relevan dengan kasus yang ditangani? Bisa

		ceritakan pengalaman spesifik? Apakah ada kebutuhan pelatihan TI tertentu yang menurut Anda penting? 4. Jika Anda tidak memiliki keahlian TI yang cukup, bagaimana prosedur Anda melibatkan tenaga ahli TI? Bagaimana koordinasinya berjalan? Bagaimana Anda memastikan kualitas kerja dan independensi tenaga ahli tersebut? 5. Bagaimana Anda memastikan rekan tim mengerti setiap instruksi atau penjelasan yang Anda sampaikan selama pemeriksaan? Strategi komunikasi apa yang digunakan apabila ada miskomunikasi?
	2. Apakah prosedur audit mempengaruhi efektivitas pengungkapan <i>fraud</i> pada bidang investigasi	1. Biasanya pada saat melakukan investigasi, apakah ada model-model investigasi tertentu yang di terapkan dalam proses investigasi? 2. Selama proses investigasi berlangsung itu apakah menemui kendala-kendala? Kalau untuk sampai saat ini,

	perwakilan BPKP DIY?	kira-kira ada perbaikan-perbaikan atau evaluasi atau tidak yang dilakukan oleh perwakilan yang nantinya juga di ajukan ke pusat? 3. Ada standar urutan prosedur audit atau tidak untuk melakukan sebuah audit investigatif? 4. apakah ada juga yang dilaporkan muncul potensi penyimpangan namun tidak sampai merugikan negara? Jika ada lalu langkah selanjutnya yang dilakukan pihak bpkp ketika ada hal tersebut? 5. Dalam pelaksanaan audit investigatif, bagaimana anda mengembangkan teknik-teknik audit agar sesuai dengan kebutuhan kasus? Teknik apa yang paling efektif menurut pengalaman anda? 6. Bagaimana anda melakukan pemeriksaan dokumen, termasuk dokumen yang diolah atau disimpan secara elektronik? Apa tantangan yang
--	---------------------------------	---

		biasa ditemui terkait bukti digital?
	3. Apakah etika auditor mempengaruhi efektivitas pengungkapan <i>fraud</i> pada bidang investigasi perwakilan BPKP DIY?	1. Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda bertanggung jawab atas laporan hasil audit yang Anda susun? 2. Menurut Anda, bagaimana perilaku profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan? 3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, apa yang Anda lakukan untuk memastikan pekerjaan Anda bebas dari usaha atau arahan manajemen auditee yang ingin menentukan kegiatan yang diperiksa? 4. Apa langkah yang Anda ambil untuk tetap waspada terhadap risiko signifikan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemeriksaan? 5. Dalam pengalaman Anda, bagaimana sikap tegas membantu Anda dalam memperoleh bukti audit yang diperlukan?
4. Informan 4	1. Apakah kompetensi	1. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana kemampuan teknik

	auditor mempengaruhi efektivitas pengungkapan <i>fraud</i> pada bidang investigasi perwakilan BPKP DIY?	audit yang Anda miliki membantu Anda melaksanakan prosedur audit dengan hati-hati dan akurat? 2. Sejauh mana Anda memahami aspek cybercrime dan teknologi informasi yang relevan dengan kasus yang ditangani? Bisa ceritakan pengalaman spesifik? Apakah ada kebutuhan pelatihan TI tertentu yang menurut Anda penting? 3. Jika Anda tidak memiliki keahlian TI yang cukup, bagaimana prosedur Anda melibatkan tenaga ahli TI? Bagaimana koordinasinya berjalan? Bagaimana Anda memastikan kualitas kerja dan independensi tenaga ahli tersebut? 4. Bagaimana pengalaman Anda selama bekerja sebagai auditor berperan dalam meningkatkan ketepatan, ketelitian, atau kecepatan dalam mengungkap <i>fraud</i>? Adakah pengalaman tertentu yang sangat membentuk kemampuan investigatif Anda?
--	--	---

	2. Apakah prosedur audit mempengaruhi efektivitas pengungkapan <i>fraud</i> pada bidang investigasi perwakilan BPKP DIY?	1. Dalam proses investigasi, tentu ada bukti-bukti yang mendukung yang menentukan. Dalam proses investigasi sendiri mechanism dalam pengumpulan bukti itu seperti apa? Dari bukti-bukti itu yang diterima oleh tim, apakah itu di konfirmasi pada pelaku, calon pelaku ataukah di konfirmasi dulu ke ketua tim untuk di diskusikan? 2. Ada standar urutan prosedur audit atau tidak untuk melakukan sebuah audit investigatif? 3. Proses dalam audit investigatif itu ada apa saja dan urutannya bagaimana? 4. Dalam menjalankan proses audit, apakah BPKP pernah kolaborasi dengan instansi lain seperti BPK atau KAP? Jika ada apakah prosedur yang diterapkan tetap sama atau ada penyesuaian? 5. Bagaimana Anda memastikan laporan hasil audit investigasi dapat disusun dan diselesaikan
--	---	---

		tepat waktu? Apa kendala terbesar dalam proses tersebut?
	3. Apakah etika auditor mempengaruhi efektivitas pengungkapan <i>fraud</i> pada bidang investigasi perwakilan BPKP DIY?	1. Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda bertanggung jawab atas laporan hasil audit yang Anda susun? 2. Menurut Anda, apa saja hal yang harus diperhatikan agar hasil audit benar-benar berkualitas dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan? 3. Bagaimana Anda menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugas audit? 4. Bagaimana Anda memastikan bahwa penyusunan program audit dilakukan tanpa intervensi, termasuk dari pimpinan? 5. Setelah menemukan beberapa bukti, bagaimana Anda memelihara sikap kritis sehingga tidak mudah mempercayai pernyataan tersangka? Langkah konfirmasi apa yang biasa Anda lakukan?
5. Informan	1. Apakah kompetensi	1. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana kemampuan teknik

5	auditor mempengaruhi efektivitas pengungkapan <i>fraud</i> pada bidang investigasi perwakilan BPKP DIY?	audit yang Anda miliki membantu Anda melaksanakan prosedur audit dengan hati-hati dan akurat? 2. Seberapa sering Anda menganalisis kasus-kasus sebelumnya untuk menambah wawasan menghadapi kasus baru? Contoh apa yang paling berharga? Bagaimana hasil analisis itu dipakai dalam perencanaan investigasi selanjutnya? 3. Menurut Anda, bagaimana pendidikan formal yang pernah ditempuh berkontribusi terhadap kemampuan Anda dalam melakukan audit yang baik? Adakah konsep atau materi tertentu yang sangat membantu dalam praktik? 4. Selain pendidikan formal, pelatihan atau kursus apa saja yang menurut Anda paling meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan audit investigatif? Bagaimana pelatihan tersebut memengaruhi kinerja Anda?
---	--	--

		5. Untuk saat ini di BPKP DIY pengembangan kompetensi apa yang sudah dijalankan sampai saat ini? Khusus auditor investigasi. Kalau di BPKP sendiri memberikan keleluasaan atau tidak untuk auditornya memilih mana saja kompetensi yang nanti mereka ingin ikuti?
	2. Apakah prosedur audit mempengaruhi efektivitas pengungkapan <i>fraud</i> pada bidang investigasi perwakilan BPKP DIY?	1. Mungkin dari setelah banyaknya bukti yang diterima atau didapatkan oleh tim investigasi itu, selanjutnya untuk menentukan pelaku atau tersangka itu mekanisme nya seperti apa? Kemudian nanti pelaporannya pelaporannya kemana? 2. Selama proses investigasi berlangsung itu apakah menemui kendala-kendala? Kalau untuk sampai saat ini, kira-kira ada perbaikan-perbaikan atau evaluasi atau tidak yang dilakukan oleh perwakilan yang nantinya juga di ajukan ke pusat? 3. Dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk memulai audit?

		Bagaimana jika ada kekurangan berkas yang disiapkan oleh pihak yang diinvestigasi, apakah auditor masih bisa melanjutkan proses auditnya? 4. Isi laporan investigasi itu ada apa saja? 5. Ada standar urutan prosedur audit atau tidak untuk melakukan sebuah audit investigatif?
	3. Apakah etika auditor mempengaruhi efektivitas pengungkapan <i>fraud</i> pada bidang investigasi perwakilan BPKP DIY?	1. Menurut Anda, apa saja hal yang harus diperhatikan agar hasil audit benar-benar berkualitas dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan? 2. Bagaimana Anda menerapkan skeptisisme profesional, khususnya dalam menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya terhadap pernyataan atau bukti yang diperoleh? 3. Apa bentuk kehati-hatian yang Anda terapkan agar hasil audit tetap berkualitas? 4. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan

		audit sudah sesuai dengan standar teknis yang berlaku? 5. Bagaimana Anda memastikan bahwa penyusunan program audit dilakukan tanpa intervensi, termasuk dari pimpinan?
--	--	--

LAMPIRAN 2 Framework Matrices Kompetensi Auditor

<u>Narasumber</u>	<u>A. RM 1: Kompetensi Auditor terhadap Efektivitas Pengungkapan Fraud</u>	<u>B: Pendidikan & Diklat</u>	<u>C: Pengalaman & Keahlian Teknis</u>	<u>D: Pemahaman Hukum & Dampak terhadap Efektivitas</u>
<u>Informan 1</u>	Kompetensi diperoleh dari pendidikan, diklat, dan pengalaman penugasan	<u>Seluruh pegawai diperintahkan mengikuti diklat basic, intermediate, dan advanced.</u>	Pengalaman ini dari penugasan... belum pernah audit PKKN ya magang di situ... semuanya lihat sana biar punya pengalaman.	Pengetahuan hukum sebaiknya dikuasai karena semua penugasan di sini beririsan dengan hukum
<u>Informan 2</u>	Kompetensi auditor investigasi berbeda dengan auditor biasa dan harus lebih spesifik	-	Harus punya pemahaman tentang prosedur dan teknik audit investigasi yang berbeda dengan audit biasa	Harus paham hukum pidana dan hukum acara pidana karena bukti menurut audit dengan bukti menurut hukum itu berbeda... tujuan audit investigasi digunakan di pengadilan.
<u>Informan 3</u>	Kompetensi bertambah melalui pengalaman dan perkembangan teknologi audit	-	Semakin kita banyak pekerjaan itu semakin tahu peraturan, metode, dan beberapa pengetahuan lain.	Kita belum bisa menilai metadata dokumen... harusnya auditor punya tools seperti itu... ini mempengaruhi pengungkapan fraud.
<u>Informan 4</u>	Kompetensi membentuk insting dalam menemukan fraud	-	Kita pelajari dulu kasusnya... kita klarifikasi satu per satu saksi... dari situ insting fraudnya jadi.	Tidak hanya menghitung kerugian tetapi menggali fakta melalui klarifikasi sehingga manipulasi data bisa terungkap.
<u>Informan 5</u>	Diklat dan pembelajaran mandiri meningkatkan kualitas audit	Ada diklat prajab, audit investigatif, dan MOOC... jadi direfresh kembali biar ngeriain tugasnya lebih bagus.	Adanya kasus baru itu menambah wawasan.	Menambah pengetahuan dan insight sehingga pelaksanaan audit lebih efektif.

LAMPIRAN 3 Framework Matrices Prosedur Audit

Narasumber	A : RM 2 Prosedur Audit terhadap Efektivitas Pengungkapan Fraud	B : Langkah Kerja & Pedoman Audit	C : Teknik Pengumpulan Bukti & Klarifikasi	D : Dampak terhadap Efektivitas Pengungkapan Fraud
Informan 1	Prosedur audit dilakukan berdasarkan tahapan penugasan dan ekspose kasus.	Prosedur dimulai dari pengumpulan dan analisis informasi awal untuk menentukan kelayakan kasus, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan audit (penyusunan desain, kebutuhan SDM, anggaran, dan tim), penerbitan surat tugas, pelaksanaan audit, hingga penyusunan laporan hasil audit.	Bukti bisa bersumber dari bukti primer dan sekunder.	Prosedur yang sistematis membantu menentukan jenis audit yang tepat sehingga pengungkapan fraud lebih efektif
Informan 2	Prosedur audit investigatif berbeda dengan audit biasa	Prosedur dimulai dari pengembangan informasi awal yang bersumber dari hasil audit, pengaduan, atau permintaan aparat, kemudian ditelaah untuk	Kalau investigasi harus panggil, wawancara satu-satu... cara perolehan bukti harus sesuai hukum acara pidana.	Bukti yang diperoleh sesuai hukum dapat digunakan dalam proses pengadilan
		menilai adanya penyimpangan, potensi kerugian negara, kelengkapan data, dan kemungkinan pembuktian; hanya kasus yang memenuhi kriteria tersebut yang ditindaklanjuti ke audit investigatif.		
Informan 3	Prosedur audit dimulai dengan PIA	Sebelum kita masuk pekerjaan itu di penilaian PIA itu Kami screening dulu	Kita belum sampai melihat metadata dokumen... masih tradisional dalam mengolah data.	Keterbatasan teknik digital mempengaruhi efektivitas pengungkapan fraud modern
Informan 4	Prosedur audit dimulai dari identifikasi pedoman dan permintaan data	Sebelum mengaudit kita menentukan langkah kerja... lihat pedoman... permintaan data... periksa dokumen.	Semua saksi yang di BAP kejaksaan diklarifikasi lagi dalam BAK... menggali satu per satu.	Klarifikasi ulang mampu mengungkap manipulasi data dan kredit fiktif
Informan 5	Prosedur audit diperoleh melalui penelitian terkait	Penelitian informasi awal, ada perencanaan, ada	Harus cukup dan memadai REKOCUMA.	Prosedur yang dipahami dengan baik membuat
	informasi awal	pelaksanaan, ada penjaminan kualitas, sama pelaporan, terus tindak lanjut	Kalau kurang harus nyari data lagi sampai datanya ketemu	pelaksanaan audit lebih efektif

LAMPIRAN 4 Framework Matrices Etika Auditor

<u>Narasumber</u>	<u>A : RM 3 Etika Auditor terhadap Efektivitas Pengungkapan Fraud</u>	<u>B : Integritas & Objektivitas</u>	<u>C : Profesionalisme</u>	<u>D : Dampak terhadap Efektivitas Pengungkapan Fraud</u>
<u>Informan 1</u>	Auditor harus menjaga profesionalisme dan kode etik	Semua harus berperilaku profesional... ada kemampuan, kode etik, dan standar.	Kalau ada benturan kepentingan auditor harus diganti.	Hasil audit menjadi dapat dipercaya dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu
<u>Informan 2</u>	<u>Objektivitas dalam memperoleh bukti</u>	<u>Objektivitas auditor dijaga dengan bekerja berdasarkan analisis proses dan bukti, bukan asumsi atau praduga, serta menggunakan komunikasi yang persuasif dan menghargai auditee agar mereka terbuka dalam memberikan data. Auditor tidak boleh memvonis atau menyudutkan pihak yang diperiksa karena hal tersebut</u>	<u>Independensi auditor ditunjukkan dengan bekerja berdasarkan analisis kebutuhan audit dan bukti yang diperoleh, bukan asumsi atau praduga, serta tidak memaksakan auditee dalam memberikan keterangan. Auditor menggunakan komunikasi yang</u>	<u>Bukti yang objektif memperkuat pembuktian fraud</u>
		<u> justru menghambat pengungkapan fakta, sehingga sikap profesional dan pendekatan yang netral menjadi kunci agar hasil audit tetap objektif meskipun tidak semua indikasi penyimpangan dapat dibuktikan.</u>	<u>persuasif dan menghargai auditee agar informasi diberikan secara sukarela, tanpa memvonis atau menyudutkan pihak yang diperiksa. Dengan cara tersebut auditor tetap berada pada posisi netral, tidak terpengaruh kepentingan pihak lain, dan kesimpulan yang dihasilkan murni berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan.</u>	
<u>Informan 3</u>	<u>Auditor harus selalu objektif.</u>	<u>Objektivitas dilakukan dengan tidak membiarkan perlakuan auditee, baik yang menyenangkan maupun tidak, memengaruhi hasil audit, misalnya terkait fasilitas atau jamuan.</u>	<u>Profesionalisme auditor ditunjukkan dengan mematuhi pedoman dan etika agar kualitas audit tetap sesuai standar dan laporan tidak menjadi substandar.</u>	<u>Penggunaan data yang benar menjaga kualitas hasil audit</u>

		Auditor tetap menjaga profesionalitas dengan membatasi penerimaan hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menjaga jarak bila sudah mengarah ke hal yang tidak wajar. Selain itu, selama pelaksanaan audit tidak ada intervensi dari pihak auditee karena citra lembaga yang sudah baik membuat auditor dapat menyampaikan hasil secara independen.		
Informan 4	Auditor menggali fakta berdasarkan bukti bukan asumsi	Selama menjalankan tugas tidak pernah ada intervensi dari pimpinan yang memengaruhi proses maupun hasil audit, sehingga auditor dapat	Auditor menegaskan bahwa data sensitif harus dijaga kerahasiaannya sesuai kode etik dan tidak dibagikan di luar tim audit.	Pengungkapan fraud berdasarkan fakta yang valid
		bekerja secara independen dan tetap menjaga objektivitas sesuai dengan ketentuan profesional.		
Informan 5	Etika profesional dijaga melalui pelaksanaan tugas sesuai standar	Tidak terdapat bentuk intervensi yang mengganggu objektivitas auditor di BPKP, sehingga pelaksanaan audit tetap berjalan secara netral dan hasil yang dihasilkan tetap berdasarkan kondisi yang sebenarnya.	-	Pelaksanaan audit sesuai standar meningkatkan kualitas hasil

LAMPIRAN 5 Transkrip Wawancara 1

Jabatan/Posisi : Auditor Madya

Waktu : Senin, 22 Desember 2025

Pewawancara : Saya izin wawancara terkait kompetensi auditor, prosedur audit, sama etika auditor ya, Pak, untuk penelitian skripsi.

Informan 1 : Terakhirnya apa tadi?

Pewawancara : Etika audit.

Informan 1 : Etika

Pewawancara : ya. Ee untuk yang pertama, Pak, untuk di BPKP sendiri, pengembangan kompetensi apa yang sudah dijalankan sampai saat ini, Pak, khususnya di bidang investigasi?

Informan 1 : Untuk pengembangan kompetensi, ya. Satu, diklat. Kalau ee tentang kompetensi itu kan ada tiga, tiga sumber. Satu dari pendidikan. Sarjaba apa, gitu kan. Yang kedua, dari kediklatan. Dari kediklatan ini, seluruh pegawai diperintahkan untuk mengikuti diklat. Basic, intermediate, dan advanced. Yang basic dan intermediate, yang basic umumnya sudah, sudah, yang intermediate sebagian. Yang advanced sebagian juga. Dan sebagian-sebagian lagi semuanya sudah dari basic sampai advanced, dulu, sebelum di klaster. Banyak yang sudah,

Pewawancara : Oh, kriterianya apa aja, tuh, Pak?

Informan 1 : Hah?

Pewawancara : Kriterianya untuk masing-masing tingkatan, tuh, apa aja?

Informan 1 : Sebenarnya ya enggak pakai kriteria. Ya, kriterianya ya biasanya kalau mau intermediate, berarti yang pernah basic dulu. kalau mau advance, sebaiknya yang

sudah ee basic dan intermediate kan sudah bertahap. Ya. Terus sumber yang ketiga adalah dari pengalaman. Nah, pengalaman ini dari penugasan. Diberi tugas, kemudian ada yang ya saya belum pernah, ini belum pernah audit PKKN, ya dia magang di situ. Terus, saya kemudian belum pernah memberikan keterangan ahli di persidangan, ya kemarin ada ee memberikan keterangan ahli di persidangan. Ee semuanya lihat sana, biar ee apa punya pengalaman melihat. Dari situ kan belajar juga. Terus, ada namanya pelatihan program pelatihan mandiri dan program pelatihan mandiri ini sebenarnya setiap expose adalah pelatihan. Karena di dalam expose kasus di situ di uraikan suatu kasus, duduk duduk perkaranya apa. Terus diuraikan penyimpangannya, ee penyebabnya, modusnya dan segala macamnya akan diuraikan di situ. Karena kan untuk ditindaklanjuti atau tidak dilanjutkan dengan ee pengawasan. Pengawasannya, nanti akan dipilih. Apakah nanti audit tujuan tertentu, ee audit investigatif atau audit penghitungan kerugian keuangan negara, atau bahkan langsung pemberian keterangan ahli. Ya.

Pewawancara : Jadi, sambil belajar, ya, Pak?

Informan 1 : Hah?

Pewawancara : Jadi, kalau ikut ekspos itu sambil belajar?

Informan 1 : Ya, ekspos itu ya sambil belajar karena semuanya pasti akan di lakukan pembahasan kasus itu akan dibahas tuntas. Ya, sampai tuntas. Kalau enggak tuntas, pasti akan ada lanjutannya untuk telaah lebih lanjut.

Pewawancara : Kalau untuk ee pelatihan atau kompetensi tadi itu tuh, Pak, ee Auditor, apa mengambil, ada persyaratan enggak, sih, Pak, untuk mengambil kayak diklatnya atau yang lain-lainnya?

Informan 1 : Oh, untuk diklat, ada. Pegawai yang sudah auditor dulu. Ya. Nanti yang yang mengikuti diklat itu, biasanya itu, persyaratannya kalau ikut yang intermediate, sebaiknya sudah ikut ee basic-nya dulu. Nah, sekarang, mungkin yang bisa dipertanyakan adalah yang boleh ikut basic siapa? Yang ikut diklat basic adalah semua auditor.

Pewawancara : Oh, berarti diwajibkan, ya, Pak?

Informan 1 : Wajib. Baik, yang auditor pertama, auditor muda, auditor ee apa namanya auditor pelaksana boleh ikut. Ee, berarti auditor Kalau yang bukan auditor sia-sia, karena apa? Karena tidak akan diberi tugas.

Pewawancara : Oh, gitu.

Informan 1 : Iya, enggak akan diberi tugas

Pewawancara : Kalau yang intermediate, Pak?

Informan 1 : Ya, sama saja, sama saja, ya, seperti itu. persyaratannya seperti itu. Paling nanti persyaratannya adalah yang umurnya, nah.

Pewawancara : Berarti ada batasan umur, ya, Pak?

Informan 1 : Ya?

Pewawancara : Berarti ada batasan umurnya?

Informan 1 : Iya. Setahun menjelang pensiun enggak usah diklat. Sudah tidak akan diberi penugasan untuk pemberian keterangan ahli.

Pewawancara : Kalau untuk keahlian di auditor yang khususnya, khususnya untuk di auditor investigasi, tuh, ada enggak, sih, Pak, keahlian khusus yang harus dipunyai?

Informan 1 : Keahlian khusus. Ya, auditing dan auditing. Ya.

Pewawancara : Untuk ee selain

Informan 1 : Tetapi auditing, itu, bukan berarti dia harus ee apa, sarjana akuntansi, enggak.

Pewawancara : Oh, enggak.

Informan 1 : Enggak. Dia teknik, hukum boleh.

Pewawancara : Oh, bisa, Pak?

Informan 1 : Bisa. Statistik, juga boleh.

Pewawancara : Oh, gitu.

Informan 1 : Ya.

Pewawancara : Ada, tapi ada persyaratan khususnya, enggak, sih, Pak? Kalau misalnya dari, selain sarjana yang berkaitan dengan audit, gitu, Pak, ada tes.

Informan 1 : Syaratnya dia sudah jadi auditor. Iya, auditor saja, ya. Auditor, silakan.

Pewawancara : Kalau ee kalau di sini kan, ee investigasi, ya, Pak. Ada keahlian hukum, enggak, sih, Pak, yang diharuskan, Pak, selain keahlian keuangan?

Informan 1 : Hukum. Pengetahuan hukum sebaiknya dikuasai karena semua penugasan di sini, beririsan dengan hukum. Maka sebaiknya, pemahaman akan hukum harusnya dapat. Dan itu, silahkan belajar sendiri.

Pewawancara : Berarti tidak ada pelatihan khususnya, ya, Pak?

Informan 1 : Pelatihan ya. Ya, Itu tadi. Dari ekspose juga di diberikan pemahaman tentang hukum, di diklat pun ada pemahaman tentang hukum. Ada materi hukumnya. Bahkan tahun tertentu ada pendidikan yang namanya, matrikulasi hukum.

Pewawancara : Apa itu, Pak?

Informan 1 : Hah?

Pewawancara : Apa itu?

Informan 1 : Ya, artinya memberikan upgrade pengetahuan hukumnya. Seperti kuliah yang dipadatkan.

Pewawancara : Oh, gitu.

Informan 1 : Ya.

Pewawancara : Kalau untuk memperoleh bukti sendiri itu, ada teknik-tekniknya, enggak, sih, Pak?

Informan 1 : Memperoleh bukti sendiri, gimana maksudnya?

Pewawancara : Untuk memperoleh bukti-bukti dari setiap kasus, gitu.

Informan 1 : Setiap kasus. Setiap audit investigasi, bukti itu harus diperoleh sendiri. Tim harus mencari bukti sendiri, menggali, meminta, mendapatkan.

Pewawancara : berarti ada teknik-teknik teknik tersendiri,

Informan 1 : ya. Kalau mencari bukti itu kan ya, tekniknya, umum saja. Bukti apa, siapa yang punya kewenangan untuk mengeluarkan bukti, ambil bukti dari sana, bukti primernya. Siapa yang punya kewenangan mengeluarkan itu? Ya. Dan dari sumber-sumber yang primer yang memang punya kompetensi untuk mengeluarkan atau memberikan.

Pewawancara : Kalau untuk bukti, itu sendiri bisa dinilai enggak, sih, Pak? Ada kuat atau bukti lemah yang lemah, gitu?

Informan 1 : Ada. Ada bukti primer, ada bukti sekunder. Ya. Bukti primer itu yang bukti yang memang ee dari sumber, sumber aslinya. Kalau bukti sekunder, itu bukti yang sudah diolah, yang sudah ee apa namanya? Tidak dari ee produsen yang memproduksi bukti itu. Sehingga kalau kita ngambil sumber dari BPS, ya, BPS itu sekunder.

Pewawancara : Oh, gitu.

Informan 1 : Iya.

Pewawancara : Berarti kalau bukti yang sudah didapatkan sama auditor itu, sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan, ya, Pak?

Informan 1 : Begini, auditor harus memperoleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi, bukti yang diperoleh oleh auditor, nah, bisa, ini bisa dipertanggungjawabkan, enggak? Nah, ada klasifikasinya, agak beda, ya. Bukan berarti bukti yang diperoleh oleh auditor pasti bisa dipertanggungjawabkan. Auditor harus mengevaluasi, apakah bukti ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Makanya kalau sudah dievaluasi oleh auditor, nah, bukti itu, berarti sudah sudah terklasifikasi, ini dapat dipertanggungjawabkan, ini tidak, ini relevan, ini tidak. Nah, yang tidak relevan ya. Tidak di, iya. bisa di singkirkan

Pewawancara : Untuk proses evaluasi itu, seperti apa, Pak?

Informan 1 : Proses evaluasinya itu pertama, kompetensinya. Kompetensi bukti itu bisa dipercaya enggak, siapa, sih, yang mengeluarkan? Misalnya, kalau SPJ, ya, tanyanya ke ke keuangan. Bukti ini bener enggak, valid enggak? Terus, ya, apa? Ini benar bukti yang kami keluarkan tidak, kalau dia bilang tidak, oh, berarti ini diragukan, karena mestinya dari dia, gitu. misalnya, kita mau melihat ee, progres fisik suatu pekerjaan, kita harus nanyanya ke proyek itu. Oke, dikasih, misalnya, stafnya, ngasih. Dikasih Ini harus tau si, ke pimpinan proyek situ, ee, apakah ini benar seperti ini,, klarifikasi. Oke, oh, ya, memang segitu. Terus, ke pelaksananya, ditanyakan juga seperti ini, kah, oh, ya, ini benar ya, tanda tangan kamu, memang seperti ini, berarti hasil ini betul, ya, betul, betul. Nanti di Setelah diuji, betul dari itu, maka ini sudah saya pegang, ya, ini ee, apa, bukti pertanggungjawaban realisasi fisiknya. Nah, setelah itu, bukti tadi diuji di lapangan. Benarkah di lapangannya memang seperti itu? Nah. Kalau ee di lapangannya berbeda, berarti ada ketidakcocokan. Tapi kalau udah oh, benar, oh, berarti bukti dapat dipegang. Lapornya, oh, iya, enggak ada penyimpangan. Tapi kalau ini bukan lapangannya beda. Bukti itu, tetap bukti yang relevan, dapat dipercaya, tetapi tidak sesuai dengan fisiknya. Maka jadilah itu penyimpangan. Ya, gitu. Oke. Ya.

Pewawancara : Kalau dalam konteks penanganan *fraud* sendiri itu, Pak, itu biasanya informasi yang didapatkan dari BPKP itu, dari mana, Pak?

Informan 1 : Satu, dari penyidik. Penyidik yang minta audit ke sini, dia harus membawa bukti. Informasi itu dibawa oleh penyidik. Kalau BPKP minta tolong dilakukan audit investigasi atas kasus ini, maka itu menjadi sumber informasi untuk melakukan audit. Yang kedua, dari pimpinan institusi. Yang menjadi objek pengawasan. Misalnya, dari perusahaan, misalnya PT apa disini, apa, biasanya. Oh, dari PDAM. PDAM datang ke sini minta audit investigasi untuk kasus yang pimpinan PDAM merasa di institusinya ada kasus. Tolong dong, diaudit kasus ini, di, di institusiku, Ya. Kepala dinas juga boleh, kepala dinas minta audit investigasi untuk kasus yang ada di institusinya. Boleh. Itu yang kedua, ya?

Pewawancara : Iya. Kedua.

Informan 1 : Yang ketiga adalah pengembangan dari hasil pengawasan yang dilakukan. Misalnya di bidang lain melakukan audit, ee, kami, melakukan ee audit atas kegiatan MBG, makan bergizi gratis. Wah, ini enggak benar di sini. Ini dilaporkan ke bidang kami kan. Bidang kami melihat, oh iya, ini perlu didalami. Maka bidang kami bisa perintahkan untuk melakukan audit investigasi. Sudah tiga, ya?

Pewawancara : Iya.

Informan 1 : Pengembangan, terus dari data mining, artinya teman-teman di sini ngumpulin data untuk melakukan audit eh melakukan eh pengumpulan data untuk suatu kasus. Berdasarkan pengumpulan data itu ternyata, oh, ini memang layak untuk dilakukan investigasi. Itu Namanya dari data mining atau pengumpulan data yang dilakukan sendiri oleh bidang investigasi. Dan yang berikutnya adalah dari pengaduan masyarakat. Kalau ada masyarakat yang mengadu. Ditelaah ee seberapa kuat ee apa, kemungkinan ada tidaknya suatu kasus. Kalau kita kuat untuk didalami, kita bisa melakukan investigasi.

Pewawancara : Oh. Berarti ditelaah dulu ya, Pak?

Informan 1 : Ya, semua, semua tadi harus dilakukan penelaahan awal.

Pewawancara : Oh, prosedurnya kayak gimana tuh, Pak?

Informan 1 : Disebut juga pengembangan informasi awal. Teman-teman bilanganya PIA, pengembangan informasi awal. Prosedurnya yaitu dari menggali semua informasi sumber informasi. Ya, kalau dari penyidik tadi ya, mereka diundang suruh expose. Memenuhi krrriteria tidak. Begitu juga ya, permintaan dari eh, kepala institusi maupun yang ee, dari hasil pengawasan, bidang lain. Nah, itu semuanya tetap dilakukan pengembangan informasi awal, layak tidak untuk ditindaklanjuti dengan prosedur investigasi. Jika memenuhi kriteria, Bisa dilanjutkan.

Pewawancara : Kalau ee, setelah penelaahan itu ternyata kriteria memenuhi dan perlu diaudit, Pak?

Informan 1 : Heeh.

Pewawancara : Ee, itu selanjutnya ada pembentukan tim atau gimana, Pak?

Informan 1 : Ya, selanjutnya namanya proses perencanaan. Perencanaan itu membuat desain pengawasannya, bagaimana itu kita mau melakukan auditnya. Terus, berapa kebutuhan tenaga, kebutuhan anggaran, butuh tenaga ahli yang lain atau tidak. Semuanya diatur, dibuat di perencanaan. Kalau sudah perencanaan, termasuk timnya. Timnya siapa saja ini yang ee, punya kompetensi untuk melakukan audit. Nah, kalau itu semuanya sudah di selesai buat perencanaan, lanjut ke surat tugas. Melakukan audit. Setelah melakukan audit, buat laporan. Setelah buat laporan, nanti direkomendasikan kepada siapa? Apakah kepada penyidik, kepada kepala institusinya untuk dilakukan tindak lanjut namanya. tindak lanjutnya itu Ee, berupa, satu, kalau ada kerugian keuangan negara pemulihan kerugian keuangan negara. Misalnya, "Hei, ini ada kerugian negara sekian juta." Kalau memang kembalikan, kembalikan, pemulihan itu. Terus yang kedua adalah dilakukan perbaikan sistem pengendalian, supaya hal itu tidak terjadi lagi. Iya. Terus kalau sudah seperti itu, masih ada satu lagi. Apakah perlu disanksi atau tidak, gitu kan,

Pewawancara : Untuk menilai itu perlu diberi sanksi atau tidak, gimana, Pak?

Informan 1 : Ya itu pertimbangan pimpinan

Pewawancara : Oh, iya. Oke

Informan 1 : Termasuk juga pertimbangan objeknya juga. Terhadap sanksi administratif, ataukah pidana? Kalau administratif, artinya, pimpinnan itu mau bisa memberikan surat peringatan, ee, surat peringatan. Apakah nanti diberikan hukuman ringan sedang atau berat. Kalau sudah keterlaluan, oh, mungkin ini harus pidana, ya sudah serahkan ke aparaturnya penegak hukum. Ya.

Pewawancara : Ee, balik lagi, Pak, untuk tadi pembentukan tim. Itu ee, dalam membentuk penyusunan tim itu ada hal yang untuk melatarbelakangi, enggak sih, Pak?

Informan 1 : Oh, iya. Dalam satu tim. harus ada yang benar-benar kompeten untuk melakukan audit investigasi. Tidak seluruhnya, tetapi satu tim itu menjadi mampu. Ya. Oh, ini ketua timnya sudah berpengalaman, sudah diklat, nah. Ya, bisa diutamakan. Oke. Ya, lanjut.

Pewawancara : Iya, Ee, berarti ee, satu tim itu tuh saling melengkapi.

Informan 1 : Saling melengkapi, ya. Jadi, kemampuan itu adalah kemampuan tim. Bukan seluruh individu harus mampu, enggak. Tapi tim itu mampu. Jadi bisa, yang mampu pada ketua, anggota, bisa. Tetapi tidak seluruhnya harus mampu. Tapi secara keseluruhan, secara tim mampu timnya. Ya, makanya ada yang, "Pak, aku belum pernah." Ya udah, kamu magang dulu di sini. Yang magang kan namanya belum pernah. Berarti kemampuannya kurang, to?

Pewawancara : Iya.

Informan 1 : Iya. Nanti, dia bisa dimagangkan di situ, biar mampu. Ya.

Pewawancara : Kalau selama proses investigasi berlangsung itu ada ditemukan kendala-kendala enggak sih, Pak?

Informan 1 : Ya, banyak kendalanya. Cuma ada kendala yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Kendala yang tidak signifikan misalnya, saya minta data ke sini enggak dapat. Misalnya, ee, dulu kasus, saya punya ada kasus itu kasus bea cukai ke kantor bea cukainya, bea cukai data yang tersedia, "enggak ada cuma ini". Padahal, kejadiannya itu, padahal itu 3 tahun. 3 tahun, itu mestinya banyak sekali data yang bisa disaksikan. Tapi dia tidak bisa memberikan data itu karena data itu ya sudah lewat, hilang, sudah buang, selesai, buang.

Pewawancara : Oh

Informan 1 : Ah, enggak, ini kebetulan, karena yang berkasus itu, bukan tidak semua, tidak semua begitu. Hanya karena yang berkasus itu seperti itu. Kenapa, dibuang? Ya sudah, memang supaya enggak terlacak, kan? Iya. Apakah kita harus berhenti di situ? Enggak, saya bilang ke kawan penyidiknya, kami kami katakan. Data itu kan tidak hanya selembat. Ada data yang diterima, yang disimpan, diarsipkan oleh bea cukai, tapi perusahaan yang lewat, dia juga punya. Sekarang di situ ada 5 perusahaan yang ee, apa namanya, biasa ber, ber apa namanya, berurusan dengan bea cukai di situ. Masa sih dari 5, kelima-limanya juga seperti itu? Saya berharap ada salah satu, salah 2, atau salah 3, syukur-syukur semuanya yang punya salinannya. Benar saja, dapat 2 perusahaan yang punya salinan ee, apa punya administrasi tertib. Itu bisa diambil. Data tidak harus semuanya dari satu tempat. Bisa jadi, data itu tersebar, artinya, di sini enggak dapat di

tempat lain bisa dapat. Jadi, jangan berhenti karena enggak ada data situ. Itu kan kendala juga. Tetapi ada alternatif yang lain. Ya.

Pewawancara : Berarti dipastikan ada alternatifnya, ya, Pak?

Informan 1 : Iya, kita, kita harus kreatif mencari data itu.

Pewawancara : Jadi, harus kritis juga, ya, Pak?

Informan 1 : Ya, itu sudah harus.

Pewawancara : Terus ee, bagaimana, bapak, untuk menerapkan sikap objektif ketika menghadapi kasus atau audit yang sensitif, Pak?

Informan 1 : Semua di sini semua kasus sensitif, sebenarnya. Jadi, kalau objektivitas, ya, kita semuanya memang dididik untuk objektif. Kalau ada di antara anggota tim yang tidak bisa objektif, dia harus melapor. Melaporkan ke kami, ke atasannya. Kalau saya tidak objektif di situ. Dan itu bisa diganti. Misalnya, saya enggak bisa objektif di situ, kenapa? Karena itu ee, di institusi itu ada saudara saya. Jadi saya enggak bisa kalau suruh objektif di depan saudara saya. Saya akan, taruh lah saya bisa objektif, orang akan melihat itu tidak objektif. Kenapa? Karena bersaudara, “alah, pemeriksanya masih saudaranya, enggak akan objektif.” Itu namanya objectivity in appearance. Objektivitas yang nampak. Kalau masih bersaudara, enggak bisa objektif. Orang akan nilai seperti itu, walaupun, faktanya, dia bisa tetap objektif. Bisa. Itu salah memang salah, oke salah. Tapi karena masih bersaudara akan dinilai tidak objektif. Betul enggak?

Pewawancara : Iya.

Informan 1 : Nah, yang seperti itu harus lapor dan perlu diganti. Gitu.

Pewawancara : Oh, kalau, berarti kalau setiap tim audit, saat ketika mau terjun gitu, Pak, mau mengaudit perusahaan, itu dicek enggak, Pak?

Informan 1 : Oh, iya harus dicek. Bahkan di awal suatu tahun. waktu itu ada mutase ee, mutasi di awal tahun rolling. Semua harus mencantumkan, ee melaporkan punya saudara di instansi mana saja. Sehingga dia tidak akan ditugasi ke untuk investigatif ke

instansi tersebut. Karena ada penugasan yang “Oh enggak masalah kalau memberikan konsultasi ke sana.” Memberikan konsultasi kan tidak butuh objektivitas. Yang penting dia memberikan materi benar. Tapi kalau investigasi. Ya itu tadi, ada yang namanya objektivitas in appearance dan in fact. In appearance-nya itu ya kalau masih saudara jangan. Walaupun faktanya masih bisa objektif. Tadi masih berhubungan saudara ya, ada hubungan saudara ya. Yang kedua, hubungan pertemanan pun. afiliasi juga bisa mengganggu penilaian objektivitas. Kenapa? “Lah dia teman mancing saya, hampir tiap akhir minggu kami pergi mancing bareng, satu klub.” Nah, kalau satu klub, kamu enggak akan objektif ke sana. In appearance-nya. Enggak baik. Sebaiknya, tidak ditugaskan. Gitu. Itu yang harus dijaga, ya.

Pewawancara : Eee berarti itu semua harus terdeteksi ya, Pak, objektivitasnya. Siapa yang diaudit dan siapa yang mengaudit, Pak?

Informan 1 : Iya. Makanya ee di awal tahun, umumnya harus mengumumkan di instansi mana saja punya

Pewawancara : Saudara, keluarga?

Informan 1 : Iya. Iya, benturan kepentingan. masih saudara, afiliasi.

Pewawancara : Berarti teman juga termasuk ya, Pak?

Informan 1 : Teman, ya bisa saja. Taruhlah waktu ee apa, waktu melakukan, waktu ditugasi dia belum tahu di sana ada siapa. Eh, begitu dia masuk, lah mantan pacar ada di situ. Mana masih ada rasa lagi. Nah, itu boleh melapor. “Pak, saya enggak bisa mengaudit itu.”, “Kenapa?”, “Yang saya audit adalah mantan pacar saya, dan saya masih suka sama dia. Walaupun sudah putus gitu. jadi saya enggak bisa ya.” Ya sudah, ganti.

Pewawancara : Oh. Langsung diganti, ya?

Informan 1 : Iya, boleh diganti. Iya, ganti.

Pewawancara : Terus menurut bapak sendiri bagaimana perilaku profesional auditor itu berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan, Pak?

Informan 1 : Ya, kalau kualitas. Tadi apa pertanyaannya? Kualitas auditor?

Pewawancara : Iya, Perilaku profesional. Berpengaruh?

Informan 1 : Iya, semua harus berperilaku profesional. Yang nggak profesional, ya, nanti hasilnya enggak bagus. Harus profesional. Dan profesional itu ya, seperti itu tadi. Ada, selain kemampuan, ada kode etik-nya, ada standar yang harus dipenuhi.

Pewawancara : Heeh. Ya. Terus untuk selama bapak bekerja gitu, Pak, jadi auditor investigasi, pernah nggak, Pak, ee mendapatkan intimidasi atau tekanan dari pihak tertentu, Pak?

Informan 1 : Pernah.

Pewawancara : Oh, pernah?

Informan 1 : Ya.

Pewawancara : Oh, terus untuk menjaga sikap profesionalnya gimana, Pak?

Informan 1 : Ya, kita sampaikan, kita sampaikan saja. Jadi, ada LSM, waktu itu ada LSM. Waktu saya datang membawa kasus. Kasus itu selain diadukan ke BPKP, diadukan ke Polda. Akhirnya Polda pun minta audit ke kami. Nah, terus ke lapangan nih. Begitu sudah sampai di lapangan, sudah, ee LSM, bukan LSM masyarakat setempat, "Pak, sebelum melakukan audit kita bikin acara adat dulu. Saya sudah menyiapkan ayam hitam." Nanti di acara adat itu di, apa namanya, semacam di apa, semacam disumpah kali ya. Kalau tim BPKP buat salah, tim akan celaka. Tapi kalau tim benar enggak akan ada celaka. Nah, itu di masyarakat adat Dayak di sana, di pedalaman. "Gimana? Berani datang enggak ke acara adat itu?" Saya enggak bilang berani, atau enggak berani, tapi gini, "hei, kami datang melaksanakan tugas. Kalau saudara-saudara mau mendukung usaha ini, usaha audit ini supaya benar, bukan begitu caranya. Nah, saya usulkan gini, ee, silakan Anda secara adat mendoakan, supaya mendoakan, mendukung kami supaya kami bisa melaksanakan tugas ini dengan benar. Yang kami butuhkan itu, supaya kami melakukan secara benar. Jadi, kalau kami mau macam-macam, kami akan diingatkan supaya kembali lagi ke benar. Tapi jangan dicelakai kami." Akhirnya acara adat itu enggak jadi dilaksanakan. Terus setelah selesai audit, ee ketua LSM-nya datang, "Pak, berapa nilai

kerugiannya?" "Sekian." Saya bilang, "nilainya sekian." "Kalau segitu itu terlalu kecil, kami curiga ke Bapak." "Pak, saya jawab, kami melakukan menghitung adalah dengan cara metode yang benar. Saya bilang, menurut hitungan kami, ahli kami itu kerugiannya sekitar 75%. Kalau hitungan bapak cuma 60-an persen." "Brarti saya curiga nih. Jadi, saya curiga." "Silakan, Bapak, curiga." "tetapi itu adalah ahli yang Bapak tunjuk. Ini ahli ini ahli yang ditunjuk, kami tunjuk. Kami itu BPKP dan Polda. Itu juga kompeten loh, punya kompetensi yang baik juga. Jadi yang kami utamakan adalah hitungannya benar. Bukan besarnya berapa besar kerugian yang bisa ditemukan, bukan. Hitungan kerugiannya yang benar, segini. Ada standar. Ada standarnya. Ya nggak papa, ya sudah. Tapi saya tetap, saya bilang, tetap. Tetap enggak percaya juga nggak apa-apa. Tetapi daripada saya mengikuti hitungan Bapak, tapi nggak benar, itu semuanya nanti sia-sia. Tapi dengan cara ini, hitungan segini, Tapi ini yang benar, nggak ada sia-sianya." Jadi, kami berikan pengertian seperti itu. Iya. Ya sudah. Eh, ngotot-ngototan gitu, ya, enggak apa-apa. Cuma ini hitungan yang benar menurut kami segini, ya sudah. Enggak bisa dibesar-besarin. Ya sudah. Kami beda pendapat enggak apa-apa, beda pendapat. Nanti ya di pengadilan. Terus, di kasus yang lain yang dia juga ada, datang, minta tolong. "Pak, bisa dikecilin atau dinolkan enggak kerugiannya?" Kasus yang lain, "karena itu ini masih kawan kita" gitu. Ya, saya sampaikan, "Pak, kemarin Bapak untuk kasus yang ini Bapak minta digedein. Saya enggak mau, to. Tapi, begitu juga untuk mengecil-ngecilkan kami juga enggak bisa. Karena apa? Standar kami adalah yang mana hitungan yang paling benar." Jadi, dia pernah minta digede-gedein. minta dikecil-kecilin enggak bisa, hitungannya itu enggak kayak gitu, mana yang sesuai standar benar. Benar, ya dipertahankan. Terus di kasus yang, yang itu juga apa yang lain, ya. Jadi, pemberi keterangan ahli di pengadilan itu masuk ruangan, dilempari dengan beras kuning. Byar, byar.

Pewawancara : Sama siapa, Pak?

Informan 1 : Hah?

Pewawancara : Sama?

Informan 1 : Sama orang-orang pendukung terdakwa. Itu juga bentuk intimidasi. Hanya kebetulan bukan saya, kawan saya. Dan dilaporkan, ke pimpinan kami. "Oh, ya.

Enggak papa” terus, terus dia minta keterangan ahli, kasian kan. “Gimana?” “Hei, kami tadi dilempari beras kuning.” “Oke, nggak apa-apa.” “dia ditanya. Gimana, kamu, Enggak apa-apa kan?” “Enggak apa-apa.” Seminggu lewat, Enggak apa-apa. “Kalau kamu waktu memberikan keterangan ahli tidak tulus. artinya ada, ya, enggak benar gitu. Saya khawatir, tapi ini ini waktu udah lewat, jadi kamu udah aman. Soalnya kamu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak tulus, sebelum tanggal berakhir, atau hari berakhir, sebelum seminggu, kamu akan kehilangan alat kelamin.”

Pewawancara : Oh, gitu ya, Pak?

Informan 1 : Tapi dibuka setelah lewat. Jadi keadaannya nggak stres kan, karena nggak tahu. Tapi pimpinan kami tahu karena dia kan diskusi dengan ee orang-orang adatliah. Itu juga intimidasi.

Pewawancara : Berarti kalau ada perbedaan pendapat dengan yang diaudit kayak gitu, tetap

Informan 1 : Ya enggak apa-apa, kita harus sesuai dengan mana yang sebenarnya yang sesuai standar.

Pewawancara : Jadi, nanti yang menentukan salah atau tidak dari aparat penegak hukumnya, Pak?

Informan 1 : Yang menentukan benar atau salah adalah majelis hakim.

Pewawancara : Oh, majelis hakim.

Informan 1 : Iya. Apa kami sampaikan ya yang benar atau salah itu majelis hakim.

Pewawancara : Oh gitu.

Informan 1 : Bisa juga hitungan auditor dianggap tidak sesuai ya enggak apa-apa terserah majelis hakim.

Pewawancara : Oh, bisa, Pak?

Informan 1 : Bisa. Majelis hakim boleh sepakat, boleh tidak sepakat. Dialah yang menentukan.

Pewawancara : Oh, langkah selanjutnya kalau tidak disepakati gimana, Pak?

Informan 1 : Ya enggak apa-apa, majelis hakim menentukannya sendiri. Misalnya ini loh. Misalnya tim bilang, "Ini total loss, bangunan ini ee tidak ada manfaatnya, sehingga total loss, kerugiannya seluruhnya." Tapi majelis hakim bilang, "Enggak, itu enggak total loss." "Kenapa?" "Itu ee apa, pondasinya itu, walaupun ini rusak semuanya, pondasinya itu masih bisa dilanjutkan. Pondasinya harusnya masih dihitung tidak rugi karena di atas pondasi itu masih bisa didirikan yang baik, pondasinya baik." Boleh aja seperti itu. Silahkan kalau majelis hakim, beranggapan seperti itu. Iya. Tetapi, menurut ahli kami, yang kita kan pakai ahli teknis juga. Ahli teknis kami mengatakan, "Itu tidak berfungsi dan membahayakan malahan. Sehingga total loss" "Tapi majelis hakim boleh tidak sependapat"

Pewawancara : Lalu untuk prosedur audit investigasi itu berbeda ya, Pak, sama audit biasa, Pak?

Informan 1 : Ya, ada beberapa perbedaan. Tentu saja ee lebih lebih serius, lebih dalam. Termasuk tidak boleh sampling, tapi populasi.

Pewawancara : Ee itu ee prosedurnya itu dilakukannya,urut? Harus urut atau gimana, Pak?

Informan 1 : Prosedur itu ya ada yang bisa harus ee secara desain harus urut. Desainnya. Tapi kadang-kadang ya gimana, orangnya enggak ada, ya orang tidak selalu bisa semuanya mulus. Tapi ada yang bisa dilompat-lompat, ada yang sebaiknya tidak dilompat. Jadi, ada yang bisa dipertukarkan, ada yang tidak. Dan sebaiknya, buat yang harus itu harusnya ini yang terakhir, gitu. Tapi untuk informasi awal kebetulan di awal dia sudah ditanya duluan. Tidak terlalu dalam, tapi ee secara umum dulu. Boleh, dalamnya nanti setelah

Pewawancara : Oh, itu mempengaruhi hasilnya enggak, Pak? Mempengaruhi hasil akhirnya enggak?

Informan 1 : Justru karena itu mempengaruhi hasil akhir makanya diurutan, ada yang tidak boleh di skip tunggu dulu, ini dulu sampai selesai baru yang ini. Karena hasil akhirnya, supaya hasil akhirnya lebih akurat. Gitu. Biasanya calon terdakwa itu taruh yang terakhir setelah kami mengumpulkan seluruh informasi. Baru ke calon terdakwa. Kita sudah punya informasi sehingga begitu dia berkelit, kita sudah tahu nih dia akan seperti itu. Menurut informasi ini gini, oh ya dia enggak bisa berkelit lagi. Kalau kita langsung ke dia, dia berkelit, kita baru nyari yang lainnya, ee kita bisa kalah cepat. Dia bisa nge-set. “Oh, kalau seperti itu kita set orang-orang yang ini yang berikutnya.” Kita kira kehilangan momen. Itu Namanya stratrgi

Pewawancara : Ada enggak sih, Pak, yang yang sulit, Pak.

Informan 1 : Hmm?

Pewawancara : Ee yang pihak yang diaudit sulit untuk diajak kerja sama gitu?

Informan 1 : Wah, iya, iya, umumnya begitu. Makanya harus pakai strategi. Enggak ada orang yang mau dituduh ini enggak berkelit itu enggak. Semuanya ya berkelit semuanya berusaha ee apa namanya?

Pewawancara : Defend ya pak?

Informan 1 : Iyalah. Orang mau ibaratnya orang mau diancam penjara masa mau diam aja. Enggak ada itu, umumnya berusaha untuk berkelit. Makanya perlu strategi untuk menggali informasi.

Pewawancara : Iya, Pak. Baik, Pak, sudah cukup.

Informan 1 : Cukup?

Pewawancara : Cukup. Sebelumnya, Pak, bapak sudah berapa lama di BPKP? 39 tahun.

Informan 1 : 39 tahun.

LAMPIRAN 6 Transkrip Wawancara 2

Jabatan/Posisi : Auditor Madya

Waktu : Jum'at, 19 Desember 2025

Informan 2 : Iya. Saya tidak bisa membedakan. Kan pertanyaan apakah seorang auditor investigasi selain mempunyai pemahaman tentang ee keuangan, audit keuangan kan juga harus punya pemahaman, apakah harus punya pemahaman tentang hukum, ya?

Pewawancara : Iya, benar.

Informan 2 : Iya. Jadi, sebenarnya, begini. Jadi, ada yang disebut dengan kompetensi umum dan kompetensi. Jadi, gini. Auditor secara umum itu punya kemampuan yang sama. Dia harus paham tentang tata kelola. Dia harus paham tentang pengendalian dan dia harus paham tentang manajemen risiko. Itu semua auditor harus punya. Nah, khusus audit investigasi. Termasuk di dalam tata kelola pun, keuangan ya. Kan, Mbak Ini secara spesifiknya buat keuangan, sebetulnya tentang audit keuangan dan kita harus paham tentang tata kelola keuangan negara. Kita harus paham tentang tata kelola keuangan daerah, kabupaten dan kota provinsi sama, sama kita harus paham tata kelola keuangan desa.

Pewawancara : Heem.

Informan 2 : Nah, terus selain tata kelola keuangan itu, itu pemahaman tentang di dalam ee bidang keuangan. Tetapi di luar itu, seorang auditor investigasi harus punya pemahaman tentang prosedur dan teknik-teknik audit investigasi yang berbeda dengan audit-audit biasa. Mmm. Nah, untuk bisa melakukan pemahaman, melakukan mengetahui tentang prosedur dan teknik-teknik audit di bidang investigasi, seorang auditor investigasi juga dituntut dia harus punya pemahaman tentang hukum pidana, dasar-dasar hukum pidana, kemudian harus punya pemahaman tentang hukum acara pidana dan juga harus punya pemahaman ee tentang spesifiknya audit investigasi. Misal, ee teknik wawancara.

Misalnya begini, teknik ya, kita bicara prosedur audit lakukan klarifikasi. Klarifikasi ini bisa macam-macam. Bisa dengan klarifikasi tertulis. Kita berkirim surat, menanyakan apakah kalau di audit keuangan, "Betul enggak Anda punya utang kepada PT ini sebesar sekian?" Gitu, kan. Dia akan jawab itu, klarifikasi, ya. Tetapi bisa juga klarifikasi kita datang dan melakukan wawancara langsung. Mmm. Itu juga klarifikasi. Jadi, prosedur auditnya klarifikasi, teknik auditnya bisa dengan teknik klarifikasi melalui surat, Mmm. kita biasanya buat konfirmasi, Heem. "Betulkah Anda punya utang segini?" Bisa juga kita konfirmasi datang, kita konfirmasi secara lisan, kemudian hasil hasilnya dituangkan dalam catatan auditor.

Pewawancara : Heem.

Informan 2 : Itu juga konfirmasi. Iya. Tetapi klarifikasi yang dilakukan dengan cara konfirmasi. Tetapi klarifikasi juga bisa kita datang, memanggil orang, mau wawancara orang. Nah, kalau di audit keuangan biasanya manggil orang dan mau wawancara itu tidak dilakukan. Nah, begitu. Nah, terus kita juga harus punya pemahaman tentang tadi saya sudah bilang, hukum acara pidana. Iya. Hukum acara pidana itu mengatur bagaimana cara memproses sebuah kasus. Polisi tugasnya apa, kewenangannya apa, cara memprosesnya begini bagaimana, nanti jaksa cara memprosesnya begi- itu hukum acara lah.

Pewawancara : Heem.

Informan 2 : Bagaimana cara pembuktian, gitu, lho. Nah, karena, kenapa itu harus dipahami? Itu karena bukti menurut audit dengan bukti menurut hukum itu berbeda. Gitu.

Pewawancara : Apa itu Pak perbedaannya?

Informan 2 : Ee, bukti di dalam hukum itu ada lima: bukti surat, bukti keterangan saksi, bukti keterangan terdakwa, terdakwa itu pelaku,

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : yang ketiga, bukti petunjuk, yang kelima, bukti keterangan ahli. Nah, sedangkan bukti-bukti di dalam audit itu banyak, jauh lebih banyak.

Pewawancara : Oh.

Informan 2 : Jadi, kalau kita melakukan audit investigasi, kita harus juga belajar bukti menurut hukum. yang berbeda dengan bukti menurut audit. Dan bukti menurut hukum ini cara perolehannya lebih ketat daripada menurut audit. Jadi, kalau misalnya di audit ada bukti teknik, misalnya observasi. di hukum enggak ada, itu teknik observasi enggak berguna, enggak berlaku. Jadi, kita mau melihat efek. Misal, Mbak lagi periksa parkir gitu, ya pendapatan parkir. Mbak kan cukup duduk kayak nyamar, gitu. Ngeliatin aja itu. Ada motor parkir berapa di situ, orang yang bayar dikasih karcis apa enggak, kemudian ngecek data. Misalnya di jalan, misalnya di jalan Parangtritis dari lampu merah sana sampai lampu merah sini, tukang parkir ada 10, catat resminya. Cek Mbak, Mbak cek lapangan, itu kan namanya observasi.

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : Oh, ternyata tukang parkirnya bukan 10, ada 30. Nah, itu namanya observasi. Tetapi, kalau di dalam audit di dalam audit investigasi, kita melakukan mencari bukti sesuai dengan hukum acara enggak bisa cara observasi seperti itu. Jadi, ada itu ya kita panggil, kita wawancara, satu-satu, tanyain. "Betulkah anda tukang parkir? Anda kerja di sini atas perintahnya siapa? Pendapatannya itu masuk ke mana?" Kalau investigasi itu harus seperti itu. Kalau audit biasa cukup liatin aja. Hitung, "Oh, tukang parkir ada 30." Heem. Kalau investigasi, enggak bisa. Nah, karena cara cara teknik perolehan buktinya berbeda, maka seorang auditor investigasi itu juga harus paham hukum acara pidana. Nah, jadi tadi kembali pada pertanyaan bahwa selain audit keuangan, dia harus paham tadi tata kelola, aturan-aturan pengelolaan pe pengelolaan anggaran, tata cara pembelian barang pemerintah. Misalnya kita lagi mengaudit, misalnya ee dinas pertanian, ya kita harus paham bagaimana, "Apa sih yang dikerjakan dinas pertanian?" Nah, itu harus paham semua auditor. Tetapi khusus investigasi, dia harus paham teknik dan prosedur audit investigasi. Dan ada tambahan. Itu itu yang ditarik, dan harus ada tambahan dia harus paham tadi, cara perolehan bukti menurut hukum. Karena nanti tujuan audit investigasi digunakan di pengadilan, jadi caranya pun harus sesuai dengan cara yang diatur hukum. Itu intinya seperti itu.

Pewawancara : Kalau, berarti ee, kalau misalkan pemahaman tentang hukum itu tuh memengaruhi keputusan enggak, Pak?

Informan 2 : Pasti.

Pewawancara : Oh, pasti.

Informan 2 : Kalau dia tidak tahu caranya salah kan dia lakukan. Oh, iya. Misal, di dalam kita di dalam audit bisa saja kita memfoto diam-diam, bisa, kan. Kita foto, "Nih, tanggal sekian." Misal foto pakai GPS, kan, ada, Heeh. Tanggal sekian, tanggal ini ada tukang parkir foto satu-satu satu. Ada 30 padahal di daftar ada 10. Itu sudah menurut audit biasa itu sudah cukup. Mmm. Tapi menurut audit investigasi enggak bisa seperti itu.

Pewawancara : Makanya ada BAK itu ya, Pak?

Informan 2 : Iya. Harus panggilin satu-satu. "Anda siapa, lihat KTP-nya." Gitu. Kalau di audit biasa cukup foto-foto pakai metode observasi. Di investigasi tidak berlaku lagi metode observasi. Misalnya, contohnya itu. Ngobrol gini, kalau di audit biasa kan cukup ya.

Pewawancara : Heem.

Informan 2 : Nanya-nanya "Mbak, cari tukang parkir di sini perintahnya siapa?" Ngobrol biasa, Mbak enggak ngaku sebagai auditor, boleh.

Pewawancara : Oh, oh, bisa.

Informan 2 : Namanya observasi, sama dengan Intel, nyamar gitu. Bisa. Tetapi audit investigasi enggak boleh. Dipanggil, "Saya dari BPKP, saya auditor, saya tugas dalam rangka menghitung, misalnya, pendapatan parkir," nah, resmi. Kalau audit biasa enggak cukup, Nyamar aja. Yang penting ada foto. Lihat baju parkir. Nah, nanti kita tanyain ke dinas parkir, "Ini baju parkir dari siapa?" Eeh, dinas parkir bilang, "Kami enggak pernah membuat baju parkir, Pak. Nah, tuh, siapa itu?" Nah, contohnya seperti itu.

Pewawancara : Berarti kalau ee, misalkan ada wawancara sama saksi kayak gitu tuh harus ee terbuka, ya, Pak?

Informan 2 : Terbuka, kalau di investigasi harus terbuka.

Pewawancara : Dan ada batasan-batasan nya enggak, Pak?

Informan 2 : Batasan, kita mengacu pada batasan hukum, misalnya kita tidak boleh mengarahkan. Kita menghindari pertanyaan, ya, tidak

Pewawancara : Oh, gitu. Jadi, harus ada penjelasannya gitu?

Informan 2 : Iya.

Pewawancara : Mmm. Kalau untuk ee pengendali teknis sendiri itu tuh tugasnya apa saja, sih, Pak, gimana?

Informan 2 : Jadi, prosedurnya begini. Kalau ada penugasan, sebetulnya semua sama. maka ketua tim itu akan membuat rencana kerja audit, namanya program audit. Nah, program audit itu harus disetujui oleh pengendali teknis. Kenapa? Karena pengendali teknis berfungsi meyakinkan bahwa prosedur yang dilakukan sudah memenuhi standar. Jadi, menjamin bahwa prosedur yang dilakukan ini memang cocok untuk barang yang diaudit itu dan sudah memenuhi standar. Jadi, misalnya tadi kembali contoh tukang parkir, Mbak misalnya disuruh jadi ketua tim, Mbak kan bikin bikin rencana program kerja, kan? Pertama, Mbak pengen tahu daerah parkir di mana aja.

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : Mbak pengen tahu aturan parkir gimana, sih? Siapa yang boleh memungut, terus berapa jumlah yang dipungut, terus dari jumlah yang dipungut berapa setorkan kas daerah, berapa untuk tukang parkirnya. Mbak kan harus tahu semua. Nah, itu dibuat langkah kerjanya. Langkah kerja dibuat, terus nanti bagaimana cara mengetahui kebenaran, tadi melakukan observasi. Nah, itu disusun oleh ketua tim rencana itu, terus harus disetujui pengendali teknis. Kenapa, pengendali teknis bertugas untuk meyakinkan bahwa kalau ini dilakukan, maka kesimpulannya sudah memenuhi standar, sudah didukung bukti. Gitu. Jadi, tugas pengendali teknis memastikan bahwa prosedur yang dilakukan memang sudah pas, sudah pas dan sudah benar, dan cukup untuk menyimpulkan menarik sebuah simpulan. Jadi, tugas pengendali teknis lebih ke menjaga kualitas tadi.

Pewawancara : Heem. Kalau misalkan ternyata program yang dibuat sama ketua tim itu ee tidak sesuai gimana, Pak? Berarti, perbaikan, ya.

Informan 2 : Ya, kita diskusi lagi. Kita pelajari, ini, kan, misalnya misal program kerja auditnya ee lakukan, Mbak, menurut saya, tadi kembali ngecek ke tambang parkir, lakukan pengecekan. Nah, pengecekan, kan, parkir pagi, siang, malam, kan, beda. Ya, kan?

Pewawancara : Iya. Heem.

Informan 2 : Yang shift pagi ada, yang shift malam ada, terus jumlahnya juga berbeda, kan.

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : Nah, terus menilai, misal, pendapatan parkir. Pendapatan parkir di hari Minggu sama di hari biasa, kan, beda. Ada yang lebih ramai di hari Minggu, ada yang lebih ramai di hari kerja. Itu, kan. Nah, jadi, kalau menghitung berapa tukang parkir, ya, enggak bisa cuma pagi aja. Ya, pagi juga, malam iya. Terus harus dicek, pada hari kerja ada berapa orang, pada hari libur ada berapa orang, pagi ada berapa orang, malam berapa orang. Terus ini orang-orangnya sama, ya. Nah, itu, kan, harus buat perencanaan. Nah, kalau misalnya auditor, Mbak cuma nulis, "saya akan ngecek itu pada Selasa pagi sekali, terus," Selasa pagi. Pagi sama malam, kan, beda tukang parkirnya. Ada yang lebih ramai pagi, ada yang lebih ramai malam. Iya, kan?

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : Nah, tugasnya pengendali teknis, mengasih tahu. "Kalau kamu cuma begini aja, enggak cukup." "Kamu melakukannya enggak cukup hanya—" Nah, tugas pengendali teknis, kalau ada yang tidak pas tadi, didiskusikan dengan ketua tim untuk mengantisipasi kita salah membuat simpulan. Kalau kita berdasarkan hari kerja nih. Heem. Hari kerja tukang parkir di depan kantor-kantor, kan, penuh. Tapi kalau Sabtu Minggu, kan, tutup.

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : Iya. Nah, itu kalau ada perbedaan, itu harus didiskusikan. Kalau kondisinya begini, "Nah, gimana? Kalau kondisi begini bagaimana? Apa yang kita lakukan? Apakah ada penyesuaian? Dirubah prosedur auditnya atau bagaimana?" Jadi, kalau ada perbedaan, dikomunikasikan, dibicarakan dengan ketua tim.

Pewawancara : Oke, Pak. Terus, selanjutnya ee dalam penanganan dugaan *fraud* atau korupsi itu dapat ee Bapak jelaskan enggak? Dari mana BPKP itu biasanya memperoleh informasinya?

Informan 2 : Ya, jadi, itu namanya pengembangan informasi awal. Pengembangan informasi awal itu sumbernya ada tiga. Pertama dari laporan audit BPKP. karena audit biasa, oh, di situ ada penggelapan. Penggelapan itu misalnya, orang ngambil duit. barang-barang kantor diambil, nah, itu penggelapan. Nah intinya dia korupsi lah. Terus, nah, tahunya dari mana? Bisa dari orang hasil audit kita. tapi bisa juga ada orang ngadu. Ya, kan? Iya. Bikin pengaduan ke BPKP, bendahara ini kerjanya bikin masuk kuitansi. Tapi, bisa juga dari polisi dan jaksa. "Pak, ini ada kasus ini, BPKP masuk, dong," gitu. Jadi, sumbernya ada tiga tadi.

Pewawancara : Oh, berarti bisa personal ya, Pak. Dari personal masyarakat bisa, oh, itu bisa.

Informan 2 : Boleh, Heem.

Pewawancara : Oh, Setelah informasi awal diterima tadi, itu seperti apa Pak prosedur penelaahan awal dan mekanisme pembentukan tim auditnya?

Informan 2 : Ya, jadi, kalau prosedur itu, penelaahan itu sebetulnya untuk menentukan itu layak ditindaklanjuti dengan audit atau tidak. Itu tujuannya. Nah ada persyaratan, ada persyaratan keuangan. Kalau itu pengaduan, permintaan dari Kejaksaan atau dari polisi atau dari pemda, ya. Harus ada surat pernyataannya, terus ada potensi kerugian keuangan negara, terus ada penyimpangannya. Jadi, ada, substansinya ada penyimpangan, ada potensi kerugian keuangan negara. Itu.

Pewawancara : Iya. Lalu ee mekanisme pembentukan timnya gimana?

Informan 2 : Mekanisme pembentukan tim sebetulnya, tim itu harus kompeten secara tim, ya, bukan orang perorangan. Nah, pertama, bisa dia disesuaikan dengan keahliannya. Misalnya kemarin kita sudah mengaudit kasus pengadaan wifi, ya. Karena di sini yang sarjana komputer, Mbak. Mbak Azizah, Mbak Azizah ditugaskan. Jadi, kombinasi, kita harus memastikan bahwa kombinasi timnya, ketua tim dengan anggota tim, kalau disusun jadi tim yang kuat, yang dia cocok untuk mengaudit sebuah kondisi tertentu. Kalau audit pertanian, ya, kalau bisa orang yang paham pertanian. Kalau auditnya tentang, misalnya, tambang ya, paling enggak orang yang paham tentang jenis batu-batuan, kan, gitu. Jadi, pertimbangannya, yang mau kita periksa apa, industrinya seperti apa, nah, timnya yang kira-kira punya potensi untuk di situ siapa, nah.

Pewawancara : Oh, kalau misalkan ternyata enggak ada yang menguasai di bidang itu gimana, Pak?

Informan 2 : Ee, kalau ada, tidak ada yang ada yang tidak menguasainya. Bisa saja, jadi, kita melakukan audit hanya untuk membuktikan ada pelanggaran. Misalnya ada beli barang, betulkah barangnya datang? Tapi, kalau kualitas barangnya, kan, kita tidak tahu.

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : Yang tahu ahlinya, kan?

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : Nah, itu dia. Misal, Mbak mau mau melakukan audit atas pengadaan tank, misalnya. Kan susah juga tank gitu. Nah, paling enggak orang yang punya pemahaman tentang, "Bagaimana, sih, cara memesan tank?" Nanti, dia melakukan audit atau meyakinkan bahwa prosedur yang dilakukan, tahapan-tahapannya, sudah sesuai dengan aturannya.

Pewawancara : Iya. Berarti, diusahakan ada yang

Informan 2 : Komposisi. komposisi.

Pewawancara : Terus, dalam satu tim itu ada maksimal anggota timnya, enggak, sih, Pak? Atau minimalnya?

Informan 2 : Ee, sebetulnya disesuaikan dengan kondisi, tetapi kan kalau anggota timnya kebanyakan, kan, susah mengendalikan juga. Biasanya dibatasi maksimal 3-4 atau 5.

Pewawancara : Oh, maksimal 4.

Informan 2 : Tapi, jarang, biasanya hanya satu atau dua orang. Jadi, tergantung pada kompleksitasnya.

Pewawancara : Mmm. Terus, ee.

Informan 2 : Ini kompleksitas, tahu bayangannya enggak?

Pewawancara : Iya,

Informan 2 : ee Apa itu kompleksitas?

Pewawancara : Yang kompleks itu, kan, Pak?

Informan 2 : 2 kali 2 berapa?

Pewawancara : Empat.

Informan 2 : 3 kali 3?

Pewawancara : Sembilan.

Informan 2 : 247 kali 250 berapa? Kan, sama perkalian. Tapi, kan, lebih kompleks, karena variabelnya bertambah. Jadi, yang menentukan kompleks itu adalah variabel yang terlibat banyak atau tidak. Semakin banyak variabelnya, maka semakin berat bebannya sehingga timnya semakin banyak. Kalau bebannya ringan-ringan aja, ya, timnya satu dua juga cukup. Itu.

Pewawancara : Oh, oh, dua udah cukup, ya?

Informan 2 : Bisa. Ketua tim dengan anggota tim.

Pewawancara : Oh.

Informan 2 : Tapi, kalau audit enggak boleh sendiri, masalahnya. Harus dua minimal

Pewawancara : Kenapa itu, Pak?

Informan 2 : Ee, untuk memastikan pengendalian, kan. Ya, kalau enggak ada temannya, bisa dia malsu-malsu. Dia tidak melakukan pemeriksaan, ditulisnya sudah melakukan pemeriksaan. Padahal, dia nipu. Jadi, untuk ada sistem, mekanisme check and balance, dan untuk internal control juga. Kan, orang enggak paham semua masalah. Kalau ada temannya, kan, lumayan, ada teman diskusi.

Pewawancara : Iya, terus kalau ketua tim sama anggota tim kayak gitu tuh, pemilihannya gimana, Pak?

Informan 2 : Ee. Ya, pertama, kalau ketua tim yang diutamakan pasti dia sudah mempunyai sertifikasi auditor. Kalau belum, ya, enggak bisa. Kalau itu masalah legalitas, kan? Sama dengan polisi, orang razia itu bisa siapa saja, tapi kalau razia lalu lintas, harus oleh polisi. Enggak bisa misalnya preman atau satpam, satpol PP memeriksa, enggak bisa. Pertama, ada memastikan bahwa dia punya, memang sudah menduduki jabatan auditor. Itu diupayakan orang yang punya pengalaman. Kalau enggak punya-punya pengalaman, misalnya orang itu biasa audit pertanian, Tahu-tahu disuruh audit bank, dia Jadi ketua tim, pasti susah. bahkan, kalau dia mau jadi ketua tim misalnya, audit bank, ya, sebelumnya udah pernah jadi anggota tim untuk audit bank.

Pewawancara : Heem. Terus, kalau ee yang anggota timnya itu, kan, biasanya lebih dari satu bisa, tuh, kan, Pak? Itu yang melatarbelakangi digabungkan menjadi satu tim itu apa?

Informan 2 : Ee, maksudnya jumlahnya atau kompetensinya?

Pewawancara : Kompetensinya.

Informan 2 : Kompetensinya. Kompetensinya yang tadi saling melengkapi. Saya contohin tadi begitu wifi. Saya sarjana ekonomi, ada lagi yang sarjana ekonomi. Ada yang sarjana ekonomi. Kalau suruh memeriksa wifi, kita enggak ngerti apa-apa. Nah, kita ngajak Mbak Azizah untuk melengkapi.

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : Sehingga secara tim, tim itu akan solid dan bisa mengaudit.

Pewawancara : Berarti, disesuaikan sama kebutuhan penugasannya, ya, Pak?

Informan 2 : Betul, disesuaikan dengan spesifikasi penugasan, bidang industrinya, lah. Kalau kita mau audit pertanian, ya, sama yang paham pertanian. kan gitu.

Pewawancara : Kemudian, pada saat proses investigasi, kira-kira ada tidak yang pada saat proses investigasi ini merasa sulit sekali karena mungkin saat terjun di lapangan ternyata kompetensinya tidak sesuai, Pak?

Informan 2 : Ee, sulit itu dari kompetensi, berarti, kan, ada kesalahan dalam melakukan identifikasi kompetensi. Ya, kalau seperti itu, ganti aja timnya.

Pewawancara : Oh, bisa di, oh.

Informan 2 : Bisa.

Pewawancara : Berarti adjustable, ya, Pak?

Informan 2 : Bisa. Tapi, masalahnya kalau misal kita melakukan audit, tapi gedung tempat nyimpen arsipnya kebakar, arsipnya kebakar semua. Nah, itu, kan, susah. Kita harus mencari bukti alternatif. Bukti surat sudah enggak ada, ya, berarti, kita harus mencari bukti saksi dan jumlah saksiannya harus lebih banyak. Gitu.

Pewawancara : Itu pernah enggak, Pak, kayak ee, terkendala, terus kasusnya tidak sampai selesai, pernah enggak, Pak?

Informan 2 : Ee, bisa saja, kendala, terus, misalnya, tersangkanya lari. Buktinya tidak diketahui ada di mana.

Pewawancara : Oh. Berarti, itu bisa dihentikan di tengah jalan, ya, Pak?

Informan 2 : Bisa.

Pewawancara : Jadi, jadi, enggak langsung, enggak dilanjutkan tidak?

Informan 2 : Jadi, tidak dilanjutkan bisa karena tadi orangnya kabur, tersangkanya kabur, sehingga enggak bisa dimintai keterangan, kita enggak tahu berkasnya di mana, sudah dibakar sama dia, misalnya. Brarti kan kita tidak mendapatkan cukup bukti untuk membuat simpulan. Kalau enggak bisa, ya, dihentikan. Kan enggak mungkin gantung.

Pewawancara : Iya. Berarti, selama ini enggak pernah ada yang menggantung gitu, ya, Pak, kasusnya? Atau ada?

Informan 2 : Biasanya itu tertunda karena, misalnya, dalam beberapa kasus, ee, orangnya sakit. Kan, ditunda dulu sampai dia sembuh. Kan, enggak boleh orang sakit diperiksa, ditanyain, salah, kan.

Pewawancara : Tapi, pasti ada kejelasannya, ya, Pak?

Informan 2 : Tidak selalu. Misalnya, orangnya kabur, gitu, kan. Heem. Ada satu orang yang memberikan ada dua keterangan, ya, ada dua orang memberikan keterangan yang bertentangan. Kan harus dicari satu orang lagi, siapa yang untuk menguatkan sebenarnya yang benar yang mana. Nah, kapan itu selesai? Bisa juga nungguin orang ini. Bisa. Kalau orang ini lagi umrah, kan, paling mundur 2, 3 bulan. Iya. Ya, kan? Orang itu lagi jadi TKW di luar negeri, enggak tahu, kapan balik. Kan, kasusnya bisa beda-beda. Lawak doang. Kalau orangnya lagi di luar negeri enggak jelas, atau dia malah enggak mau pulang ke Indonesia, ya, sudah kita mau ngapain, ya, kita close. Ya, kami tidak bisa melakukan klarifikasi kepada calon tersangka. Pada pelaku, itu bisa di close. Kapan dilanjut? Nanti, kalau buktinya udah, orang itu udah nongol lagi, baru dilanjut.

Pewawancara : Oh, berarti bisa depending, gitu, ya, Pak?

Informan 2 : Bisa.

Pewawancara : Mmm. Ee, terus gimana, sih, Pak, caranya mengetahui motif-motif orang dalam melakukan tindakan korupsi?

Informan 2 : Ee, kalau kembali pada ada yang namanya Gone Theory, coba kamu cari Gone Theory. Ketemu?

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : Jadi, kejahatan itu ada Gone Theory. Yang dua berasal dari internal kita, yang dua berasal dari eksternal kita. Yang pertama greedy, keserakahan. Ya, kan?

Pewawancara : Heem.

Informan 2 : Terus yang kedua, need, kebutuhan. Kamu sudah pertama. Misal, kamu, baju, kan, sama. Ya, kan?

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : Tapi, kamu pengen baju yang merek mahal. Kan, itu beda-beda. Nah, itu, kan, kebutuhan. Orang, kenapa, sih, harus beli merek mahal? Itu, kan, gengsi. Nah, gengsi sebetulnya enggak diturutin, ya, enggak apa-apa. Tapi, karena ego, saya, kan, sudah sudah lama kerja. Atau saya lagi naksir cowok nih, harus tampil keren gitu, kan. Ada kebutuhan. Sebetulnya, dia enggak usah juga, ya, enggak apa-apa. Orang enggak mati juga, kan, enggak pakai baju itu. Enggak pakai baju, ya, ada masalah. Kan, gitu, dikira orang gila, kalau enggak pakai baju jalan-jalan. Nah, tetapi ada keserakahan di situ, ada kebutuhan. Ee, ada kebutuhan yang sebetulnya, sebetulnya, bukan kebutuhan, sih. Keinginan. Kebutuhannya pakai baju. Inginnya merek mahal. Iya. Kebutuhannya, kan, bukan baju. Kebutuhan juga, kan, makan pakai rawon. Tapi, Mbak enggak mau tempe. Maunya, misalnya, ee, iga bakar. Nah, itu, kan, keinginan, bukan kebutuhan. Nah, karena ada, ada greedy, keserakahan, ada kebutuhan dalam diri kita. Dalam diri, di pihak luar adanya opportunity, kesempatan. Mbak, disuruh memegang kunci gudang, enggak ada yang ngawasin, wah kesempatan, nih, ambil, bisa, kan. Mbak, jadi bendahara, enggak pernah dicek, oh, duitnya dipakai dulu, nanti dipakai terus di, pakai, misalnya, jual beli, gitu, kan. Nanti, kalau udah untung, baru dikembaliiin. Gitu. Nah, itu, kan, ada, adanya opportunity, kesempatan. Tapi, ada juga faktor dari luar, exposure. Kalau, misalnya, Mbak kuliah, ya. Nah, jujur ngga pengen nyontek. Tapi, satu kelas nyontek semua. Kalau, Mbak enggak ikut nyontek, kan, nilainya paling jelek. Nah, itu, kan, exposure, artinya, enggak apa-apa. Kalau ketahuan nyontek, juga orang-orang enggak dihukum, enggak ada faktor yang bikin jera. Kalau enggak ada faktor yang bikin jera, ya, orang cenderung akan berbuat tidak baik. Ya, kan? Serakah, kita ada pembagian makan. Mereka bawa pulang 2 enggak apa-apa, kok, semua orang besok semua orang ngambil 2. Nah, itu harusnya exposure. Jadi, kalau itu terungkap, "Apa, sih, reaksi masyarakat?" Kalau reaksi masyarakat

membiarkan, ya, kini orang akan pada niru. Enggak apa-apa, cuma diomelin, enggak dipukulin, kan gitu. Nah, jadi, ada dua dalam internal diri kita, keserakahan dan keinginan, kebutuhan, dan dua dari pihak luar, kesempatan, dan kalau tertangkap, ketahuan diapain. Kalau enggak diapa-apain orang akan cenderung melakukan, lebih besar, lebih besar, kan? Gitu, ya.

Pewawancara : Yang biasanya jadinya dinormalisasi, ya, Pak? Singkat

Informan 2 : Maksudnya dinormalisasi?

Pewawancara : Kayak ee, contohnya kayak pungli itu, kan, sekarang udah mulai dinormalisasi, itu,

Informan 2 : Di normalisasi di.

Pewawancara : Di masyarakat.

Informan 2 : Artinya apa?

Pewawancara : Kayak

Informan 2 : Dianggap, barang biasa?

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : Oh. Ya, jadi, orang tidak lagi menganggap itu sebagai perbuatan tercela. Ya, kan?

Pewawancara : Iya

Informan 2 : kan. Artinya, orang sudah menurunkan standar, lebih permisif, kan gitu.

Pewawancara : Heem. Iya. Iya. Ee, lalu kalau dari semua pengaduan itu masuk ke proses persidangan, enggak, sih, Pak?

Informan 2 : Enggak. Jadi, pengaduan ditelaah. Missal ada korupsi, di kantor BPKP, gitu, kan. Itu dicatat BPKP mana, Jogja. Jogja korupsinya apa yang dikorupsi? Siapa yang

melakukan, tahun berapa? Nah, kalau enggak ada data-datanya, kan, enggak mungkin ditindaklanjuti. Gitu.

Pewawancara : Berarti, tidak semuanya diperkarakan ya, Pak?

Informan 2 : Tidak. Tapi, begitu dicek, enggak ada masalah, kok. Misalnya, pengaduan, nih, ini beras miskinnya terlambat sehari. Gitu, kan, orang ngomong-ngomong, "Ya, sudah, biar aja cuma sehari." Di cek aja, auditor ngecek. "Oh, ternyata sehari itu karena ada ombak gede, sehingga kapal enggak bisa berlayar," bisa. Jadi, tidak selalu ada tindak lanjut. Kalau misal, dari pembacaan, gitu. Ee ini, ini bukan masalah duit, misalnya, kepegawaian, ya. Oke. Jadi, ini, kamu dilaporkan, kamu selingkuh nih sama, Si Kari, buktinya apa? Ada foto makan bareng. Nah, makan barengnya di mana? Kalau makan barengnya di, rocket chicken kan, biasa aja, tidak menimbulkan penyimpangan. Kecuali makan barengnya berdua, makan barengnya di tempat yang jauh. Di tempat pariwisata. Di Tawangmangu berdua makan bareng, itu ada apa-apa. Jadi, belum tentu yang dilaporkan itu masalah.

Pewawancara : Mmm. Jadi, ditelaah dulu, ya, Pak?

Informan 2 : Ditelaah, kira-kira pembuktiannya bisa apa enggak. Karena mungkin ada perbuatan penyimpangan tapi enggak bisa dibuktikan. Misal, maaf ya,

Pewawancara : Iya, gapapa pak

Informan 2 : Kita harus kayak gini. Orang, ada orang di situ. Maaf, ya. Saya melihat, ke arah dada kamu. pelecehan, enggak?

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : Tapi, ada buktinya, enggak?

Pewawancara : Enggak ada.

Informan 2 : Enggak ada kan?

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : Ya, kan?

Pewawancara : Iya, enggak bisa dibuktikan.

Informan 2 : Pungli, ada orang pungli. Dipungli, yang dipungli siapa? Oh, yang dipungli orangnya sudah misalnya pungli di jalan orang yang dipungli kan udah langsung pergi. Nah, yang mau dikonfirmasi siapa? Kalau enggak ada bukti foto kan susah. Nah, jadi, kita melihat, kira-kira bisa dibuktikan, enggak, ya. Ada enggak dan bisa mendapatkan alat bukti. Tidak semuanya bisa. Misalnya, lihat kamu. Berapa detik saya itu, liatin, tinggal turun mata saya gini, kan? Cepat begini, kan. Tapi, kamu lapor. Bisa kamu lapor. Nanti, saya tinggal, "Oh, kamu fitnah saya." "Kamu, yang saya balik saya laporkan." Kan, susah. Jadi, faktor pembuktian juga.

Pewawancara : Berarti, kalau buktinya tidak cukup, juga tidak bisa di

Informan 2 : Artinya, bisakah kita mendapatkan bukti? Misalnya, kamu sama aku deh dilecehkan. Kita cuma berdua di kamar, saya colek dada kamu. Enggak ada saksi. Kamu lapor. Kamu datang lapor sambil nangis-nangis, ya. Begitu saya dipanggil, "Enggak, enggak Itu aja fitnah saya". Bisa saya diproses?

Pewawancara : Enggak.

Informan 2 : Enggak, ya, kan? Jadi, kita mau perhitungkan, Kira-kira bisa dibuktikan atau tidak? Karena, banyak kejahatan yang tidak bisa dibuktikan. Banyak, lho. Mengurangi takaran bensin. Iya, kan? Gimana pembuktiannya kalau udah, udah masuk ke tangki? Gitu. Missal, nih, kamu ngisi punya mobil. Sebelum kamu ngisi mobil, ada orang ngisi motor. 5 liter. Terus, kamu beli bensin mobil 30 liter, sama orang itu enggak dinolin, diisi. Nah, kamu mau komplainnya gimana? "Itu enggak dinolin, lho". Lah, buktinya apa? Kan nggak ada. Jadi, kebanyakan yang kita tahu Kemungkinan, eh, kejadiannya seperti itu. tapi, pembuktiannya susah. Buktinya. Ya, kan?

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : Misal, saya bilang ke kamu, Kamu bagian pengadaan. Kamu diminta beli computer Harga, katakan, 20 juta. Ya, kan? Terus di toko yang satu 20 juta, toko yang lain 21 juta. Saya minta kamu belinya di toko yang bagus. Kamu beli di toko itu. Karena ada

lebih 1 juta, kan? Nah, 1 juta sama toko itu dikasih ke saya. Terus, kamu bilang ini perintahnya saya. Ada bukti enggak? Enggak ada, kan? Nah, kita tahu ada potensi penyimpangan, tapi pembuktiannya, kira-kira, susah. Itu jadi pertimbangan apakah kami tindaklanjuti atau tidak pengaduannya. Enggak gampang, lho. Membuktikan. Apalagi kalau membuktikan pengadaan makanan, waduh. Gimana mau membuktikannya? Ini harusnya menunya ada, lauknya dua, ada ayam, ada telur. Ini, cuma, ayam aja. Ngadunya besok ni. Apa pembuktiannya? Bahwa kemarin, lauknya cuma satu, bukan dua. Kan, susah, apalagi pengaduannya sudah setengah tahun. Waduh, saya juga lupa, tanggal, tanggal segitu, makan siang menunya apa? Nah, jadi itu.

Pewawancara : Jadi, susahnya di pembuktiannya, ya, Pak? Mencari buktinya.

Informan 2 : Iya. Betul.

Pewawancara : Berarti, kalau di saat pengumpulan bukti itu ternyata tidak lengkap, berarti, tidak bisa ditindaklanjuti juga, ya, Pak?

Informan 2 : Bukan, kalau pengaduan kan kita memprediksi, "Ini, ini, kira-kira skenarionya kayak apa, ya?" "Kira-kira kita bisa membuktikan atau tidak?" Dari situ. Sebelum kita masuk. Misal, saya bilang gini, Ada pengaduan. Kamu 3 tahun yang lalu harga barang itu, katakan, 1.000. Kamu beli 1.300. Harga barang 3 tahun yang lalu, gimana kamu pembuktiannya.

Pewawancara : Iya. Sekarang, udah beda lagi.

Informan 2 : Udah beda. Kamu beli di toko mana? Kan, beda-beda. Susah. Nah, kalau kamu ada pengaduan kayak gitu, ngapain kamu masuk, pasti mentok. Ini secara ini, materi pengaduan memenuhi, tapi untuk ditindaklanjuti, kita akan berusaha mencari bukti.

Pewawancara : Berarti, bisa ditolak, ya, Pak?

Informan 2 : Bukan ditolak. Tidak ditindaklanjuti. Kita tetap analisis. Ini, pengaduannya masuk akal, nih, tapi pembuktiannya susah. Percuma kita masuk. Perintah-perintah lisan, itu, kan, susah pembuktian. Lalu, menyuruhnya pakai telepon. Enggak di WA. Nah itu enggak ada saksi. "Betul, bapak nelson-" nama kamu siapa?

Pewawancara : Hania.

Informan 2 : Hania?

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : “Nelpon Hania?” “Betul”, nelpon nyuruh ini ya, naikin harga?" "Enggak, saya nelpon cuma nanya kabar, ya, sehat apa enggak. Saya nanya kerjaannya sudah selesai apa enggak. Kan gitu. Saya bisa mengelak. Iya. Iya. Berarti, krusial banget, ya, Pak. Iya. Jadi, kira-kira kita bisa mendapatkan bukti yang mendukung simpulan atau tidak, gitu.

Pewawancara : Lalu, kalau perkaranya ternyata buktinya memenuhi, berarti, bisa diperkarakan dan bisa masuk ke ke

Informan 2 : Persidangan. Bisa.

Pewawancara : Lalu, nanti kalau, kan, ee, ada laporan hasil audit itu, nanti diserahkan ke penegak hukum, ya, Pak?

Informan 2 : Kalau audit investigasi apabila terbukti ke penegak hukum.

Pewawancara : Itu, setelah itu, nanti prosesnya

Informan 2 : Dan yang meminta. yang meminta, kita diminta oleh misalnya, ee, bupati, ya. Diminta untuk melakukan audit investigasi, Heem. ya, nanti hasilnya kita sampaikan ke bupati. Tapi, kalau ada pelanggaran, kita menyarankan bupati, "Ini harus diserahkan ke polisi, kejaksaan untuk diproses." Itu. Tapi, pada dasarnya laporan diberikan kepada peminta, peminta penugasan.

Pewawancara : Ee, kalau misalkan kayak tadi, Pak, terus disarankan untuk diberikan ke kepolisian juga itu ada pemantauan, enggak, sih, Pak, dari BPKP?

Informan 2 : Oh, iya, ada. Jadi, ya, setelah kita kirim laporan, kita akan tagih. 3 bulan lagi kita tagih, “gimana sarannya?" Kan, ada pemantauan tindak lanjut.

Pewawancara : Mmm. Itu yang yang memantau siapa, Pak?

Informan 2 : Ya BPKP. Yang melakukan audit.

Pewawancara : Oh, berarti dari timnya juga, Pak?

Informan 2 : Bukan, kantor

Pewawancara : Oh. Ee, terus saat mengaudit gitu, gimana, sih, Pak, untuk menerapkan sikap objektifnya?

Informan 2 : Objektif itu, kan, pengambilan evidence base.

Pewawancara : Apa itu, Pak? Evidence base.

Informan 2 : Berdasarkan bukti. Ya, kan? Ya, kalau tidak terbukti, dia tidak, kita tidak bisa membuktikan dia salah, berarti, dianggap dia benar. Jadi, simpulan audit berdasarkan bukti. Buktinya harus relevan, harus cukup, harus material, cukup untuk menyimpulkan, gitu.

Pewawancara : Heem. Kalau ada kasus yang sensitif gitu gimana, Pak?

Informan 2 : Enggak ada kasus sensitif. Paling menarik perhatian orang banyak. Ya, sama aja, ya kesimpulannya harus berdasarkan bukti. Kalau buat auditor enggak ada bedanya. Karena, prosedurnya sama, buktinya pun sama. Analisisnya pun sama. Mau menjadi perhatian orang atau enggak, enggak peduli, enggak ada bedanya.

Pewawancara : Karena ada kode etik, ya, Pak?

Informan 2 : Standar pekerjaan. Bagaimana cara menganalisis, kan, ada standarnya. Bagaimana mencari bukti, apa yang dimaksud bukti, kan ada standarnya semua. Kalau ada kode etik untuk dalam berperilaku. Kalau ini, kan, bukan, bukan ranah perilaku, tapi ranah profesi.

Pewawancara : Iya. Heem. Ee, kalau saat menghadapi perbedaan kepentingan dalam audit itu gimana, Pak?

Informan 2 : Perbedaan kepentingan gimana maksudnya?

Pewawancara : Eh, mungkin ada, misalkan yang diaudit itu ternyata teman, kayak gitu gimana?

Informan 2 : Oh, harus mundur.

Pewawancara : Oh, enggak boleh?

Informan 2 : Enggak boleh. itu sudah ada aturannya di Permenpan nomor tujuh, tujuh atau 17 tahun 2024 tentang benturan kepentingan. Harus mundur. Ganti.

Pewawancara : Berarti enggak boleh ada

Informan 2 : benturan kepentingan, conflict of interest.

Pewawancara : Eh, gimana sih, Pak, untuk memastikan bahwa pelaksanaan auditnya itu sudah sesuai dengan pedoman dan standarnya?

Informan 2 : Ya pertama tadi, mulai dari program kerja audit. Kita membuat hipotesa, nih, kira-kira penyimpangannya seperti apa? Kita pelajari aturan. Misalnya begini. Pengadaan barang itu lebih berisiko daripada kegiatan, misalnya eh di bidang kepegawaian. Kan lebih berisiko. Iya, kan?

Pewawancara : Iya.

Informan 2 : Orang bagian beli barang-barang lebih berisiko daripada pekerjaan orang yang nyapu. Nah, itu dari sisi, dari sisi risiko, ada kegiatan yang memang berisiko tinggi. Penerimaan pegawai itu risikonya tinggi. Biasanya bisa jadi ajang tawar-menawar, kan. Nah, itu yang namanya risiko melekat, inherent risk. Setiap kegiatan risikonya beda-beda, ya kan? Mbak sebagai petugas di bagian terima tamu dengan Mbak sebagai tugas di bagian pembelian, kan, risikonya beda-beda. Kesempatannya beda-beda, ya kan? Kalau terima tamu mau dapat duit dari mana? Kalau itu kan bisa mark-up, bisa fiktif. Nah, itu kan, jadi ada risiko, risiko yang melekat pada sebuah kegiatan. Dari situ kita teliti. Ini risikonya, ada risiko seperti ini. Misalnya risiko di pengadaan ada risikonya mark-up. Tapi kita lihat dari struktur organisasinya. Gimana sih cara melakukan pembelian? Jadi, siapa yang melakukan pembelian, siapa yang menerima barang kan harus beda. Kalau dia yang beli, dia yang menerima barang, dia yang nyatet, ya dia bisa manipulasi catetan. Jadi, kita melihat apakah ada pemisahan fungsi atau tidak. Kalau ada pemisahan fungsi, berarti lebih kecil risiko penyimpangannya. Gitu. Jadi berdasarkan risiko. Nah, misalkan

Mbak di kegiatan kemahasiswaan. Ada kepanitiaan. Yang satu bagian seksi acara, yang satu bagian duit, bayar-bayar, mana yang berisiko?

Pewawancara : Bayar.

Informan 2 : Iya, nah itu jadi, ada risiko-risiko yang melekat pada suatu proses sebuah pekerjaan, di mana satu pekerjaan lebih berisiko korupsi daripada yang lain. Yang pertama menentukan itu. Yang kedua, kita mempelajari aturan. Oh, ternyata kalau di situ, yang beli beda, yang nyimpan beda, yang mengeksekusi kan beda. Jadi, mudah-mudahan lebih aman, ya. Nah, itu disebut dengan antisipasi dengan melakukan tata kelola, melakukan itu, tata kelola. Tata kelola itu, siapa melakukan apa. Makanya orang bagian eh bengkel beda dengan supir. Iya. Kalau supir merangkap, dia yang bawa mobil ke bengkel, nanti dia bisa macam-macam, kan? Mobil enggak papa, dibawa ke bengkel diperbaiki, padahal enggak diperbaiki. Tapi kalau ada pengendalian, kalau mobil dicek, supir mau rusak, mau dibawa ke bengkel, harus disetujui dulu sama atasannya. Kan berarti kan ada pengendalian dari atasan, atasan mengecek, kok ternyata enggak papa kok. Karena kemungkinan kalau dia minta duit hanya untuk nanti dibuat kuitansi fiktif, kan. Nah, itu, jadi, untuk antisipasinya, dia harus ada review berjenjang. Pekerjaan anak buah dicek atasannya, dicek lagi supaya memastikan ini benar. Jadi, kuncinya ada di review tadi.

Pewawancara : Heem. Oh, gitu. Eh, kalau balik lagi, Pak, untuk bukti tadi itu tuh dari yang pihak audit itu langsung ngasih ke tim audit atau perlu diminta dulu, Pak?

Informan 2 : Gimana, gimana?

Pewawancara : Untuk bukti audit itu kan dikumpulkannya, Pak. Itu tuh eh nanti ketika ada laporan, itu pihak yang diaudit itu langsung ngasih ke pihak yang mengaudit atau dari pihak yang

Informan 2 : Laporan?

Pewawancara : Heem.

Informan 2 : Kalau bukti enggak dikasih, Bukti, harus di auditor. Disimpan auditor.

Pewawancara : Eh, itu untuk auditor untuk mendapatkan bukti itu, perlu pengajuan dulu atau gimana?

Informan 2 : Oh nggak, pengajuan, kan, ada surat tugas. Manggil orang, nanti klarifikasi, bisa, kan. Enggak perlu surat tugas lagi.

Pewawancara : Berarti eh dalam mendapatkan bukti itu diperlukan sikap tegas enggak sih, Pak?

Informan 2 : Ya, pertama, dia harus tahu betul apa yang dia butuhkan. Ya, kan? Ya tadi, orang kita bikin skenario, nih, bagian pengadaan paling mark-up, ya, kan? Oh, mark-up itu biasanya dimulai dari mana? Kan gitu, kita harus tahu prosesnya, kan? Nah, misalnya, batas mark-up bisa dikurangi dengan kalau dia nyusun, pada waktu bikin anggaran, harganya realistis. Ya, kan? Tapi kalau harganya dinaikkan 20%, berarti sudah ada niat jelek, kan. Iya. Nanti dari situ. Jadi, dianalisis, kira-kira, apakah penyimpangan di setiap tahapan apa? Nah, itu diaantisipasi. Tapi, bahwa semuanya itu tidak semua terbukti sudah pasti. Artinya, Mbak punya, "Oh, ini penyimpangannya ada tiga macam di situ." Ternyata, cuma ketemu satu karena yang kedua dia nutupinnya rapih. Kan, kita kejar-kejaran waktu kadang-kadang enggak sempat.

Pewawancara : Terus ada enggak sih, Pak, yang pihak yang diaudit itu sulit untuk dimintai bukti?

Informan 2 : Banyak.

Pewawancara : Oh, terus caranya gimana, Pak?

Informan 2 : Ya, persuasif. Kita jelasin. Caranya enggak bisa nyuruh dia buat surat pernyataan bahwa dia tidak bersedia memberikan bukti.

Pewawancara : Heem, gitu. Oke, Pak.

Informan 2 : Jadi, pada dasarnya, komunikasi persuasif. Supaya orang mau memberikan dengan sukarela. Berarti ya, caranya ya tadi, komunikasi yang persuasif. Menghargai orang, kan gitu. Bila menghargai orang, orang akan merasa dihargai, sehingga dia mau terbuka. Yang kedua jangan memvonis "ini bapak salah. Bapak ini

gimana, sih? Bapak kok jual barang kok ngasih kuitansi kosong, Bapak ini gimana, sih?"
Orang itu langsung diem, enggak mau terbuka, kan.

Pewawancara : Tidak menyudutkan, ya, Pak?

Informan 2 : Iya, jangan, memvonis, tidak menyudutkan. Jadi, dalam memberikan keterangan, meminta bukti itu, kita diminta untuk menganalisis, bukan menyampaikan asumsi, praduga, prasangka, bukan. Jadi, ya tadi, komunikasi yang bagus, dijelaskan tujuan kita apa nantinya ke mana, kalau dia lebih, sudah paham, biasanya mau ngasih.

Pewawancara : Heem, oh gitu. Ya, sudah, baik, Pak. Sudah selesai, sudah cukup.

Informan 2 : Nah, nanti kalau mau tanya yang kurang, tanya lagi, enggak apa-apa, ya.

Pewawancara : Oh, iya. Eh, sebelumnya, Bapak sudah di BPKP berapa lama, Pak?

Informan 2 : Tahun '90

LAMPIRAN 7 Transkrip Wawancara 3

Jabatan/Posisi : Auditor Muda

Waktu : Senin, 15 Desember 2025

Pewawancara : Langsung aja saya mulai ya mas, Ini wawancara untuk penelitian skripsi saya terkait tentang kompetensi auditor, prosedur audit, sama etika auditor

Informan 3 : Siap

Pewawancara : Sebelumnya mas Johnny udah di PPKP berapa lama mas?

Informan 3 : Dari 2014, berarti 11 tahun

Pewawancara : Biasanya untuk menganalisis kasus-kasus itu yang sebelum-sebelumnya itu menambah wawasan gak sih mas?

Informan 3 : Menambah wawasan iya, dan menambah pengalaman iya Jadi semakin kita banyak pekerjaan itu mbak di BPKP itu semakin tahu peraturan, metode, dan beberapa pengetahuan lain

Pewawancara : Berarti menambah wawasan juga untuk menghadapi kasus baru juga ya mas?

Informan 3 : Betul

Pewawancara : Setelah biasanya, setelah menemukan beberapa bukti itu, bagaimana mas itu memelihara sikap kritis sehingga tidak mudah mempercayai pernyataan?

Informan 3 : Pertama, auditor itu memang harus ada sikap skeptis Walaupun permintaan audit itu dimintakan oleh pihak eksternal, kayak polisi, atau pihak yang kita audit Tetap secara profesional itu kita harus menghadapi sifat skeptis Sifat skeptis ini membatasi kita buat tidak ada benturan kepentingan Jadi ketika ganti kita turun ke

lapangan itu, ketemunya yang kita ungkap adalah A Jadi sebenarnya, di auditor itu memang sangat menjunjung tinggi sikap skeptivitasan Karena kita hanya judgement perasangkanya atau perasangka profesional Tapi balik lagi mbak, ketika nanti kita ada perasangka tugas kita selanjutnya adalah membuktikan perasangka itu Kalau di bahasa yang lebih akademis adalah ada hipotesis, hipotesisnya yang dibuktikan

Pewawancara : Terus kalau misalkan untuk memastikan bukti itu benar-benar objektif itu gimana?

Informan 3 : Kalau objektif itu kalau di kami ada beberapa standar ada yang namanya rekocuma, saya lupa apa itu Rekocuma itu relevan, reko kompeten, cukup materialistik Rekocuma itu kalau suatu bukti itu dapat mendapatkan empat aspek itu Itu kita sudah anggap sebagai bukti yang objektif

Pewawancara : Berarti harus melewati standar itu semua untuk bukti?

Informan 3 : Iya begitu

Pewawancara : Kalau sejauh mana sih mas Johnny itu memahami aspek cybercrime dan teknologi informasi yang relevan Dengan kasus yang biasanya ditangani?

Informan 3 : Cybercrime itu di kami agak sedikit belum kita masuk Karena auditor IT itu kita hanya beberapa saja Tapi di pusat sudah mulai digalakkan Di pusat itu ada namanya itu klinik atau laboratorium forensik Jadi dari laboratorium forensik itu ada tim satgas forensik Di dalamnya itu nanti dari perwakilan itu bisa minta bantuan ke mereka

Pewawancara : Berarti kalau di perwakilan sendiri belum ada?

Informan 3 : Katanya ke depannya itu akan dibuat unit sendiri atau satgas sendiri per perwakilan Tapi karena kalo kemarin saya ikut pelatihan, ternyata satu device itu mahal Bayangin satu donggel itu yang digunakan untuk mengkopi device itu harganya 25 juta Kalau satu perwakilan itu dapat berarti satu perwakilan dikali berapa Dan itu harus dilatih terus Masalahnya kan ketika kita kerjaan yang muter dilatih lagi, hilang lagi harus dilatih lagi Agak keberatan disitu Tapi katanya bu waka ke depannya akan dibuat satgas itu untuk setiap perwakilan

Pewawancara : Berarti masih perlu untuk pelatihan teknologi informasi itu sendiri ya mas

Informan 3 : Iya betul

Pewawancara : Ada nggak sih mas, menurut mas yang masih perlu untuk teknologi informasi Yang perlu dipelajari sama auditor khususnya diinvestigasi Ada nggak yang spesifik?

Informan 3 : Spesifikasi teknologi yang harus dipelajari itu banyak mbak Contoh satu mbak, BPKP itu belum ada yang namanya menilai berkas itu asli atau nggak Contoh satu PDF ini nanti harusnya kan memuat meta ya Kita belum pernah melihat meta datanya itu mbak Contoh data ini tanggalnya itu 29 Maret Tapi dibuatnya itu tanggal yang baru Jadi kita belum bisa sampai ke situ Harusnya ketika kita auditor kita harus punya tool seperti itu dong Ini asli apa nggak sih datanya? Ini bener nggak sih? Atau word ini dibuat kapan sih? Nah kita belum sampai ke situ mbak Dan kita lebih tradisional dalam mengolah data Teman-teman itu kalau saya suruh rekap, rekapnya manual. Harusnya pakai AI ya? Pakai AI di Google land harusnya bisa

Pewawancara : Atau ga biasanya pakainya SAP gitu ya mas?

Informan 3 : SAP itu apa? Standar Akuntansi Pemerintah?

Pewawancara : Bukan, ada ERP gitu untuk *Entity Resources Planning* atau nggak salah?

Informan 3 : Belum ada

Pewawancara : Belum ada ya? Untuk teknologi yang bisa untuk nyatuin semua data jadi semuanya itu bisa akses gitu mas?

Informan 3 : Belum mbak, sampai situ Belum ada. Data dalam arti data apa nih? Data kepegawaian atau data audit?

Pewawancara : Biasanya semua data itu bisa dijadikan satu di sistem itu mas Ada namanya sistem SAP itu belum ada?

Informan 3 : Ada pakainya Google Drive mbanya malah lebih tahu, kita nggak, cuma Google Drive aja Jadi kayak kita laporan ya, laporan kit aini backupnya dari aplikasi kita induk, aplikasi nama SIMA Kita klik masuknya ke Google Drive untuk mengupload

Pewawancara : Oh brarti belum pake teknologi SAP ya?

Informan 3 : Nanti saya pelajari, kayaknya belum

Pewawancara : Oh okede

Informan 3 : Kemarin agak dikritik siapa ya kemarin ya, eee saya pernah pelatihan itu ketemu sama wakil Menteri pendidikan yang stella, doctor stella, tau kan doctor stella? professor stella

Pewawancara : Oh iya tau

Informan 3 : Nah doctor stella itukan ngobrol dengan kita, “kalo BPKP pake aplikasi apa pak ya?”, “google drive bu”, “hah? Bapak ibu pakai google drive?”, diketawain sama dia, ya harus bapak ibu mengembangkan yang abc, abc kayak gitu. Nah, kita baru tau kalau aplikasi google drive pun itu ternyata keamanannya kurang, gitu mbak kita belum sampai situ.

Pewawancara : ERP tu itu mas, *enterprise resources planning*, dia juga ada untuk analytic cloudsnya

Informan 3 : Tapi providernya apa?

Pewawancara : Itu biasanya beli dari Jerman atau India Emang lumayan mahal sih, sampai miliar

Informan 3 : Kita pakenya google, Enterprise Analytic?

Pewawancara : *Enterprise Resources Planning*

Informan 3 : Belum Mbak

Pewawancara : Oh belum ya

Informan 3 : ERP oh iya iya

Pewawancara : Produknya dari SAP

Informan 3 : Berarti itu mandiri ya, kita beli di fasilitasnya, kita pakai sendiri gitu ya?

Pewawancara : Ya nanti biasanya dari sistem itu menyesuaikan apa kebutuhan dari perusahaannya

Informan 3 : Belum Mbak, Belum Masih Google Drive

Pewawancara : Oke deh

Informan 3 : Malu-maluin ya?

Pewawancara : Enggak, Terus tadi kan kata Mas untuk teknologi informasinya berarti masih kerjasama sama pusat ya? Itu gimana sih mas untuk memastikan kualitas kerjanya dan independensi tenaga ahli ya?

Informan 3 : Kalau kami Mbak, sebelum kita masuk pekerjaan itu di penilaian PIA itu Kami screening dulu, kalau ingin turun independensinya terganggu nggak Jadi sudah diantisipasi sejak awal Jadi ketika ada benturan kepentingan Mbak, kita sudah antisipasi sejak awal

Pewawancara : Bentuk antisipasinya kayak gimana Mas?

Informan 3 : Ya itu, di awal itu sudah dipilih, Mas masuk ke Telkom ya Kalau masuk ke Telkom, punya keluarga Telkom nggak, kalau nggak ya udah bisa masuk Jadi di kami itu ada kayak database keluarga gitu Mbak jadi si A ini keluarganya kemana-mana, Pak Denya kemana-mana, instansi apa-apa udah ada Jadi ketika kita masuk, sudah ada early warning-nya dulu nih seperti itu, sebatas itu aja sih

Pewawancara : Biasanya kan katanya Mas ini sebagai ketua tim ya Mas? Gimana sih untuk memastikan rekan tim ini mengerti setiap instruksi yang Mas kasih?

Informan 3 : Biasanya kalau saya itu meredah komunikasi itu Mbak, kita bikin alat komunikasi sederhana dulu Biasanya kan pakai Google Drive atau pakai WhatsApp grup

Di situ kita bagi permasing-masing pekerjaannya anggota tim Kalau di kami itu ada namanya program kerja audit Nah program audit itu langkah-langkah apa aja yang diambil dalam mencapai tujuan audit Itu nanti kita bagi, oh si A ngerekap ini, si B ngerekap ini, yang bikin draft ini, yang ini yang bikin berita acara ini Jadi itu kita gunakan untuk menggunakan waktu secara efisien dan kita bisa mencapai tujuan audit Walaupun nanti beberapa *case* itu ada rencana yang diluar dari PKI Tapi kita minimal sudah ada, mau kemana aja sudah ada

Pewawancara : Berarti dibagi tugasnya ya Mas? Kalau misalkan nantinya para anggota tim itu ada yang kesulitan berarti saling membantu aja?

Informan 3 : Biasanya kalau kesulitan itu otomatis yang ini selesai ini belum Otomatis dari si yang belum selesai itu kita yang sudah selesai ngerjain yang belum selesai Ada *case* juga Mbak biasanya ini nggak selesai-selesai ya sudah kita take over Ada seperti itu Mbak Kalau di sini tidak terlalu Tapi kalau dulu di Papua Mbak jadi ada dua tim nih, ada dua anggota tim Yang satu bisa kerja, yang satu nggak bisa ya sudah Otomatis kerjanya si A ini yang nggak bisa kerja ini kita handle berdua Biasanya orang-orang yang timur itu yang nggak bisa apa-apa itu dia ahlinya dikomunikasi Jadi kita suruh komunikasi ke masyarakat, suruh wawancara, suruh komunikasi yang lain-lain

Pewawancara : Berarti dikomunikasikan aja

Informan 3 : Iya

Pewawancara : Terus kalau biasanya pada saat melakukan investigasi itu ada model-model investigasi tertentu nggak sih Mas?

Informan 3 : Investigasi itu kalau kita bicara investigasi itu dia turunan dari satu audit Namanya audit tujuan tertentu Audit tujuan tertentu ada audit investigasi, ada audit kerugian keuangan negara, ada audit operasional Tapi kalau kita bicara audit investigasi sendiri ya adanya cuma itu tok Tapi secara ini bedanya nanti mungkin ke pihak yang meminta Bisa nanti kita interen sendiri yang melaksanakan, bisa APH, bisa apa namanya Bisa teman-teman penyidik atau dari kepolisian atau Kejaksaan, bisa juga dari instansi lain Contoh dari PEMDA mau kita melakukan audit investigasi atas dugaan apa, itu bisa

masuk Kalau bedanya kayak gitu aja Tapi kalau tujuan audit besarnya itu audit tujuan tertentu, innduknya di audit itu sih

Pewawancara : Terus untuk standar urutan prosedur audit itu ada nggak sih Mas?

Informan 3 : Standar urutan audit?

Pewawancara : Untuk di audit investigasi sendiri?

Informan 3 : Kalau standar paling tinggi pake SAIPI itu mba Standar Audit Interen Pemerintah Indonesia jadi kita menginduknya ke sana Jadi seluruh pedoman kita merujuknya kesana Dan di laporan kita harus ada tulisan tunduk pada peraturan tersebut

Pewawancara : Berarti prosedur auditnya itu udah pasti runtut gitu ya Mas?

Informan 3 : Iya, tapi dari SAIPI nanti diturunkan ke pedoman Sorry, SAIPI nanti diturunkan ke MPP, Management Penugasan Pengawasan Jadi Management Penugasan Pengawasan untuk memberikan standar di BPKP Turun lagi ke pedoman Nah pedoman itu nanti berdasarkan masing-masing jenis pengawasan Ada audit, ada sosialisasi, ada apa, ada turunan sendiri Nah kita mengacunya ke pedomannya itu Pedomannya ini merujuk ke SAIPI

Pewawancara : Kalau misalkan, ada nggak sih Mas yang dilaporkan muncul potensi penyimpangan Namun tidak sampai merugikan negara itu ada nggak?

Informan 3 : Sebenarnya dia ada penyimpangan tapi tidak merugikan keuangan negara?

Pewawancara : Iya

Informan 3 : Biasanya itu ada dua, saya pernah dapet itu di Papua Ada teman saya itu turun penghitungan kerugian keuangan negara Tapi tidak ada kerugiannya Dia ada penyimpangannya tapi tidak ada kerugiannya Dia itu modelnya pengadaan Tapi pengadaan itu juga dilaksanakan pada saat harga itu wajar Jadi tidak ada kerugiannya Jadi harga itu sudah ditetapkan secara wajar Itu bisa dilaksanakan Jadi kita turun, PKKN nya nol

Pewawancara : Terus langkah selanjutnya apa Mas kalau kayak gitu?

Informan 3 : Berarti kan nggak terbukti jadi Kelemahannya adalah ketika dia penyidikan Dia tidak disidik secara matang artinya penyimpangan itu harus matang dulu Baru dinaikin Soalnya akan aneh ketika sudah Pada perhitungan kerugian keuangan negara Tapi nggak ada kerugiannya

Pewawancara : Terus dalam pelaksanaan audit investigatif itu Gimana Mas itu mengembangkan teknik-teknik audit Agar sesuai dengan kebutuhan setiap kasus?

Informan 3 : Enaknya audit investigasi itu Kita sebagai yang mengendalikan audit Yang pertama pasti kita menentukan hipotesisnya dulu Contoh hipotesisnya A, B, C Yang harus kita lakukan adalah paham atas hipotesisnya ini Prosesnya apa Contoh kalau hipotesisnya itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa Kita harus paham dulu pengadaan barang dan jasa Kalau hipotesisnya itu penyelewengan jabatan Kita harus paham itu tupoksinya apa Jadi kita susun dulu hipotesisnya Kita harus paham alur bisnis prosesnya Undang-undang apa dan peraturan apa yang menaunginya Habis itu kita turun komunikasi “Pak, bapak melaksanakan ini berdasarkan ini nggak Pak?” Jadi nanti urut hipotesis kerangka bisnisnya apa, proses bisnisnya apa Baru kita benturkan ke klarifikasi yang bersangkutan Apakah sudah sesuai dengan ketentuannya atau belum Apakah sudah sesuai dengan kenyataannya atau belum

Pewawancara : Berarti nggak ada teknik yang spesifik gitu ya mas?

Informan 3 : Iya

Pewawancara : disesuaikan dengan kasusnya apa dulu gitu?

Informan 3 : Betul Jadi makanya di kami, kalau di audit investigasi di sini Tidak ada yang namanya TAO Term of TAO *Tentative Audit Object* Jadi TAO itu semacam hipotesis secara besarnya dulu Contoh biasanya audit biasanya itu kayaknya tidak ada dokumenan A Tidak ada perencanaan Kalau di kami itu tidak ada TAO-nya Jadi kami sendiri yang mengembangkan TAO Dari hipotesis-hipotesis awal Nah ketika nanti kita cek hipotesis itu ada hipotesis tambahan Atau dugaan tambahan, kita dalamin lagi gitu Jadi lebih kalau

Mbak semangat untuk menelusur kayak Nanti kalau mau jadi auditor ya Lebih dalam ketika Mbak itu melaksanakan audit investigasi Daripada auditor yang lain

Pewawancara : Karena lebih terfokuskan gitu ya Mas?

Informan 3 : Enggak sih, malah enggak Jadi kita memang di awal itu kan hipotesis awal Tapi ketika nanti ada penyimpangan lain kita bisa masuk ke situ Tapi tidak tetapi dibatasi oleh ruang lingkup yang dimintakan oleh penyidik Contoh dia mintanya 2025-2026 yaudah Kita enggak bisa mundur ke 2024 Contoh nanti ada kegiatan X Ternyata kegiatan Y itu bermasalah juga Nanti kita tindak lanjutnya di permintaan-permintaan yang lain Tapi kita tetap fokus yang di kegiatan X tadi

Pewawancara : Berarti ada batas-batasan

Informan 3 : Iya enggak bisa, Kalau mau muncul penyimpangan di kegiatan lain yaudah Dia harus minta lagi di kegiatan yang lain penyimpangan di kegiatan lain

Pewawancara : Kalau bukti digital itu biasanya masih ada enggak sih Mas?

Informan 3 : Kalau sekarang malah lebih kita galakkan itu bukti digital Karena satu, bisa kita rekap Dua, kita gampang menyimpannya Tiga, teman-teman pusat itu yang malah menggalakkan harusnya Yang penting itu bukti digital

Pewawancara : Ada tantangan tersendiri enggak Mas untuk bukti digital sendiri?

Informan 3 : Tantangannya adalah Biasanya tu kalau AI dapetannya Kayak kemarin ada satu BUMN yang kita minta itu Dia enggak ngasih bukti softfile Niat kita kan kalau softfile bisa dikontrol find selesai Kita dikasihnya itu yang hardfile Otomatis dari hardfile itu kita harus rekap semua dulu Masukkan ke Excel, kita analisis masalahnya kalau data 1, 2, 3, 4 gampang lah Kemarin kita seribu datanya Mumpung ada teman-teman PKL yang dari UNY juga Kita minta mereka ngerecap

Pewawancara : Berarti harus satu persatu gitu Mas?

Informan 3 : Iya mbak, makanya lebih enak di softfile daripada hardfile kalau saya

Pewawancara : Berarti kalau misalkan dari sananya Emang nggak mau ngasih softfile
Berarti mau nggak mau hardfilenya ya

Informan 3 : Karena di penyidikan itu kan belum ada upaya paksa Jadi kemarin
yaudah lah Sengasihnya dulu gimana Nanti kalau kita udah naikkan ke SIDIK Baru kita
paksain untuk ngeluarin data gitu

Pewawancara : Terus gimana Mas itu Memastikan bahwa udah bertanggung jawab Atas
laporan hasil audit yang udah disusun Mas?

Informan 3 : Bertanggung jawab Otomatis kalau saya bicara tanggung jawab Kita
balik lagi ke pedomannya Sebisa mungkin Saya membuat laporan itu Berdasarkan
pedoman yang ada mbak seperti itu Pedoman yang ada bagaimana? Ada namanya itu
Struktur laporan dulu Terus hal-hal yang apa saja Yang wajib kita lakukan Sebelum
laporan itu terbit Seperti pembicaraan akhir Harus ada notisi Harus dipaparkan Harus ada
quality assurance oleh pusat Nah itu kita harus penuhi Jadi di BPKP ini Semakin kita
tunduk ke Apa namanya Pedoman kita itu semakin aman Tapi kadang-kadang Kayak
kemarin tuh Di lapangan ini susah datanya di lapangan ini mepet Kita mau membenturkan
Harga ini kemana Masih kebingungan Dan otomatis kita yang seadanya dulu Karena
masih penyidikan tapi Ketika kita di QA malah kita dimarahin “loh mas kok bisa sampai
sini aja?” tapi tetap dari pusat itu Pasti memintanya Demandingnya kan yang ideal Tapi
kan di lapangan gak selalu ideal Nah kita tantangannya disitu Kadang-kadang itu
ketentuan itu Harus A, tapi di lapangan itu Gak bisa karena keterbatasan waktu Memang
mereka gak terbuka Karena masih penyidikan Tantangannya kayak gitu Sebisa mungkin
harus sesuai dengan Pedoman

Pewawancara : Tapi pernah gak sih mas ke skip gitu? Apa prosesnya gitu?

Informan 3 : Skip itu biasanya Kayak hal-hal yang minor Contoh harus Dipaparkan
interen Kami kan ya udah ngobrol biasa aja “Ini setuju gak kayak gini gimana sih?”, “Ya
bener-bener kayak gini aja Di dalam isinya aja” kayak gitu kalo ini kan ada paparan,
notulen, daftar hadir kayak gitu. Tapi kemarin ya Yaudah lah gini aja Tapi yang urgent
kayak Dipaparin ke obrik, Ke instansi pemerintah, Klien itu memang harus Dilaksanakan

karena itu Fundamental banget harus setuju Jadi hasilnya kita itu harus setuju dulu Baru kita keluarin laporan kayak gitu

Pewawancara : Kalau misalkan ternyata gak setuju mas, gimana?

Informan 3 : Kalau gak setuju itu Namanya itu Dispute, kalau dispute Itu biasanya itu Kita ambil jalan tengah “Kenapa bapak? Kenapa bapak Tidak setuju? Alasannya apa?”, Nah ketika dia alasannya logis mbak Kita terima Tapi ketika alasannya dia tidak logis dan tidak berdasar Kita tetap pake Pake kita, nanti di laporan kita tulis Bahwa atas hasil pelaksanaannya ini tidak disetujui Atau tidak sepakat Tetep Tetep pendapat kita yang muncul kayak gitu

Pewawancara : Kalau terkait dokumentasi Audit itu gimana mas?

Informan 3 : Kalau dokumentasi biasanya Kita itu ada namanya kertas Kerja Secara pedoman kertas kerja itu harus Di review Nanti kita bikin kertas Kerja lembaran, nanti dari anggota tim Di review oleh ketua tim, ketua tim di review oleh dalnis Nanti di review oleh Pak korwas Jadi nanti di review Di dokumentasikan Kalau dulu Sekarang itu masih manual Kalau saya sekarang sudah menggunakan Google Drive Dan di MPP sekarang juga wajib dimunculkan di google drive tapi kami Karena kehati-hatian Kami membackup juga Jadi ada softfile, ada hardfile softfile kita simpan di Google Drive hardfile kita simpan di ruang arsip

Pewawancara : Kalau dokumentasi itu Sangat berpengaruh gak mas?

Informan 3 : Iya, apalagi kita ya Kalau di tempat lain pasti Dokumennya bisa kececer kemana-mana Tapi kalau investigasi Itu kalau saya rasa ya Anggota timnya itu yang paling rajin Menyusun kertas Kerja Karena nyawa Audit Bukan ini ya Untuk kedepannya, kalau ada resiko tuntutan hukum KKA itu yang akan menyelamatkan kita Contoh, kurang apa? Oh ini ada temuan A, temuan A itu buktinya apa Pak? Oh ini buktinya dia ada di KKA Kita buka aja Kalau tempat lain mungkin Karena risikonya gak setinggi kita Jadi gak terlalu kalau kemarin saya juga Gak ada dituntut Untuk ngumpulin juga jadi Tinggal-tinggal aja Karena kan tanggung jawab kertas kerja kan paling banyak di Anggota Tim Kalau kita kan cuma Ditaruh sini Dikumpulin udah gitu aja

Pewawancara : Terus Gimana menurut Mas perilaku profesional Auditor itu berpengaruh terhadap Kualitas audit yang dihasilkan Mas?

Informan 3 : Profesional ya Kalau salah satu Indikator profesional kan mengikuti Pedoman Selama Auditor itu Melaksanakan hal profesional Dengan Mematuhi pedoman yang ada Saya kira kualitas itu akan standar Standar itu dalam arti Ya ya ya Minimal itu sesuai dengan pedoman Tinggal Dari Auditornya itu Mau memaksimalkan Enggak mau mendalami lebih dalam Enggak mau mengungkap lebih dalam nggak Kalau batasnya kita kan jangan sampai laporan itu adalah substandar Substandar itu adalah Di luar yang diatur Di pedoman atau tidak sesuai dengan pedoman nah itu yang agak sedikit Kita Jangan sampai ke arah situ makanya kalau saya kalau dinyatakan profesional Kita On the track di pedoman seperti itu Kalau kita di etika sudah oke pedoman udah oke Kemungkinan nanti laporannya akan pasti bagus

Pewawancara : Terus dalam pelaksanaan Pemeriksaan itu Apa yang Mas lakukan untuk Memastikan pekerjaannya Bebas dari usaha Atau arahan manajemen auditee

Informan 3 : Arahan manajemen auditee Enaknya di kita Tidak Terlalu Banyak yang mempengaruhi Jadi kalau kita sedang audit Ya sudah ngomongnya auditor itu Ya ya udah Misalnya final Jadi saya itu Pengalaman saya itu Tidak pernah ada pengaruh Aneh-aneh Contoh PKKN Atau dari yang Di audit itu “mas jangan banyak-banyak pkkn nya” Jarang sekali Iya Mungkin sudah Gimana ya Kayak sudah Karena kan di BPKP Image nya kan baik kan jadi Sebelum dia Ke arah situ Mungkin sudah ngeper duluan

Pewawancara : Jadi sudah gak berani duluan ya Mas

Informan 3 : Kayaknya gitu deh Pengalaman saya 11 tahun itu jarang-jarang

Pewawancara : Untuk Tetap waspada Mas Johnny itu ada gak langkah yang Diambil terhadap risiko Signifikan yang dapat mempengaruhi Objektivitas pemeriksaan

Informan 3 : Kalau kita bicara objektivitas Kita balik lagi Ke Pengertian Profesional tadi sebisa mungkin ketika ada sesuatu itu Kita harus Objektif dalam arti begini Mungkin Secara Bersosialisasi Atau berkomunikasi Mungkin obrik Atau klien itu kan kadang-kadang Ada yang memberikan Feedback yang enak feedback yang enggak Kita sebagai

auditor itu Jangan sampai terpengaruh oleh itu Contoh “Ternyata di obrik ini dikasih makan Di sana enggak”, yaudah enggak ada ininya jadi istilahnya atas perlakuan itu Sebisa mungkin tidak Memengaruhi hasil audit kami seperti itu. Makanya kadang-kadang itu Malah ada yang beberapa teman itu Sampai-sampai menolak Ada ajakan mereka Tapi kan Balik lagi Kalau kita di timur ini kan Gimana ya, kita tolak itu malah Mereka kayak Tersinggung jadi Menjaga antara profesional itu dengan Jangan sampai menyinggung dari teman-teman Jadi sebenarnya Kalau tidak berlebihan pun pasti kita akan terima kalau Diajak makan, oke lah Tapi kalau udah di Kasih apa-apa wah itu udah Ada yang mulai menjurus ke arah yang Lain

Pewawancara : Jadi udah patut dicurigai ya mas

Informan 3 : Iya, pokoknya kita Kalau sudah ada kayak gitu Kita menjaga jarak aja Biar nanti ya balik tadi ke pertanyaan mbak biar Tidak Subjektif, jadi tetap objektif seperti itu

Pewawancara : Terus Mas itu menerapkan sikap tegas Enggak mas untuk memperoleh bukti

Informan 3 : Kalau kami itu Mbak tegas itu dalam arti Ada prosedurnya Contoh Kalau saya itu biasanya ada Surat permintaan Data pertama saya kirim Kan ada tanggal itu Akan dimohon untuk melengkapi Dokumen softfile maupun hardfile Paling lambat pada tanggal sekian Di tanggal itu tuh biasanya Saya kasih waktu lagi Selama satu minggu Ketika satu minggu saya keluarkan lagi nih Surat permohonan Surat permohonan data kedua Nah ketika Nanti sudah tidak diberi Saya akan bilang Surat tidak mau Memberikan Data A, B, C gitu Jadi kita itu gak usah ngotot Nanti “pak datanya ini belum pak”, “Oh iya mas”, nanti lagi “Pak ini belum pak”, Nah terakhir kita bilang “Karena datanya A, B, C ini belum Kami minta untuk Bapak menandatangani bahwa Bapak menolak untuk memberikan data ini” Ya sudah Nggak usah ngotot Nggak usah ngotot-ngotot, kalau ngotot capek mbak

Pewawancara : Berarti bukti itu harus lengkap ya mas Untuk maju untuk diaudit

Informan 3 : Iya Apalagi data yang Yang basic Kalau basic artinya gini, kalau mbak mengejar uang kan Mbak harus tahu Bukti uang itu keluar Kalau di Dana Desa itu

namanya SPP Kalau di APBD itu namanya SP2D Kalau di APBN itu Namanya SPM kita Harus minimal dapet itu Walaupun nanti data-data yang lainnya itu ada ya minimal bukti bahwa Uang itu sudah keluar

Pewawancara : Berarti kalau misalnya buktinya belum lengkap Berarti belum bisa

Informan 3 : Nggak bisa Dan itu kita antisipasi ketika Di Apa Pengembangan Informasi Awal, jadi kalau data pokoknya itu belum ada kita tidak berani menerima atau kita tidak menerbitkan surat, jadi harus itu ada dulu baru kita surat tugaskan biar kita tidak dibawa-kebawa dari penyidik, kalo di investigasi kayak gitu.

Pewawancara : Okes, mas sudah mas. Terima kasih banyak mas

Informan 3 : Siap, sama-sama mbak

LAMPIRAN 8 Transkrip Wawancara 4

Jabatan/Posisi : Auditor Ahli Pertama

Waktu : Rabu, 17 Desember 2025

Pewawancara : Jadi ini mau wawancarain tentang kompetensi auditor, prosedur audit, sama etika auditor sesuai pengalaman Mbak aja nggak apa-apa jawabannya. Yang pertama, gimana sih pengalamannya Mbak selama bekerja sebagai auditor berperang dalam meningkatkan ketepatan, ketelitian, atau kecepatan dalam mengungkap *fraud*?

Informan 4 : Dalam mengungkap *fraud* ya? Ini apa sih? Penelitian?

Pewawancara : Iya

Informan 4 : Kalau misalkan kita nge-audit itu kan, pertama kan kita membandingkan data-data itu akurat atau tidak. Kalau kayak aku sih, pertama dari dokumen-dokumen yang didapat dulu. Nah dari situ kalau nanti kita menemukan hal yang janggal itu nanti biasanya kita bikin suatu daftar dulu tuh nanti setelah semuanya udah selesai, nanti biasanya kita konfirmasi ke outbreak-nya ya istilahnya yang kita audit, kita konfirmasi apakah data ini valid tidak atau siapa tahu mungkin data itu memang belum di-update seperti itu. Jadi kadang kan memang kalau kita kayak cuman berpegang dengan data yang mereka kirim itu kadang mereka tuh belum tentu semuanya dikasih ke kita gitu loh. Jadi kita tuh kayak harus kerjanya tuh dari data dulu, kita identifikasi dulu apa aja yang kita temukan kira-kira ada kejanggalan, nanti biasanya aku konfirmasi ke outbreak kayak gitu. Jadi nanti bisa dari data dan dari wawancara ke outbreak, nanti biasanya ada titik temu tuh apakah memang datanya adanya itu atau memang datanya itu gak lengkap atau memang mereka belum melengkapi. Biasanya seperti itu sih.

Pewawancara : Kalau ternyata ada data yang gak valid tuh gimana mbak?

Informan 4 : Kalau datanya gak valid tuh maksudnya gimana? Dia memang kurang atau memang gak sesuai?

Pewawancara : Ya ternyata pas dilihat itu ternyata gak sesuai gitu gimana?

Informan 4 : Kalau gak sesuai ya kita sampaikan, kita sampaikan ke outbreak kalau ternyata loh kok harusnya kan tidak seperti ini kita sampaikan saja ke mereka terus seharusnya seperti ini. Nah nanti kalau misalkan memang mereka tidak bisa melengkapi yaudah nanti kita tuangkan ke laporan kalau mereka memang tidak bisa melengkapi data tersebut. Jadi biasanya kita bicarakan dulu dengan outbreaknya apakah data itu memang mereka memang setuju gak? Oh iya memang ini kami kurang atau memang mungkin mereka gak kok masih ada nih data yang memang belum kami sampaikan kepada BPKP Nah nanti biasanya mereka melengkapin lagi tuh kayak gitu nanti kita kasih batas waktu tuh kalau misalkan memang mereka cuman kayak alasan gitu yaudah kalau sampai batas waktu yang ditentukan mereka gak melengkapin yaudah ya kita bilang di laporan, kita state di laporan kalau memang mereka tidak bisa melengkapi data yang kita minta atau data yang sesuai dengan kriteria

Pewawancara : Berarti gak bisa lanjut untuk diaudit ya mbak?

Informan 4 : Tetap diaudit, tetap diaudit tapi hasilnya data itu kurang atau tidak sesuai

Pewawancara : Ada catatan

Informan 4 : Iya ada catatan

Pewawancara : Terus untuk pengalaman mbak itu bisa gak sih meningkatkan kayak ketelitian, kecepatan itu mempengaruhi ya?

Informan 4 : Iya bisa mempengaruhi, ya itu makanya kita harus sebelum mengaudit itu kita harus menentukan langkah kerja itu kita mulai dari mana kan memang kita itu kan obriknya beda-beda ya dek, obriknya beda-beda terus kadang pola auditnya kadang beda-beda juga kan setiap penugasan itu kan kadang gak selalu audit misalkan ya kadang tuh beda obrik tuh nanti akan kayak ada pedoman beda lagi dari pusat gitu loh nanti dari situ kita identifikasi dulu seperti apa pedoman, dari langkah kerja di pedoman itu seperti apa kita identifikasi kalau aku sih kayak gitu, lihat dokumen dulu kan kalau kita tuh diawal kan bikin permintaan data nah permintaan data itu kan artinya mereka memberikan dokumen nah setelah ada dokumen itu kita periksa setelah itu kita temukan, nah setelah

temukan itu kita apa? kita konfirmasi kan dari situ kan ketemu tuh apa yang sudah kita periksa dan apa yang kita temukan apa yang kurang gitu sih

Pewawancara : ada gak sih mbak pengalaman tertentu yang membentuk kemampuan investigative?

Informan 4 : apa ya? aku kan jujur aja ya di invest ini kan selalu dapetnya tuh tugas yang maksudnya kayak gak terlalu invest kayak kita tuh invest app ya kalau app tuh masih kayak kemarin kayak misalkan tugas ketahanan pangan itu kan kayak evaluasi biasa tapi kalau yang keinvestigasian banget kan yang pkkn sama mas wahid itu ya itu sih apa ya? yang membentuk eh apa dek? yang apa?

Pewawancara : Yang membentuk pengalaman

Informan 4 : pengalaman tentang?

Pewawancara : yang membentuk kemampuan investigative nya mbak

Informan 4 : ya mungkin yang pkkn kemarin sih karena itu kan kayak kita langkah kerjanya itu kayak meng apa namanya deh yang aku bilang ke kamu BAK klarifikasi jadi kita kan apa namanya? judulnya kan menghitung kerugian keuangan negara tapi langkah kerja kita tuh gak cuman menghitung tapi kita harus mengklarifikasi semua saksi yang sudah dilakukan apa namanya dek? sama kejaksan itu pemeriksaan ya jadi kayak semua BAP nya yang di BAP kejaksan semua saksi itu kan harus kita ulangi lagi tuh itu memang langkah kerjanya. Jadi, misalkan di BAP kejaksan ada 40 kan kemarin yang aku minta tolong kamu rekap 40 orang saksi nah itu memang langkah kerjanya itu ke BPKP harus diklarifikasi namanya jadi BAK berita acara klarifikasi BPKP nah disitu sih kayak kita tetep sama ya gak cuman menghitung kerugiannya jadi kayak kita bertanya lagi menggali lagi apakah dari kasus ini kita pelajari dulu kasusnya itu seperti apa kejahatannya seperti apa yang menimbulkan kerugian keuangan negara itu kita tanyakan kesatu persatu saksi-saksi tersebut jadi kan kayak kita instingnya tuh jadi kayak misalkan dimana ya kalau kejahatan seperti ini kira-kira orang ini ngelakuin gak? kayak gitu sih disitu memang insting *fraud*nya tuh kayak jadi kita kayak tau oh ternyata seperti ini ya orang-orang tuh bisa melakukan *fraud* tuh dari celah-celah kayak gini-gini sih dari situ sih

Pewawancara : berarti di review ulang gitu ya?

Informan 4 : Iya, jadi tujuan klarifikasi BPKP itu memastikan apakah pernyataan saksi itu masih sama dengan BAP waktu kejaksaan kan itu kan ada jeda waktu ya misalnya BAPnya tanggal misalnya Juni terus aku klarifikasinya November nah itu kita tanyakan apakah kan kamu misalkan kemarin sempet kayak sekilas baca ya jadi di awal tuh ada pertanyaan apakah pernyataan saudara masih sama dengan BAP tanggal sekian maksudnya BAP kejaksaannya disitu kan kita jadi tau apakah dia tiba-tiba di hari kita klarifikasi itu masih sama atau beda karena takutnya kan ada tekanan dari kejaksaan karena kalau kita kan bersifat netral kan deh bukan yang bedalah dengan kejaksaan kalau BPKP itu lebih netral ke saksi itu kita tidak menyudutkan tidak mencari siapa tersangkanya jadi disitu tuh tujuannya untuk menanyakan apakah pernyataannya masih sama dan apakah ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang dihilangkan dari pernyataan waktu pernyataan di BAP

Pewawancara : tapi pernah gak ada yang beda?

Informan 4 : kalau beda sih gak ada cuman menambah jadi kayak dia tiba-tiba kalau apakah sama pasti semuanya jawab ya masih sama biasanya aku ketik ya masih sama dengan BAP kejaksaan tanggal sekian tapi nanti di poin selanjutnya tuh kayak aku kayak masih menggali pertanyaan lagi gitu loh jadi kayak kita tuh kalau mau BAK tuh kayak belajar dulu tuh BAP nya si A isinya apa nah dari situ auditor tuh harus menggali kira-kira apa nih yang kurang dari pernyataan si A itu jadi nanti kita tanyakan kembali biasanya ada tambahan-tambahan

Pewawancara : biar lengkap gitu

Informan 4 : ya biar lengkap kok ternyata menurut BPKP belum dalam ya yang ditanyakan si penyidik kejaksaan itu boleh tuh kita tanyakan jadi memang apa ya kayak disitu aku lebih kayak investigasi banget gitu loh waktu tugas PKKN kalau tugas yang lain sih enggak sih

Pewawancara : oh enggak ya, berarti kebanyakan kalau yang kerugian negara ya mbak

Informan 4 : iya yang kerugian negara atau audit investigatif tapi aku belum pernah aku pernahnya yang PKKN baru sekali kemaren, kalau yang lain soalnya kayak evaluasi biasa kayak yang ketapang itu kan cuman tepat sasaran enggak bantuannya kayak gitu-gitu loh bukan yang kayak *fraud-fraud* banget gitu loh menurut aku ya maksudnya kayak PKKN tuh lebih kayak kita benar-benar nyari apa namanya *fraudnya* tuh dimana

Pewawancara : investigasi banget gitu gitu ya mbak?

Informan 4 : Iya investi banget gitu sih

Pewawancara : terus kalau kemampuan teknik sendiri kayak teknik audit gitu ada enggak yang mbak yang menurut mbak itu membantu melaksanakan prosedur audit

Informan 4 : teknik audit itu maksudnya apa?

Pewawancara : kan ada teknik-tekniknya tuh mbak audit atau menurut mbak itu ngerjainnya sesuai pedoman aja

Informan 4 : sesuai pedoman aja sih aku selama ini enggak ada yang teknik apa gitu enggak ada sih jadi sesuai pedoman aja misalnya penugasan apa itu kita kan memang harus sebelum penugasan itu yang pertama tuh harus belajar pedoman kayak gitu aja sih kalau aku ya

Pewawancara : berarti mbak melaksanakan prosedur audit itu sesuai pedoman benar-benar urut ya mbak?

Informan 4 : iya kalau bisa urut ada pedoman dari rendal, rendal tuh dari pusat biasanya itu udah lengkap jadi kayak pedoman penugasan ini apa kita harus mencari apa aja tuh ada TEO, TEO, TEO tuh kayak kalau di skripsi kesimpulannya gitu loh kita harus membuktikan pernyataan ini misalkan apakah apakah bantuan ini tepat sasaran gitu-gitu loh jadi udah ada di pedoman

Pewawancara : jadi udah semua diatur di situ ya mbak? terus sejauh mana sih mbak ini memahami aspek cybercrime dan teknologi informasi yang relevan dengan kasus yang biasanya ditanganin ada enggak?

Informan 4 : cybercrime misalnya apa?

Pewawancara : yang biasanya menyangkut teknologi atau biasanya penyelewengannya lewat teknologi gitu mbak, manipulasi data atau apa gitu

Informan 4 : oh kayak contohnya kemarin di PKKN itu juga ada sih manipulasi datanya itu teknologi bukan ya dek ya? jadi dia kayak masukin KTP

Pewawancara : oh KTP

Informan 4 : jadi tersangka jadi itu kan kredit fiktif ya nah si debitur-debitur tuh peminjem yang melakukan kredit fiktif itu kan dia pinjem ke bank tapi dia tuh bohong, dia punya usaha, tapi usahanya tuh gak pernah ada gitu loh kayak fiktif gitu loh nah di bukti dia punya usaha itu kan ada dokumen-dokumen di situ ada tanda tangan, ada KTP ada si inisial AL itu dia ternyata memalsukan KTP dia sampai punya 4 KTP

Pewawancara : kalau kayak gitu gimana mbak? caranya?

Informan 4 : langsung diserahkan ke kejaksaan, taunya karena dari hasil klarifikasi itu kemarin kayak gitu-gitu sih, dia manipulasi data,

Pewawancara : kalau yang menyangkut kayak bukti digital gitu mbak

Informan 4 : bukti digital tuh ada gak ya kemarin? itu cuman pemalesuan semua sih pemalsuan KTP pemalesuan gak ada sih, gak digital itu lebih kayak pemalsuan KTP kayak misalkan itu kan ada beberapa tuh di satu kasus itu tuh kayak banyak pemalesuan KTP dari yang punya tanah sebagai jaminan sama yang debiturnya itu, cuman kayaknya gak digital sih berarti gak ada sih belum pernah sih yang cyber itu belum ada sih selama ini

Pewawancara : berarti kebanyakan pakainya hardfile ya mbak? untuk buktinya, berkas-berkas gitu-gitu berkas-berkas

Informan 4 : bukti apa nih?

Pewawancara : kalau misalkan mau ngeaudit kan ngumpulin berkas-berkasnya dulu kan mbak untuk bukti-bukti lain-lain itu berarti pakainya hardfile ada hardfile, ada softfile nah itu pernah ada gak mbak?

Informan 4 : softfile-nya itu tuh palsu gitu gak ada sih dek, selama ini ya dari mitra kita kan pemda-pemda juga ya, jadi gak ada sih maksudnya kalau pemda sendiri kan instansi juga ya instansi pemerintahan juga, mereka gak berani sih maksudnya ini kan yang data-data kita minta itu kan ya ada yang dari softfile, tapi sejauh ini ya maksudnya gak dipalsukan atau apa masih gak beranilah mereka instansi pemerintahan juga kan scan-scan gitu kan misalnya

Pewawancara : atau gak yang kayak excel atau pernah gak sih mbak?

Informan 4 : Nggak

Pewawancara : pernah gak sih mbak kalau misalkan ada softfile kayak gitu itu kesulitan untuk nge-access atau kemampuan mbak misalkan belum sampai situ untuk nge-access softfile itu

Informan 4 : ngga sih, oh belum pernah selama ini belum pernah karena mereka kan paling kita langkahnya tuh kayak aku biasanya bikin link link google drive, yaudah mereka kayak langsung upload aja kan disitu

Pewawancara : berarti gak pernah yang pake aplikasi atau apa

Informan 4 : gak ada, memang kita belum untuk minta ke obriknya kan maksudnya minta data kita cuma masih pake link google drive gitu sih, gmail gitu

Pewawancara : untuk kalau misalkan yang pihak yang di audit itu ada gak mbak yang sampai menyangkut ke aplikasi, kan ada tuh aplikasi yang nge-tracking cashflow-nya atau nge-tracking kerjaan kantor itu, perusahaan gak pernah ya?

Informan 4 : mereka ada aplikasi, tapi ya masih maksudnya masih on track gitu loh ada sih mereka punya aplikasi apa ya, aku nge-audit apa ya kemarin yang mereka pake aplikasi biasanya tuh si apa gitu kan si apa gitu, singkatannya tapi masih on track

maksudnya gak ada masalah ini kan maksudnya yang dicari kayak yang apakah mereka melakukan penyalahgunaan gitu kan, gak ada sih

Pewawancara : berarti kalau misalkan kayak aplikasi gitu, mbak juga meriksa dari aplikasi itu juga?

Informan 4 : meriksa aplikasi itu kita udah langsung kita minta datanya aja jadi misalkan misal puskesmas dia itu kan input nih data-data dia di aplikasinya puskesmas ya kita ini aja minta tarikan datanya aja gak sampai meriksa aplikasi karena kita kan nge-audit ininya ya butuh datanya aja ya, jadi gak sampai meriksa aplikasinya seberapa jauh sih

Pewawancara : berarti langsung berkasnya aja

Informan 4 : yang diperlukan, data yang diperlukan

Pewawancara : yang udah jadinya ya? kalau dalam proses investigasi itu kan tentu ada bukti-bukti kayak tadi mbak yang mendukung gitu yang menentukan dalam proses investigasi sendiri mekanisme dalam pengumpulan bukti itu seperti apa mbak? nanti dari perusahaannya itu langsung ngasih buktinya atau kita tuh perlu minta ke perusahaannya untuk ngasih buktinya

Informan 4 : kita minta

Pewawancara : berarti setelah ada laporan gitu gimana mbak? prosesnya

Informan 4 : laporan apa nih?

Pewawancara : laporan dari luar untuk minta di-audit misalkan, itu gimana? langkahnya untuk sampai di-audit

Informan 4 : contohnya yang audit PKKN itu kalau audit PKKN itu kan langkah awalnya itu dari permintaan kejaksaan jadi timbul audit PKKN itu sebenarnya karena si penyelidik kejaksaan itu butuh kayak dukungan, berapa sih kerugian negara dari tersangka yang menimbulkan kerugian negara itu seberapa kerugiannya untuk mendukung dia tuh menimbulkan kerugian gitu loh, karena kalau penyelidik kejaksaan

itu kan tidak memiliki kemampuan untuk menghitung kan, makanya dia butuh dari BPKP, jadi dia awalnya minta dulu nih ke BPKP dia kayak, kamu pernah dengar expose-expose itu kan? mereka expose dulu ke BPKP ini ada kasus seperti ini kesalahannya seperti ini kesalahan yang menimbulkan kerugian negara seperti ini, nah mereka tanya dulu ke kita, apakah perbuatan seperti ini dikatakan bisa menyebabkan kerugian negara nanti kan dari expose itu kita diskusikan deh, kalau misalkan dari kami udah, oh iya menimbulkan kerugian negara tuh, nah nanti setelah itu mereka bikin permintaan untuk melakukan audit ke kita nah dari situ, baru kita mengirimkan tim ke situ untuk membuat ST melakukan ST penghitungan kerugian negara udah langsung kita masuk ke Kejaksaan, jadi kita kalau kayak gitu, masuk ke Kejaksaan tapi kita klarifikasi saksi-saksi itu harus lewat Kejaksaan gitu loh dek kita gak bisa manggil sendiri jadi kita harus kayak jalannya tuh harus lewat Kejaksaan gitu loh,

Pewawancara : brarti setelah BAP dulu ya mbak?

Informan 4 : BAP yang mereka dulu tuh jadi kayak prosedurnya tuh BPKP tuh klarifikasi itu harus setelah BAP Kejaksaan jadi kayak permintaan dulu apakah ini bisa dikatakan kerugian negara kalau iya, kita lanjut tapi kalau menurut kami bukan itu tidak menimbulkan kerugian negara itu hanya mungkin sifatnya apa ya dek menyalahi aturan biasanya kayak perbuatan perbuatan melanggar biasa maksudnya bukan kerugian itu kita bisa menolak untuk kita tidak usah melanjutkan proses PKKN-nya itu bisa kita tolak

Pewawancara : brarti laporan tuh pasti dari aparat penegak hukum memang, gak langsung, ada gak sih mbak yang personal langsung datang ke BPKP?

Informan 4 : personal gak ada pasti instansi

Pewawancara : oh instansi kalau misalkan bukti-bukti kayak gitu harus dikonfirmasi dulu ke ke apa mbak namanya misalkan kalau misalkan yang korupsi itu misalkan pemimpinnya gitu itu harus dikonfirmasi dulu gak ke pemimpinnya itu untuk dapat berkasnya atau bisa langsung diambil aja

Informan 4 : kita konfirmasi dulu

Pewawancara : oh konfirmasi dulu

Informan 4 : kan kita minta data kan itu lewat PIC-nya kan yang kita bilang dulu

Pewawancara : oh itu perlu konfirmasi juga oleh ketua tim atau biasanya

Informan 4 : pasti semuanya satu tim

Pewawancara : ada standar urutan prosedur audit untuk melakukan sebuah audit investigasi itu berarti sesuai pedoman semua ya mbak

Informan 4 : standarnya sama ya

Pewawancara : kalau dalam menjalankan proses audit sendiri BPKP itu pernah kolaborasi gak sih sama instansi lain kayak BPK atau KAP gitu instansi audit lain atau berdiri sendiri

Informan 4 : apanya auditnya, sendiri kita jadi gini, kalau kita masuk audit ke instansi itu kita harus memastikan apakah sekarang lagi di audit apa di audit pihak lain misalkan kita tanya lagi di audit BPK gak kita lagi di audit contoh yang PKKN ya itu kalau expose itu biasanya Pak Korwas nanya ini sedang dalam masa apa lagi di, udah di audit inspektorat belum, udah di audit BPK belum, kayak gitu biasanya jadi kalau udah ya kita gak boleh masuk kalau inspektorat udah ya kita gak masuk

Pewawancara : berarti gak mungkin ada yang kerjasama gitu ya mbak

Informan 4 : selama ini sih sendiri sih dek BPKP sendiri inspektoratnya sendiri sih

Pewawancara : terus gimana sih mbak untuk memastikan laporan hasil audit investigasi dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu

Informan 4 : ya kita punya ini aja punya timeline aja karena kita kan dari awal udah ada surat tugas tuh, surat tugas itu kan ada berapa hari misalkan 20 hari 20 hari kan kita udah bisa kan ngira-ira membagi waktu 20 hari itu nanti biasanya bikin kayak timeline misalkan tanggal ini sampai tanggal ini kita entry, entry meeting dulu tanggal ini sampai ini kita mengumpulkan data tanggal ini kita konfirmasi, tanggal ini kita analisis setelah itu kan kita udah punya kayak target gitu, tanggal sekian sebelum tanggal 20 tuh misalkan h-3 tuh kita kayak kita udah memfixkan apa ya, kayak simpulnya dulu sebelum kita bahas

ke obrik, jadi kan sebelum laporan jadi itu kan kita harus punya kesepakatan tuh dengan obrik misalkan kita punya temuan itu harus kita bicarakan dulu dek ke obrik apakah mereka menerima atau mereka masih ada kayak yang harus dilengkapi supaya temuan kita kayak, oh gak jadi berarti udah nol ya kayak gitu loh, kayak gitu jadi kita bikin timeline aja kalau misalkan ST 20 hari ya kita bagi dari awal kita lakuin apa aja itu biasanya nanti on track sih bisa selesai tepat waktu sih

Pewawancara : pernah gak mbak tapi kayak kekurangan waktu

Informan 4 : kalau aku di timku di timku pernah tapi ya bikin perpanjangan ST sih tapi memang itu kemarin kenapa ya kurangnya kenapa ya waktu perpanjangan tuh oh mulainya gini jadi kayak dari pusat itu kan kita tuh mengerjakan ST di perwakilan itu harus nunggu turun dari pusat nggak tau kenapa kayak perwakilan Jogja tuh telat gitu kayak perwakilan lain tuh udah mulai tapi kita tuh kayak baru tau oh ada tugas ini dan harus segera jalan jadi kayak kita terlalu telat gitu loh

Pewawancara : padahal udah dikasih ST

Informan 4 : padahal kalau Randall tuh kayak katanya udah dari kapan itu kan bisa jadi disini, karena penyampaiannya ke bawah juga itu bisa berbagai sebab sih kalau kayak gitu kan otomatis kita udah kayak startnya dari ketinggalan kan, nah waktu itu kita perpanjang bisa sih bilang ke Bu kaper tapi memang alasannya kayak gitunya, karena bukan salah kita kan bukan salahnya di kita yang lama ngerjain, tapi memang karena mulainya kita telat gitu loh deh karena kurang taunya kita kalau tugas itu seharusnya sudah mulai tapi kita kayak baru tau, kayaknya udah jalan seminggu deh waktu itu Jogja baru tau gitu loh deh, kayak perwakilan lain tuh udah turun ke lapangan kita tuh kayak belum ada yang distribusi gitu loh dari sini kayaknya dari sini entah dari kapan gatau tapi kan kalau kayak gitu kayaknya bukan karena kesalahan tim yang lama tapi karena,

Pewawancara : lama kerjanya bukan ya mbak

Informan 4 : kalau kayak gitu miskomunikasi aja kalau karena lama kerjanya sih selama ini timku ya, yang selama aku setim belum pernah sih

Pewawancara : pernah gak sih mbak dapet ST tuh langsung dua sekaligus atau nggak, tadi misalkan itu kan perpanjangan tapi ternyata udah ada tugas lagi gitu,

Informan 4 : pernah

Pewawancara : berarti double double job

Informan 4 : tapi kan aku anggota tim kan deh jadi kayak merasa bebannya tuh belum seberat ketua tim, kalau ketua tim itu kan sampai belum suruh laporan kalau kayak aku kan anggota tim itu masih kayak ngumpulin kertas kerja itu loh ya intinya tuh lebih berat di ketua tim, jadi kalau anggota tim di double tuh masih bisa lah harusnya paling ya capek sih cuman kalau misalkan yang lebih berat itu ketua tim kalau aku kan masih anggota tim yang masih bisalah double

Pewawancara : berarti sama ini mbak sebagai anggota tim ada nggak sih mbak kendalanya

Informan 4 : kendalanya ya kalau double-double itu paling kayak harus bagi kerjain disini dulu nanti yang disini lagi disini dulu bagi waktunya sih mungkin atau mungkin komunikasi jadi kadang setim itu tuh belum tentu ya kita cocok komunikasinya ya

Pewawancara : kalau kayak gitu solusinya gimana mbak?

Informan 4 : solusinya ya aku bilang aja misalkan kadang tuh beda pendapat kayak gitu-gitu loh dek menurut aku taktisnya gini, tapi ketua tim tuh maunya gini kadang mungkin aku bilang ke danis dulu kok kayak gitu ya nanti kan biasanya dibicarakan kenapa gimana jadi mending kalau masalah komunikasi dengan ketua tim tuh mungkin ke danisnya aku, jadi naik dulu ke atasnya dulu nanti kalau dalnisnya nggak bisa kesini nanti biasanya di baiknya gimana jalan tengahnya kalau komunikasi gitu sih biasanya

Pewawancara : oh gitu terus mbak sendiri gimana sih untuk memastikan kalau mbak itu bertanggung jawab atas laporan hasil audit yang udah disusun

Informan 4 : memastikan bertanggung jawab ya hasil analisis kita harus dipastikan udah tepat jadi kayak tadi yang aku katakan apa sih, apa yang kita tulis itu semuanya harus udah berdasar pembahasan dengan obrik gitu loh jangan sampai kita tuh nggak

mengkomunikasikan ke obrik, ternyata kayak kita menu, kamu kurang-kurangnya ini ini, nggak tanpa konfirmasi ke obrik dulu loh misalkan, kamu kurang ini ini tapi kemarin sebenarnya aku nggak nanya tuh, ternyata data-data ini kurang, nah kadang tuh data kurang itu ternyata dia belum gitu-gitu jadi kita harus mengkomunikasikan aja ke obrik seperti apa jadi kan yang dituangkan di laporan udah tepat kan

Pewawancara : berarti yang amat sangat dihindar itu miskomunikasi tuh ya

Informan 4 : iya miskomunikasi, terus ya dipastikan aja yang kita lakukan itu sesuai pedoman pedoman dari Randal

Pewawancara : jadi diusahakan urut ya ngerjainnya, apa sih hal yang harus diperhatikan agar hasil audit tuh benar-benar berkualitas dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan

Informan 4 : apa ya ya itulah hasilnya harus akurat bisa dipertanggungjawabkan jadi kayak nggak asal-asalan gitu loh, kita ngasih apa ya, kalo kita bikin laporan itu kan kita misalkan menemukan temuan kita kan ngasih saran rekomendasi tuh di paling bawah nah saran rekomendasi kita tu jangan terlalu apay a aku ngomongnya ya jangan terlalu muluk-muluk gitu loh dek kita harus mikir juga bikin saran rekomendasi itu yang masih logis gitu loh untuk mereka tindak lanjuti, karena di kit aitu kalo kita bikin saran rekomendasi itu nanti aka nada tindak lanjut nah itu kira-kira kita bicarakan ke obrik bisa ditindak lanjuti gak tu, kan maksudnya kalo kita asal-asalan kan jug obriknya bingung juga kan ini bpkp bilanganya harus gini gini gini tapi ternyata obriknya kayaknya ga mungkin bisa dilakukan kayak gitu, kayak gitu loh jadi kalo bisa tu saran rekomendasi tu masih bisa lah nanti ditindak lanjuti oleh obrik. Jadi gak boleh asal-asalan ngasih saran rekomendasi jangan terlalu, terlalu apaya bahasanya aku ngomongnya ke kamu, soalnya kadang tu sarannya terlalu susah untuk di TL gitu loh, Dik. Kan jadi enggak bisa untuk perbaikan juga kan kalau susah ditindak lanjuti.

Pewawancara : Realisasinya susah ya, Mbak.

Informan 4 : Heeh. Aku sok tau aja sih, kan aku ngomong utamanya aja, aku gak tau. Aku sempat denger gitu loh, pokoknya kalau bikin rekomendasi itu, kita tuh waktu, jadi sebelum laporan terbit itu kan kita exit meeting, exit meeting itu tuh pembahasan.

Pembahasan dengan obrik. Jadi kita menemukan ini-ini bukan temuan melulu ya, namanya kayak catatannya ini-ini-ini. Nah, obrik gimana, setuju enggak kayak gitu loh, Dik. Nah, dari situ kan nanti timbul rekomendasi, ya, kita tanya rekomendasinya ini ya, rekomendasinya ini ya. Mereka setuju. Nah, dari situ ada berita acara pembahasan, makanya kan harus ada tanda tangan. Duabelah Tanda tangan duabelah pihak, setuju atau enggak, kayak gitu sih.

Pewawancara : Berarti kalau misalkan ternyata obriknya gak setuju gimana, Mbak?

Informan 4 : Kalau obriknya gak setuju tapi ternyata dia gak sesuai ya, tetap kita tulis.

Pewawancara : Oh, tetap catatannya tetap kayak gitu ya, Mbak?

Informan 4 : Heeh.

Pewawancara : Ada kemungkinan berubah gak, Mbak, catatannya itu?

Informan 4 : Ya, kalau udah terbit laporan, ya,

Pewawancara : oh, udah gak bisa ya.

Informan 4 : Enggak bisa. Kita kan ada dasarnya, Dik, menentukan itu, menentukan, menentukan apakah dia, apa namanya, memang apa datanya kurang tepat atau ada yang kurang itu kan ada dasarnya.

Pewawancara : Mmm. Terus, ada enggak sih, Mbak, untuk jaga, jaga kerahasiaan informasi itu gimana?

Informan 4 : Eh, apa? Misalnya?

Pewawancara : kerahasiaan informasi dari misalkan pihak yang diaudit, kayak gitu-gitu atau proses auditnya bahkan. Kan ada tuh Yang harus dirahasiakan gitu, ada gak, Mbak?

Informan 4 : Misalnya data, datanya dari obrik misalkan, data dari obrik dirahasiakan dari publik apa gimana?

Pewawancara : Iya

Informan 4 : Ya, kalau misalkan memang mereka datanya, apa, apa Dik, istilahnya, sensitif gitu ya, kita, kita berhak menjaga privasi.

Pewawancara : Cara menjaga kerahasiaan itu gimana, Mbak? Mungkin biar enggak cerita mungkin ke temen yang lain yang di luar dari, dari audit investigasi.

Informan 4 : Ya, iya, itu udah tertanam di kita sih, kayak, iya, kayak misalkan tim aku kalau audit apa gitu, ya, enggak, enggak boleh diceritain misalkan ada hal sensitif yang di kasus itu, ya, enggak mungkin diceritain ke orang lain, enggak mungkin diceritain ke tim selain itu kan maksudnya, iya, emang itu kayak udah, Ya, udah enggak usah diceritain, udah naluri aja, itu kayak udah kayak kode etik kita gitu loh, Dik, kayak misalkan memang mereka ini, ini data sensitif ya, misalnya. Itu, ya, udah kita kayak udah, enggak mungkin keluar.

Pewawancara : Mmm.

Informan 4 : Maksudnya data sensitif tuh memang itu rahasia perusahaan gitu, kan.

Pewawancara : Iya. Ee, terus gimana sih, Mbak sendiri memastikan bahwa penyusunan program audit itu dilakukan tanpa intervensi termasuk dari pimpinan?

Informan 4 : Intervensi dari pimpinan?

Pewawancara : Atau dari pihak lain, berarti di sini gak pernah ada, ya, Mbak, intervensi dari pihak manapun gitu, gak pernah ada?

Informan 4 : Gak ada. Ya, selama tugasku sih, gak pernah ada, sih, Dik.

Pewawancara : Iya sih, kemarin Mas juga bilang kalau di BPKP tuh jarang, Iya.

Informan 4 : On track-on track aja, maksudnya, ya, udah tim sendiri yang mau intervensi juga mau ngapain juga gak ada di sini. Gak ada sih.

Pewawancara : Karena udah takut duluan ya mbak?

Informan 4 : Iya, mau ngapain juga kan mereka gitu, malah-malah jadi nanti hasilnya, ini, maksudnya hasilnya nanti malah, gak sesuai kan. Mereka juga mau dapat apa intervensi ke kita kan.

Pewawancara : Em, oh, kan tadi kan ada B A K gitu ya, Mbak?

Informan 4 : Heem. Berita acara klarifikasi.

Pewawancara : Iya, itu tuh langsung ketemu sama saksinya, berarti, Mbak?

Informan 4 : Iya, jadi, itu nanti eh, prosedurnya itu kita bilang ke penyidiknya, "Kami mau BAK saksi ini-ini-ini". Biasanya kita urutin tuh yang mau kita klarifikasi itu. Jadi kayak urutannya tuh kita dari yang saksi, saksi paling tidak terlalu utama gitu loh, Dik. Jadi, kayak misalkan, pasti di suatu kasus itu udah ketebak toh, kemungkinan tersangkanya tuh siapa? Biasanya tersangka tuh paling akhir. Jadi yang awal-awal tuh yang saksi-saksi apalah yang enggak terlalu inilah, dia kayak cuman pendukung aja, ya, itu nanti Apa namanya, di awal-awal. Kamu tadi nanya apa sih, Dek?

Pewawancara : Kalau BAK itu sebenarnya BAK itu kan ketemu sama saksi, itu gimana caranya Mbak itu enggak mudah untuk mempercayai apa, apa pernyataan dari saksi itu sih, Mbak.

Informan 4 : Ya, udah. Ya, pasti enggak terlalu percayalah, pokoknya, itu kan kita karena udah tahu ya, dari baca B A P-nya Kejaksaan, kan, kita udah belajar dari B A P dulu tuh, jadi kayak kita udah tahu dia tuh arahnya nanti ke mana. Kan enaknya B A K tuh kayak gitu ya, jadi kayak kita udah mempelajari jawabannya dari waktu dia di B A P dari Kejaksaan. Itu kan jadi kita kayak udah tau arah orang ini tuh, pasti dia nanti akan menjawab ini, cuman kita, kayak klarifikasi, itu kan istilahnya kayak memastikan lagi, kan. Jadi kayak cuman, memantapkan aja dia sebenarnya masih berubah enggak pernyataannya, tapi kan, kita juga gak berpihak dengan siapapun.

Pewawancara : Terus, kayak tadi misalkan kata Mbak kan ada, misalkan, pertanyaan tambahan gitu ya, Mbak, yang belum ditanyakan di B A P. Itu muncul sendiri atau gimana, Mbak, pertanyaan itu? Atau cari tau lagi?

Informan 4 : Ya kita belajar dari B A P-nya Kejaksaan, terus, mmm, misalkan gini, kok kayaknya kurang ya ini, kurang informasi ya, dari B A P yang penyidik itu ya. Jadi kayak kita timbul pertanyaan, kan. Kalau misalkan menurut kita kurang, kayak kita pasti, kita tuh pasti kalau udah baca B A P Kejaksaan tuh kayak, oh, udah nih, udah cukup kayak udah detail banget, tapi juga kadang, kok kurang dalem ya, yang ini belum ditanyain, yang ini belum ditanya. Nah, itu bisa kita tanyain di klarifikasi itu.

Pewawancara : Berarti juga harus kritis juga ya, Mbak, untuk yang harus kritis juga?

Informan 4 : Iya harus kritis juga

Pewawancara : Ee, caranya untuk memelihara sikap kritis itu sendiri gimana, Mbak?

Informan 4 : Ya, pelajarilah aja kasusnya itu, kita nanti kalau udah belajar kasus dari dokumen-dokumen itu, kan, pasti akan muncul rasa ingin tahu, kan? Loh, kok bisa ya, dia memasukkan K T P, kok bisa sih, orang ini gak tahu kalau si B itu ternyata orangnya palsu. Nah, dari situ kan kita kayak, kayak apa sih

Pewawancara : Skeptis, ya, Mbak?

Informan 4 : Itu nanti, paling kalau udah, aku juga dulu tuh awalnya, ih, susah, gimana nanti nanyanya, cuman pas kita udah terjun tuh kayak kita pegang dokumen-dokumen itu tuh kayak kita tuh kayak langsung, eh, kok bisa ya, kayak, ini kok dia bisa melakukan ini, kok bisa melakukan itu. Nanti pasti kayak ngalir sendiri, kayak, timbul rasa ingin tau, gitu loh. Kayak kalau saksinya mau datang kayak aku udah pengen nanyain ini, pengen nanyain itu sih. Itu nanti akan ini sendiri, dengan sendirinya gitu loh, kalau kita udah paham ya, paham kasusnya, belajar dari dokumen-dokumen yang kita peroleh itu kan, ada alurnya tuh. Jadi kita tuh dari dokumen itu, kita awalnya bikin kronologis itu loh, Dik, kayak urutan kejadian dari tanggal awal sampai akhir itu nanti kelihatan, di situ kelihatan nanti kenapa bisa kayak gitu, yang menyebabkan apa, itu nanti akan ketemu di jawaban saksi-saksi itu.

Pewawancara : Ke-detect, gitu, ya, Mbak.

Informan 4 : Heem.

Pewawancara : Oh, oke, deh. Udah sih, Mbak. Mbak, Mbak itu di BPKP udah berapa lama, Mbak?

Informan 4 : Aku nipnya 18, berarti berapa lama?

Pewawancara : Tujuh tahun ya?

Informan 4 : Tujuh.

Pewawancara : Oke deh, Mbak, makasih banyak, Mbak, sudah membantu.

Informan 4 : Oke. Aku jawab sebatas ini ku ya, kompetensiku ya.

LAMPIRAN 9 Transkrip Wawancara 5

Jabatan/Posisi : Auditor Mahir

Waktu : Kamis, 11 Desember 2025

Pewawancara : Jadi, saya mau wawancara tentang kompetensi auditor, prosedur audit, sama etika auditor saja mba.

Informan 5 : Kompetensi sama etika?

Pewawancara : Sama prosedur.

Informan 5 : Prosedur sama kompetensi etika?

Pewawancara : Kayak proses-prosesnya juga. Oke, langsung aja saya mulai ya, mbak. Untuk menurut mbak Rung sendiri, itu bagaimana pendidikan formal yang pernah ditempuh itu berkontribusi terhadap kemampuan dalam melakukan audit yang baik?

Informan 5 : Oh iya dong. Apalagi kalau, sebenarnya kan kalau misalnya dosen gitu, dia tuh nggak selalu menjelaskan tentang materi ya, materi kita justru belajar sendiri. Tapi dia banyak menjelaskan tentang ketika dia bekerja. Itu ternyata setelah bekerja bermanfaat banget. Jadi, dia tuh cerita kerjanya tuh gimana, gimana, gimana. Jadi, udah kebayang itu nanti kita kerjanya ngapain gitu loh.

Pewawancara : Berarti dia dicerita dari dosen. Terus untuk konsep atau materi tertentu ada nggak sih mbak yang bantu dalam praktik auditnya sendiri?

Informan 5 : Iya

Pewawancara : Itu kayak gimana? Konsep atau materinya?

Informan 5 : Misalnya waktu, planning, organizing, actuating, sama controlling. Itu kan proses manajemen dalam suatu organisasi kan. Ya kalau kita nggak nguasain

materinya, pas di lapangan kita nggak ini, nggak terlalu ngerti gitu. Jadi, menurut saya tuh kuliah tuh penting gitu.

Pewawancara : Berarti materinya udah didapat dari kuliah kebanyakannya.

Informan 5 : Iya heem

Pewawancara : Terus kalau selain pendidikan formal, kalau di BPKP itu ada pelatihan atau kursus nggak mbak?

Informan 5 : Ada, diklat.

Pewawancara : Itu biasanya ada jadwalnya atau gimana mbak?

Informan 5 : Nah biasanya tuh ada jadwalnya sendiri, ada juga yang ada jadwalnya sendiri. Tapi kebanyakan tuh didapatkan ketika diklat prajab. Diklat prajab itu nanti sekalian kita didiklatin jadi auditor, terus didiklatin yang lebih spesifik tentang pengadaan barang reja.

Pewawancara : Berarti itu semuanya pasti dapet diklat itu ya mbak?

Informan 5 : Iya, rata-rata kayak gitu.

Pewawancara : Berarti itu tuh berpengaruh nggak untuk meningkatkan kemampuan?

Informan 5 : Pengaruh, pengaruh.

Pewawancara : Terus untuk saat ini di BPKP itu ada pengembangan kompetensi yang udah dijalanin nggak?

Informan 5 : Ada kemarin auditor, tingkat audit investigatif.

Pewawancara : Itu kayak gimana mbak?

Informan 5 : Ya itu jelaskan tentang audit secara umum kan kita tahu ya, tapi kalau audit investigatif itu kan lebih spesifik lagi, caranya juga agak beda. Jadi memang perlu didiklatkan.

Pewawancara : Berarti kalau pelatihan untuk kompetensi sendiri itu terjadwal gitu pasti?

Informan 5 : Sebenarnya kita kan ada MOOC juga kan? MOOC itu *Massive Open Online Course*. Itu kayak didiklat gitu tapi via online. Jadi didiklatnya tuh nggak hanya pertemuan tapi juga online.

Pewawancara : Berarti ada ujian-ujiannya juga gitu?

Informan 5 : Iya ada.

Pewawancara : Nanti hasil ujiannya itu berpengaruh nggak mbak sama pekerjaan atau gimana?

Informan 5 : Ya menambah pengetahuan sih kayak insight gitu. Jadi kita kayak direfresh kembali kalau ada didiklat kayak gitu. Direfresh kembali kita tuh biar ngerjain tugasnya tuh lebih bagus lagi.

Pewawancara : Terus kalau di BPKP sendiri itu dikasih keleluasan nggak untuk auditornya sendiri ambil kompetensi atau sertifikasi di luar?

Informan 5 : Iya boleh.

Pewawancara : Untuk sejauh ini udah ambil apa aja mbak?

Informan 5 : Saya belum ambil yang di luar BPKP sih. Menurut saya tuh yang di BPKP udah cukup buat saya.

Pewawancara : Itu ada apa aja mba selain yang didiklat tadi sama yang kemarin kompetensi?

Informan 5 : Ya itu MOOC itu. *Massive Open Online Course*.

Pewawancara : Terus kalau kemampuan teknik audit itu membantu melaksanakan prosedur audit dengan hati-hati dan akurat nggak?

Informan 5 : Teknik audit sebenarnya tuh kalau materi tentang teknik audit emang ada cuman ketika kita turun ke lapangan itu jadi ada kesulitan tersendiri karena ada materi yang tidak, yang ada pelaksanaan di lapangan yang tidak tercakup di materi gitu.

Pewawancara : Contohnya kayak gimana tuh mbak?

Informan 5 : Ya kan teknik audit kan ada macam-macam tuh kan. Cuma ketika ini, oh iya kurang ini, kurang ini, kurang ini gitu.

Pewawancara : Berarti dalam prakteknya kurang.

Informan 5 : Teori tidak mencakup praktek lah.

Pewawancara : Jadi biasanya learning by doing gitu ya mbak?

Informan 5 : Iya, Learning by doing.

Pewawancara : Terus kalau menganalisis kasus-kasus sebelumnya untuk menambah wawasan itu berarti menghadapi kasus baru kayak gitu ya mbak?

Informan 5 : Iya.

Pewawancara : Kalau ada kasus baru kayak gitu, itu nanti adjusting sendiri lagi atau gimana mbak?

Informan 5 : Kasus baru ya belajar baca banyak peraturan.

Pewawancara : Dari pedomannya.

Informan 5 : Dari pedoman, dari juknis. Nanti bisa tergambar itu proses bisnis dari auditan tuh kayak gimana.

Pewawancara : Terus untuk pada saat proses investigasi, kira-kira ada yang pada saat proses investigasi itu merasa sulit banget gak mbak?

Informan 5 : Ada. Ngadepin klien. Karena kan investigasi kan berat ya. Ngadepin klien tuh kayak berat aja gitu.

Pewawancara : Kesulitannya kayak gimana tuh mbak?

Informan 5 : Kesulitannya masalah komunikasi. Gimana kita menyampaikan maksud kita tanpa mengingung perasaan auditan gitu.

Pewawancara : Ada gak mbak pernah menghadapi kasus yang menurut mbak sendiri itu gak sesuai sama kompetensi yang mbak punya?

Informan 5 : Iya pasti ada. Makanya teori itu belum mencakup praktek gitu mbak.

Pewawancara : Berarti mau gak mau belajar lagi.

Informan 5 : Belajar lagi.

Pewawancara : Terus setelah banyak, kalau mau mengaudit kan mengumpulkan bukti-bukti dulu ya mbak. Itu kalau udah banyak bukti yang diterima, itu tim investigasi selanjutnya untuk menentukan pelaku atau tersangka itu mekanismenya kayak gimana mbak?

Informan 5 : Pelaku atau tersangka bukan kewenangan auditor. Bukan kewenangan auditor, itu kewenangan penegak hukum. Jadi kita tuh cuman ngitung kerugian negaranya aja. Gak mencakup dia tersangkanya siapa atau enggak. Yang menentukan itu penegak hukum.

Pewawancara : Berarti nanti ada laporan ke sini ya mbak?

Informan 5 : Iya.

Pewawancara : Terus kalau misalkan ternyata terbukti ada kesalahan gitu atau ketidaksesuaian di laporan keuangan biasanya, itu selanjutnya kayak gimana mbak?

Informan 5 : Iya nanti kalau gak sesuai kan ditulis di laporan, laporan audit.

Pewawancara : Berarti dimasukin kalau kertas kerja gitu ya? Nanti yang menentukan salah atau tidaknya berarti dari penegak hukum ya?

Informan 5 : Iya kalau investigasi kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang lain selain investigasi ya enggak.

Pewawancara : Berarti apa sih mbak bedanya?

Informan 5 : Ya kalau investigasi kan dia kan udah tercium nih, tercium adanya kecurangan. Tapi kalau yang lain tuh operasional biasa aja, audit biasa.

Pewawancara : Kalau untuk dokumennya sendiri apa aja sih mbak yang perlu disiapkan sebelum diaudit?

Informan 5 : Banyak. Gak bisa disebutin soalnya spesifik banget, tiap kasus tuh spesifik.

Pewawancara : Berarti setiap bidang beda ya? Terus kalau ada kekurangan berkas gitu, auditor masih bisa melanjutkan proses auditnya atau enggak?

Informan 5 : Tergantung. Kekurangan berkas tuh biasanya dilengkapi sih.

Pewawancara : Berarti harus lengkap?

Informan 5 : Harus lengkap. Bukan lengkap sih bahasanya, memadai cukup dan memadai REKOCUMA.

Pewawancara : Berarti kalau kurang enggak bisa ditindaklanjuti?

Informan 5 : Iya harus nyari data lagi sampai ratanya ketemu.

Pewawancara : Kalau isi laporan investigasi itu ada apa aja mbak?

Informan 5 : Aduh itu rahasia ya.

Pewawancara : Kalau urutan prosedur audit itu yang ditetapkan BPKP ada sendiri ga?

Informan 5 : Prosedur audit ada PIA, penelitian informasi awal, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada penjaminan kualitas, sama pelaporan, terus tindak lanjut.

Pewawancara : Berarti itu udah ada di pedoman ya mbak? Udah semestinya kayak gitu?

Informan 5 : Iya

Pewawancara : Kalau misalkan terlewatkan gitu gimana mbak?

Informan 5 : Terlewatkan?

Pewawancara : Enggak sesuai gitu prosedurnya?

Informan 5 : Enggak sih selama ini enggak sih. Sesuai prosedur sih. Kan udah tau kan?

Pewawancara : Terus apa aja hal yang harus diperhatikan agar hasil audit itu benar-benar berkualitas mbak?

Informan 5 : Yang harus diperhatikan ya kita harus tahu masalah utama apa yang membuat auditan itu tidak mencapai tujuan.

Pewawancara : Kayak gimana tuh mbak?

Informan 5 : Itu banyak banget ya. Ya misalnya kalau tergantung dia tuh di auditannya objeknya apa, misalnya pertanian, atau di pendidikan, itu kan pasti dia punya ini, punya kayak perencanaan tahunan gitu ya, renja, rencana kerja gitu. Itu mencapai tujuannya dia enggak gitu. Ada masalah apa ketika auditan itu menjalankan tugasnya tidak mencapai tujuan itu masalahnya apa gitu? Ya intinya itu.

Pewawancara : Kalau mencapai tujuan itu berarti harus bisa untuk pengambilan keputusan ya mbak?

Informan 5 : Heeh

Pewawancara : Terus kalau mbak sendiri itu gimana untuk menerapin skeptisisme itu mbak?

Informan 5 : Udah alami sih. Nanti kalau misalnya sudah sering audit gitu udah mulai tergambar. Jadi itu memang learning by doing sih. Gimananya saya enggak bisa cerita karena itu pengalaman.

Pewawancara : Berarti kayak sama aja kalau percaya sama buktinya itu gimana mbak?

Informan 5 : Percaya sama buktinya? Ya percaya aja.

Pewawancara : Kalau misalkan bukti itu ternyata enggak valid.

Informan 5 : Nah itu makanya kalau di laporan itu ditegaskan kalau audit ini terbatas pada data yang disediakan auditan. Jadi kebenaran tentang data yang disediakan auditan itu bukan tanggung jawab auditor. Itu tanggung jawab auditan.

Pewawancara : Berarti auditor cuma bekerja sesuai apa yang ada di berkasnya ya?

Informan 5 : Jadi ditulis di laporan nanti kayak gitu.

Pewawancara : Kalau bentuk kehati-hatian mbak sendiri gimana mbak dalam menerapkan hasil audit?

Informan 5 : Dilihat bukti-buktinya itu konsisten enggak. Kalau enggak konsisten itu nah itu yang di iniin.

Pewawancara : Berarti yang harus dicurigai tadi.

Informan 5 : Heem

Pewawancara : Untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit sudah sesuai dengan pedoman dari BPKP itu gimana mbak?

Informan 5 : Ya baca pedoman. mempelajari

Pewawancara : Berartiurut aja ya biar enggak ada yang terlewat. Kalau memastikan penyusunan program audit dilakukan tanpa intervensi gimana mbak?

Informan 5 : Selama ini sih BPKP itu bentuk intervensinya itu enggak iniin objektivitas sih. Enggak ganggu objektivitas sih.

Pewawancara : Walaupun dari pimpinan ya mbak? Berarti semua tergantung yang ngerjain kasus itu ya? Berarti diserahkan semuanya ke auditor ya?

Informan 5 : Heem heem

Pewawancara : Sudah sih mbak. Segitu saja mbak. Makasih banyak ya mbak.

Informan 5 : Sama-sama